

10

**SEJARAH PENGARUH PELITA  
TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN  
DI BENGKULU**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1993**

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN DI BENGKULU

Tim Penulis :  
**M. Ikram**  
**Achmaddin Dalip**  
Penyunting :  
**Sri Sutjiatiningsih**  
Koreksi Naskah :  
**Soejanto**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1993

**Sejaran Pengaruh Pelita Terhadap masyarakat Pedesaan di Bengkulu**

Tim Penulis : M. Ikram  
Achmaddin Dalip

Penyunting : Sri Sutjiatiningsih

Koreksi Naskah: Soejanto

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta 1993

Cetakan Pertama 1993

Dicetak oleh: CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta - Indonesia

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Edi Sedyawati  
NIP. 130 202 962

## PENGANTAR

Dalam tahun anggaran 1981/1982, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Bengkulu melaksanakan kegiatan antara lain aspek sejarah tentang "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan". Kegiatan ini merupakan usaha lanjutan dari kegiatan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun lalu, dan dilaksanakan atas dasar DIP Nomor 461/XXIII/1981, 16 Maret 1981.

Kami menyadari bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan, baik dipandang dari segi materi penelitian maupun luasnya daerah penelitian. Berkat ketekunan para peneliti dan para informan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tugas yang berat ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur KDH Tk. I Provinsi Bengkulu,
2. Bapak Kepala Kanwil Departemen P dan K Provinsi Bengkulu, dan
3. Bapak Walikota/Bupati KDH Tk. II se Provinsi Bengkulu.

Ucapan terima terima kasih kami sampaikan pula kepada Saudara M. Ikram, BA (ketua) dan Saudara Achmaddin Dalip (anggota) selaku tim penulis atas bantuan mereka yang telah

menunjang kelancaran tugas untuk menyukseskan program proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, khususnya aspek sejarah tentang "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan" hingga naskah ini dapat terwujud.

Kami merasakan bahwa tulisan ini masih ada kekurangannya, tetapi hasil yang dicapai ini sudah merupakan hasil maksimal yang dapat dikerjakan oleh petugas di daerah.

Semoga naskah ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian dan penulisan selanjutnya dan sebagai pembuka tabir yang menyelubungi kebudayaan daerah serta bermanfaat bagi generasi mendatang.

Bengkulu, 20 April 1982  
Pemimpin Proyek,

ttd.

M. RAMLI, S.H.  
NIP. 130353495

## PENGANTAR

Buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Bengkulu* adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982.

Buku ini memuat uraian tentang pelaksanaan Pelita dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Bengkulu terutama di bidang pemerintahan desa.

Penerbitan buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Bengkulu* dimaksudkan untuk melengkapi penerbitan *Sejarah Pengaruh Pelita* di berbagai daerah yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih  
NIP. 130 422 397

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan</b> .....	iii
<b>Pengantar Pemimpin Proyek Daerah</b> .....	v
<b>Pengantar Pemimpin Proyek IDSN</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Rumusan Permasalahan .....	4
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Pertanggungjawaban Penulisan .....	6
<b>Bab II Keadaan Desa Sebelum Pelita (1950–1965)</b> .....	9
2.1 Desa Pasar Bengkulu .....	9
2.2 Desa Panorama .....	17
2.3 Desa Celakang Pondok .....	24
2.4 Desa Padang Sialang .....	32
2.5 Desa Padang Genting .....	42
2.6 Desa Semidang Alas (Fajar Bulan) .....	47
2.7 Desa Mubai .....	56
2.8 Desa Karanganyar .....	69
2.9 Desa Pensiunan .....	79

<b>Bab III Pelaksanaan Pelita di Bidang Pemerintahan</b> . . . . .	90
3.1 Desa Pasar Bengkulu . . . . .	90
3.2 Desa Panorama . . . . .	93
3.3 Desa Belakang Pondok . . . . .	94
3.4 Desa Padang Sialang . . . . .	97
3.5 Desa Padang Genting . . . . .	99
3.6 Desa Semidang Alas (Fajar Bulan) . . . . .	100
3.7 Desa Mubai . . . . .	105
3.8 Desa Karang Ayar . . . . .	106
3.9 Desa Pensiunan . . . . .	108
<b>Bab IV Pengaruh Pelita di bidang Pemerintahan desa</b> . . . . .	111
4.1 Desa Pasar Bengkulu . . . . .	111
4.2 Desa Panorama . . . . .	112
4.3 Desa Belakang Pondok . . . . .	114
4.4 Desa Padang Sialang . . . . .	120
4.5 Desa Padang Genting . . . . .	120
4.6 Desa Semidang Alas (Fajar Bulan) . . . . .	121
4.7 Desa Mubai . . . . .	124
4.8 Desa Karang Ayar . . . . .	126
4.9 Desa Pensiunan . . . . .	128
<b>Bab V Penutup</b> . . . . .	133
<b>Daftar Pustaka</b> . . . . .	135
<b>Daftar Responden</b> . . . . .	137
<b>Lampiran</b> . . . . .	142

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sejak tahun 1969 Pemerintah telah melaksanakan suatu sistem pembangunan bertahap secara berencana yang lebih dikenal dengan nama Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Sampai saat ini bangsa Indonesia telah melaksanakan Pelita I dan II dan dewasa ini kita sedang bergiat dengan pelaksanaan Pelita III.

Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus itu telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni yang lebih dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rangkaian program-program Pembangunan yang terus-menerus dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pada Hakekatnya, pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di samping modal dasar dan unsur-unsur potensial yang terdapat di Nusantara termasuk di daerah-daerah wilayah Negara RI, faktor ketahanan nasional yang menjamin stabilitas dan persatuan nasional, dan pertumbuhan perekonomian yang sehat, sangat menentukan.

Pelita kedua telah selesai dan telah menciptakan keadaan-keadaan yang mantap untuk melanjutkan ke Pelita ketiga sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari Pola Umum Pembangunan jangka panjang. Dalam Pelita ketiga akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang makin merata dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk jelasnya terlebih dahulu perlu diuraikan secara garis besar penahapan Pelita itu sebagai berikut :

1. Repelita I/Pelita Tahap I, Pelaksanaan Pembangunan :
  - a. bertitik tolak (dimulai) pada sektor pertanian
  - b. pembangunan industri yang mendorong sektor pertanian
2. Repelita II/Pelita Tahap II, Pelaksanaan Pembangunan :
  - a. dipusatkan pada sektor pertanian
  - b. meningkatkan industri yang mengolah bahan baku
3. Repelita III/Pelita Tahap III, Pelaksanaan Pembangunan :
  - a. dipusatkan pada sektor pertanian
  - b. meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
4. Repelita IV/Pelita Tahap IV, direncanakan pelaksanaan Pembangunan :
  - a. dipusatkan pada sektor Pertanian.

- b. meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
  - 1) industri berat
  - 2) industri ringan

Berbicara tentang soal pemerataan, berarti pula sifat pembangunan itu haruslah mengisi pada setiap sektor dan menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok desa di seluruh Nusantara. Desa merupakan wilayah pembangunan yang sangat potensial. Sebagian besar sumber dan hasil produksi, sebagian besar jumlah penduduk, hidup, berasal dan terdapat di desa-desa, namun setelah seperempat abad bangsa Indonesia merdeka, kehidupan desa masih belum banyak berubah. Sebagian terbesar penduduk hidup dalam mata penghidupan pertanian, sikap mental dan pola hidup amat sederhana, cara berpikir dan bekerja bersifat tradisional. Berdasarkan hakekat dan tujuan pembangunan, kita ingin menerobos dan membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kepicikan berpikir serta sifat-sifat tradisional yang negatif.

Usaha modernisasi pembangunan desa-desa ini, terutama dalam menyusun perencanaan dan meletakkan kebijaksanaan untuk diterapkan ke desa-desa tersebut perlu dituntut kemampuan yang teliti guna penyesuaian keadaan sehingga tidak akan terjadi ketidakseimbangan antara ide, sarana, dan dana dengan sifat-sifat desa yang masih serba sederhana dan jauh terbelakang. Untuk itu perhatian terhadap struktur masyarakat, kepemimpinan dan kekuasaan, sistem dan metode pembaharuan pembangunan untuk mencapai hari esok yang lebih baik, sangat diutamakan.

Pelaksanaan Pelita banyak memberikan hasil bagi pembangunan bangsa, yang sebagian sudah dapat dirasakan nikmatnya oleh rakyat banyak. Sarana komunikasi dan transportasi antara kota dan desa, antara desa dengan desa, semakin lama semakin baik, sehingga mampu membuka selubung isolasi yang selama ini belum terlaksana. Pelaksanaan Pelita tidak saja memberi pengaruh timbal-balik antara kota dan desa, tetapi

juga menimbulkan pelbagai akibat sebagai wujud dari pengaruh yang dilahirkannya.

Bertitik tolak dari pelaksanaan pembangunan di pedesaan ini pulalah, mendorong kita untuk meneliti, menginventarisasikan segala permasalahan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Provinsi Bengkulu yang memiliki 1063 buah desa, memilih sembilan desa garapan, yang masing-masing terdiri atas : <sup>1</sup> )

1. Tiga buah desa di daerah tingkat II Kotamadya Bengkulu, yakni : Desa Pasar Bengkulu, Kecamatan Teluk Segara, Desa Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, dan Desa Belakang Pondok, Kecamatan Gading Cempaka.
2. Tiga buah desa di daerah tingkat II Kabupaten Bengkulu selatan, yakni : Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma, Desa Pajar bulan, Kecamatan Talo, dan Desa Padang Sialang, Kecamatan Manna.
3. Tiga buah desa di daerah tingkat II Kabupaten Rejang Lebong, yakni : Desa Pensiunan, Kecamatan Kepahyang, Desa Karang Anyar, Kecamatan Curup, dan Desa Mubai, Kecamatan Lebong Selatan.

Adapun pokok pembahasan meliputi keadaan Desa sebelum Pelita, pelaksanaan Pelita dan hasil serta pengaruh atau akibat-akibat yang dirasakan setelah Pelita.

### ***1.1 Rumusan Permasalahan***

Dalam mengemukakan topik penulisan yang ditetapkan yang bahan dan datanya didapati dari hasil kerja di lapangan dan kepustakaan, kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan tentang sampai seberapa jauh pengaruh Pelita dapat menjangkau atau memberi pengaruh kepada kehidupan masyarakat di pedesaan, terutama di bidang pemerintahan desa.

Pengaruh Pelita sudah mulai nampak dalam kehidupan masyarakat dan hasilnya pun sebagian sudah dapat dirasakan nikmatnya oleh rakyat banyak hanya di beberapa tempat saja,

lajunya pembangunan tidak selalu dibarengi dengan kesiapsiagaan mental keterampilan para pelaksana dan masyarakat untuk melaksanakan, menggunakan, menikmati hasil Pelita tersebut secara tepat guna dan berdaya guna, seperti sikap mental yang jujur, disiplin, hemat, terampil, berpengetahuan dan berpengalaman.

1. Dalam masa transisi ini ada kecenderungan sebagian kecil penduduk untuk bersikap manja, lupa diri dan enggan mengerjakan hal-hal yang bernilai positif dalam lingkungan yang tradisional, misalnya, penggunaan TV, listrik, telepon, pupuk, air bersih, kakus, dan lain-lain. Acara-acara kesenian dan TV pada malam hari mengubah kehidupan pergaulan muda-mudi dan mempengaruhi tradisi keagamaan.
2. Pembangunan sekolah-sekolah Inpres, tidak sejalan dengan pengadaan lokasi dan jatah jumlah guru/pengajar.
3. Pemantapan pemerintahan desa melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 sangat menunjang stabilitas, ketertiban dan keamanan desa, tetapi masih diperlukan adanya pembinaan baik yang bersifat koordinatif maupun yang organisatoris. Contoh, banyak anggota masyarakat yang diangkat menjadi pegawai negeri dengan jabatan sebagai lurah atau staf pada perangkatnya, usianya terlalu muda, bukan putera daerah atau tidak memahami adat istiadat desa yang berlaku. Selain itu, pada staf perangkat desa, tidak ada kursi khusus yang bertugas menangani dan mengelola permasalahan masyarakat dalam adat istiadat desa.
4. Dalam mendapatkan data anggota tim di daerah banyak mendapatkan kesulitan terutama sebagai akibat kurang teraturnya administrasi pemerintahan desa dan langkanya jumlah informan atas desa-desa tersebut, karena tingkat pengetahuan informan yang belum tinggi.

## ***1.2 Tujuan***

Tujuan dari pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh Pelita yang

dilaksanakan di desa-desa, khususnya pada sembilan desa sasaran di tiga daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya wilayah Provinsi Bengkulu. Tiap daerah tingkat II diambil tiga desa yang berbeda, yaitu desa swasembada, swadaya, dan swakarya.

2. Menginventarisasikan dalam suatu buku/naskah suasana kehidupan desa sebelum dan masa pelaksanaan Pelita di desa-desa sasaran serta segala permasalahan dan akibat yang ditimbulkannya.
3. Ingin mengetahui sampai seberapa jauh hambatan yang terjadi bagi suatu desa dalam peranannya dan peransertanya menanggapi dan melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa tersebut.
4. Ingin mengembangkan bahan, data, dan pemikiran tentang pembangunan dan pelaksanaan Pelita di desa sebagai evaluasi dan bahan bagi pemerintah dalam mengambil dan menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

### *1.3 Pertanggungjawaban Penulisan*

Ruang lingkup kegiatan penulisan meliputi dua hal, yakni ruang lingkup geografis dan ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan ialah lingkungan permasalahan yang digarap sesuai dengan topik yang ditentukan, yakni Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan dengan dititikberatkan pada masalah-masalah pemerintahan desa. Ruang lingkup geografis meliputi wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu dengan sasaran jangkauan sembilan desa pilihan atau yang berasal dari tiga daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya) dengan kriteria meliputi desa swasembada, swadaya, dan swakarya.

Organisasi kegiatan penginventarisasian dan penulisan naskah, didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu tahun 1981/1992 dengan Pimpinan dan anggota dua orang,

yakni M. Ikram, BA dan Achmaddin Dalip. Sistematika kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan naskah.

Pelaksanaan kegiatan didasarkan atas pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan, para pelaksana melaksanakan kegiatan dengan terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat desa yang menjadi sasaran penelitian, dengan bantuan para informan seperti tua-tua dusun, bekas kepala kampung, orang-orang tua pejabat masyarakat dan pemerintah. Sebagai bahan bandingan, penunjang dan perlengkapan pengetahuan yang relevan, peneliti menggunakan buku-buku kepustakaan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi, dan berbagai alternatif pendekatan. Memang dijumpai berbagai kesulitan dalam penelitian, terutama karena kurang teraturnya administrasi pemerintahan desa, lebih-lebih lagi tentang kearsipan pencatatan data desa sebelum Pelita. Sarana penelitian seperti buku catatan, alat perekam, tustel, dan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan juga banyak menunjang keberhasilan penelitian.

Sistematikan penulisan pada dasarnya tetap menggunakan sistematika *outline* yang telah ditetapkan oleh tim pusat, namun karena sasaran penelitian dan penulisan pada sembilan buah desa itu hakekatnya sama maka pada daftar isi (outline) hanya ditunjukkan pokok-pokok atau sub judul saja. Hal-hal yang bersifat penjabaran dan uraian terdapat pada masing-masing sub judul desa-desa tersebut.

## CATATAN

1. Dit. Pembangunan Desa Propinsi Bengkulu tahun 1979/  
1980.

## **BAB II**

### **KEADAAN DESA SEBELUM PELITA (1950–1965)**

#### ***2.1 Desa Pasar Bengkulu***

##### *2.1.1 Lingkungan alam dan Penduduk*

Desa Pasar Bengkulu merupakan desa tua dalam Wilayah Tingkat II Kotamadya Bengkulu, Desa ini sudah ada sejak zaman pemerintahan jajahan Inggris pada abad ke 17. Pada awal kemerdekaan desa Pasar Bengkulu, berstatus sebagai daerah kepemangkuan dalam Wilayah III Kotapraja Bengkulu, atau lebih populer dengan sebutan wilayah *Wijkmeester* III.<sup>1)</sup> Luas Desa Pasar Bengkulu, sekitar dua km<sup>2</sup>, dengan batas-batas di sebelah barat dengan Samudra Indonesia, sebelah timur dengan Marga Perwatin XII, Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah utara dengan Marga Bermani Sungai Hitam, dan sebelah selatan dengan Kepemangkuan Kampung Bali.

Desa Pasar Bengkulu merupakan desa pantai yang berbentuk sebuah delta yang memanjang ke utara, dibelah oleh Sungai Serut yang berhulu di kaki Gunung Bungkok. Di rawa sepanjang sungai dapat ditanam padi dan sayur-sayuran, sedangkan di daratan banyak ditanam pohon kelapa.

Di dalam semak belukar sekitarnya masih hidup jenis binatang babi, musang, ular, berbagai jenis burung, buaya, biawak, berang-berang dan beberapa jenis kera. Desa ini beriklim tropis dan bertiup angin darat dan angin laut yang sangat berguna bagi nelayan laut.

Jumlah penduduk sekitar 3200 orang, dan termasuk golongan Orang Melayu. Di samping itu terdapat pula penduduk pendatang baik dari daerah sekitarnya maupun dari daerah lain, seperti dari Padang, tetapi jumlahnya sedikit sekali.

Sebelum Bengkulu menjadi provinsi, Desa Pasar Bengkulu merupakan bagian kecil dari wilayah III yang kepala wilayahnya bergelar *datuk*, merupakan salah satu kepemangkuan dari empat buah Datuk Wilayah Pemerintahan Kotapraja Bengkulu, dan bagian dari Keresidenan Bengkulu. Keresidenan Bengkulu waktu itu merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Desa Pasar Bengkulu mengalami beberapa kali masa yaitu : tahun 1685–1825 menjadi daerah jajahan Inggris, tahun 1825–1942, menjadi daerah jajahan Belanda, tahun 1942–1945 menjadi daerah jajahan Jepang, dan 1945–sekarang, merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Selama masa Perang kemerdekaan, desa tersebut pernah menjadi tempat pertahanan dan latihan organisasi BKR., PKR dan TKR. Pada tahun 1946, Organisasi Pertahanan PKR Desa Pasang Bengkulu mampu menggagalkan usaha tiga orang kolonialis Inggris yang akan merebut daerah tambang emas Lebong Tandai. Tahun 1948–1948, desa ini dikosongkan sama sekali. Semua penduduk menyingkir dan berjuang ke luar kota, karena tak ingin dijajah Belanda kembali. Tahun 1949 sebagian desa itu dibakar oleh tentara pendudukan Belanda. Di antara pejuang desa yang gugur ialah A. Jalil dan Ibnu Hajar. Tahun 1950, setelah genjatan senjata, penduduk desa kembali dan mulai membangun desanya secara sederhana.

### 2.1.2 Pendidikan

(a) Pemerintah sampai tahun 1960an di desa ini hanya terdapat

lembaga pendidikan milik pemerintah, yaitu sebuah sekolah rakyat (SR) dengan ruangan belajar milik Muhammadiyah, dan satu sekolah menengah tingkat atas (SMA) yang lokasi sementara nya menumpang di gedung yang sebenarnya untuk Sekolah Rakyat Nomor 6 tersebut (tahun 1962).

- (b) Lembaga Swasta yang ada ialah taman kanak-kanak dan sekolah Ibtidaiyah milik Muhammadiyah. Bentuk pendidikan yang lain berupa pengajian agama Islam yang dilaksanakan di mesjid, sekolah atau di rumah-rumah.

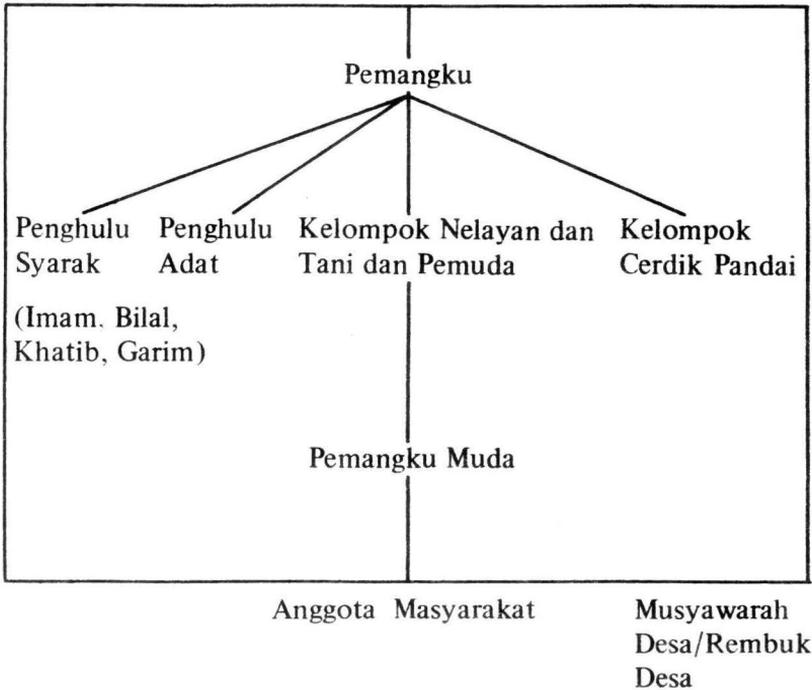
Selain itu masih ada pendidikan keterampilan berupa kerajinan rumah tangga (menganyam, menyirat dan menyulam atau menekat) dan pendidikan kesenian (pencak silat dan tari tradisional). Baik pada sekolah milik pemerintah maupun pada sekolah swasta, keadaan tenaga pendidik (guru) dan fasilitasnya sangat kurang. Dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan berasal dari orang tua murid, sumbangan masyarakat, dan bantuan pemerintah.

### 2.1.3 Struktur Pemerintahan

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah, sebagai pelaksana atau bagian dari pemerintahan wilayah pimpinan datuk, dan daerah Kotapraja Bengkulu, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Pasar Bengkulu, dipimpin oleh seorang *pemangku* dan dibantu oleh pemangku muda serta *penghulu syarak* dan *penghulu adat*. Penghulu syarak adalah pemuka-pemuka agama yang terdiri atas *imam*, *khatib*, *bilal* dan *garim*. Penghulu adat ialah ketua adat atau pemuka adat yang dapat berasal dari nenek, mamak dan kaum cerdik cendekia. Skema berikut dapat lebih memperjelas uraian di atas.

### DATUK WILAYAH III



Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang terdiri atas nelayan dan petani, pemerintah Desa Pasar Bengkulu menyelenggarakan beberapa program yaitu :

- (a) Pendidikan keterampilan bagi kaum nelayan khususnya nelayan tradisional sehingga menjadi nelayan yang mampu berprestasi, dengan cara memperkenalkan penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang baru seperti kapal motor, jaring nilon, dan lain-lain.
- (b) Peningkatan usaha pertanian melalui sistem Bimas dan Inmas.
- (c) Pendidikan kemasyarakatan yang meliputi pendidikan kesehatan, pendidikan agama, pemberantasan buta huruf,

dan kerajinan rumah tangga seperti menganyam, menjirat, menyulam, menekat dan lain-lain.

(d) Ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tugas kewenangan pemerintahan desa ialah menyampaikan serta melaksanakan segala petunjuk program pemerintah kotapraja yang dituangkan melalui Datuk Wilayah III Kotapraja Bengkulu.

Kepala desa mengepalai urusan pemerintah desa. Kepala desa mengatur atau mengkoordinasi segala urusan masyarakat desanya yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, agama, adat istiadat, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

Dalam kegiatan operasional pemerintah desa, kepala desa turut mengatur perdamaian dari persengketaan yang terjadi dalam masyarakat, surat jual-beli ternak, tanah, perizinan perhelatan atau perayaan adat, waktu turun ke sawah, waktu giliran turun pukot ke laut, ketertiban dan keamanan, data kependudukan dan lain-lain. Selanjutnya mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai urusan pemerintahan desa.

#### *2.1.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa.*

Persyaratan pencalonan dan prosedur pemilihan ialah seseorang dapat dicalonkan sebagai kepala desa atau pemangku, apabila : (a) dapat membaca dan menulis huruf Latin, (b) sehat, dewasa, dan beragama Islam, dan (c) mengerti dan memahami seluk-belum adat istiadat serta mempunyai dedikasi tinggi dan terpancang di tengah-tengah masyarakat.

Pemangku ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat dengan tenggang waktu masa jabatan tak terbatas. Seorang pemangku berhenti dari jabatannya apabila ia meninggal dunia, bersalah karena melanggar ketentuan/norma hukum, dan sakit atau cacat sehingga tak dapat menjalankan tugasnya.

Hasil pemungutan suara tersebut oleh musyawarah desa/Rembuk Desa diajukan kepada walikota melalui bentuk wilayah

III Kotapraja Bengkulu. Kemudian setelah diteliti, disahkan dan diterbitkan surat Keputusannya. Proses pelantikannya, biasanya cukup dengan memanggil pemangku hasil pilihan dan penunjukkan tersebut oleh walikota melalui datuk wilayah yang bersangkutan.

#### *2.1.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah.*

Pemuka adat, berperan membantu pemangku selaku kepala adat untuk menentukan dan melaksanakan adat istiadat dalam daerah pemangkuan, terutama dalam adat perkawinan.

Pemuka agama berperan membantu pemangku dalam bidang agama, terutama memberi petunjuk dan bimbingan di bidang keagamaan Islam kepada masyarakat desa.

Pemuka masyarakat atau kaum cerdik pandai membantu pemangku dalam bidang pemerintahan guna memberikan inspirasi serta membangkitkan semangat gotong royong penduduk terhadap pembangunan desanya sendiri.

#### *2.1.6 Organisasi Politik dan Non Politik*

Keanggotaan organisasi politik yang hidup dan berkembang di desa Pasar Bengkulu pada waktu itu adalah: Masyumi, PSII, N.U. Dalam keadaan sehari-hari, kehidupan sosial dan keluarga dalam masyarakatlah yang lebih menonjol. Kegiatan politik hanya tampak dalam waktu-waktu tertentu saja.

Satu-satunya organisasi non politik yang ada dan berkembang dalam desa itu adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini bergerak dalam bidang agama, sosial dan pendidikan. Usaha-usahanya tampak dalam pendirian dan pembinaan sekolah/lembaga pendidikan, dan amal sosial yang lain.

#### *2.1.7 Perekonomian Masyarakat Desa*

Potensi desa Pasar Bengkulu terdapat pada laut dan sungai yang banyak menghasilkan ikan, daratan yang terdiri dari tanah rawa dan tanah daratan berpasir yang dapat ditanami padi,

sayur-sayuran dan pohon kelapa. Selain itu potensi masyarakat yang suka hidup bergotong royong serta suka akan kerajinan rumah tangga, seperti menganyam, ataupun berternak, sangat membangun kehidupan ekonomi penduduk.

Mata pendaharian penduduk terdiri atas usaha menangkap ikan, dan bertani. Sebagai pekerjaan sampingan atau sambil penduduk melakukan pekerjaan beternak, berdagang dan kerajinan rumah tangga.

Sikap mental penduduk sejak dulu hingga sekarang tidak banyak mengalami perubahan. Mereka suka bergotong royong, taat beragama dan penuh toleransi. Taraf pendidikannya tidak tinggi, kondisi ekonomi belum memadai. Di daerah pinggiran pantai watak penduduk sedikit keras.

Pengaruh kebudayaan luar tidak banyak membekas pada kehidupan penduduk. Umumnya penduduk patuh dengan adat tradisi yang ada. Penduduknya tidak banyak yang merantau jauh, dan sedikit sekali yang mampu melanjutkan ke sekolah tinggi, rata-rata pemudanya berpendidikan SD atau SLTP (SMTP).

Umumnya rumah tempat tinggal penduduk berbentuk rumah panggung, yang terbuat dari kayu, atap daun rumbai, dinding pelupuh/papan. rumah yang beratap seng dan bertangga batu adalah rumah penduduk yang dapat dikategorikan golongan mampu. Keadaan perlengkapan rumah menggambarkan hal yang penuh kesederhanaan. Pada bagian beranda rumah tampak ukiran-ukiran khas, yang menunjukkan tingkat seni rupa daerah tersebut. Tulang bubungan rumah ada yang melintang, ada yang memanjang yang banyak persamaannya dengan daerah lain. Umumnya sebuah rumah dihuni oleh satu keluarga, kecuali bagi keluarga baru yang belum mampu mendirikan atau menyewa rumah lain atau pun juga merupakan anak tunggal kesayangan yang sekaligus akan menjaga kedua orang tuanya.

Keadaan jalur komunikasi jalan yang membelahi desa itu sangat penting artinya karena merupakan jalan penghubung wilayah Kotapraja Bengkulu dengan Wilayah Kabupaten Beng-

kulu Utara. Di pengujung jalan ke arah utara terdapat sebuah jembatan besi yang penting artinya bagi pengembangan kehidupan perekonomian penduduk. Jenis alat transportasi yang dimanfaatkan penduduk adalah: sepeda, gerobak, dan mobil. Di sungai dipergunakan orang sampan dan rakit. Dalam masa sebelum Pelita, sebagai akibat bencana alam dari kikisan ombak yang melanda desa itu, sejumlah 37 kepala keluarga telah dipindahkan ke proyek perumahan baangunan pemerintah di seberang air jembatan Pasar Bengkulu.

Penduduk pasar Bengkulu memasarkan hasil desanya seperti ikan, kelapa, hasil anyaman ke Pasar Minggu atau ke Pasar Ikan yang jauhnya dua setengah kilometer. Namun penghasilan dari barang yang dipasarkan tersebut belum memadai.

Sumber penghasilan desa didapat dari usaha penangkapan ikan. Secara bergiliran setiap nelayan pukat memberikan hasil penangkapan ikannya, satu kali sebulan, yang biasanya jatuh pada hari Jum'at. Usaha ini untuk membantu pembiayaan kas, pembangunan tempat ibadah dan untuk usaha sosial lainnya. Selain itu, pemerintah desa mendapatkan sumbangan pula dari pemerintah Kotapraja setempat.

Untuk kepala desa sendiri, selain mendapat honorarium sebanyak Rp 1.500,- sebulan, ia mendapat pula sumbangan sukarela dari rakyat yang melaksanakan perayaan adat perkawinan dan lain-lain.

Usaha kegiatan masyarakat yang ada kaitannya dengan kesejahteraan perekonomian rakyat, adalah perkoperasian. Sebelum masa Pelita, di desa itu sudah ada sebuah Koperasi Simpan Pinjam, untuk memenuhi kebutuhan para anggota, khususnya peralatan para nelayan, seperti benang, pancing, dan jaring nilon.

### *2.1.8 Sosial Budaya*

Pengelompokan masyarakat di sini tidak berdasarkan kelas ekonomi, tetapi berdasarkan profesi, mata pencaharian dan usia. Pola kehidupan masyarakat yang membudaya adalah:

gotong royong. Kegiatan gotong royong ini dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tradisional. Kehidupan masyarakat yang anak statis, mempertahankan eksistensi kebudayaan dan kesenian lama. Pengaruh budaya luar hampir-hampir tidak ada.

Kepala desa disamping berfungsi sebagai pemimpin, ia turut pula memajukan kesenian tradisional. Tangkai-tangkai kesenian yang lama membudaya adalah: seni tari-dendang, gambus/gamas, berzikir, dan kesenian tabot. Kesenian ini amat berperan dalam kegiatan upacara lingkaran hidup atau *life cycle*, seperti mencukur anak, khatam Qur'an, perkawinan dan lain sebagainya. Kelihatan banyak unsur persamaan dengan berbagai tangkai kesenian yang hidup di desa-desa pesisir Barat Pulau Sumatera, mulai dari Daerah Istimewa Aceh hingga Bengkulu. Seratus persen penduduk beragama Islam, bahkan kegiatan keagamaannya menggambarkan ketaatan yang tinggi. Sebagai alat komunikasi bahasa daerah yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dialek Bengkulu. Dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat normal atau pembicaraan dengan orang yang tidak paham akan bahasa daerah, dipergunakan bahasa Indonesia.

Untuk menampung permasalahan kesehatan, di desa itu sudah didirikan satu buah Balai Pengobatan, sudah ada jalur air bersih, dan pengenalan akan sarana kesehatan, seperti jamban, air bersih, pengobatan dan lain-lain. Sekalipun demikian, usaha ini belum mencapai target tujuan yang diinginkan. Hal ini tampaknya bukan saja karena sistem pembinaan dan sarana fasilitas kesehatan yang masih kurang, tetapi belum cukupnya tingkat kesadaran dan pengetahuan penduduk setempat. Bangunan kakus (WC) belum terbiasa bagi penduduk.

## ***2.2 Desa Panorama***

### ***2.2.1 Lingkungan Alam dan Penduduk.***

Desa Panorama adalah sebuah desa dalam wilayah Tingkat II Kotamadya Bengkulu, yang terletak di ujung perbatasan Kota-

madya Bengkulu merupakan batas antara Kotamadya Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

"Pasar" ini dipimpin oleh seorang pemangku dibantu oleh beberapa orang pemangku muda, yang disebut juga sebagai pemangku adat. Selain itu sebagai satuan kerja di pemerintahan desa terdapat pula apa yang disebut penghulu Syarak. Tugas pokok dari penghulu syarak ini, mengurus dan mengatur masyarakat dalam hubungannya dengan keagamaan, seperti persoalan perkawinan, perceraian, rujuk dan lain-lain.

Unsur-unsur masyarakat desa yang lain adalah tua-tua pasar yang terdiri dari wakil kelompok kerja (tani) atau tua adat. Bila terdapat persoalan yang agak rumit mereka bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang bijaksana terhadap persoalan yang dihadapi.

Menurut perkiraan pasar luas pasar ini kurang lebih 3 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas bagian-bagian desa, yaitu Tebat Dorong, Lorong Jati, Kampung Penyengat, Lorong Butai dan ditambah lagi bagian yang baru yang kami namakan Panorama Baru.

Dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya yang berada dalam Kotamadya Bengkulu, Panorama ini termasuk sebuah pasar yang baru, yaitu pecahan dari Pasar Jembatan Kecil. Pemisahan desa ini terjadi sejak tahun 1965. Penduduk Desa Panorama tahun 1965 berjumlah ± 700 jiwa, dan tahun 1981 bertambah menjadi 1200 jiwa<sup>2</sup>.

Adapun batas-batas desa tersebut adalah: sebelah utara dengan desa Dusun Besar Kabupaten Bengkulu Utara. Sebelah selatan dengan Pasar Jalan Gedang Kotamadya Bengkulu, sebelah barat dengan Pasar Kebuh Tebeng dan Jembatan Kecil dan sebelah timur juga dengan Desa Dusun Besar

Nama Panorama berarti indah dan mungil. Desa Panorama letaknya di tanah datar tidak bergunung/berbukit disana sini sedikit rawa yang ditumbuhi oleh pohon rumbia yang dapat digunakan sebagai penambah penghasilan penduduk. Di hutan desa ini tumbuh pula beberapa jenis pohon yang berguna bagi manusia seperti jering, asam kandis, rempenai. Tidak kalah

pentingnya tumbuh pula pohon-pohonan untuk bangunan rumah, seperti kayu gadis, pawas dan lain-lain.

Hutan-hutan ini diolah oleh penduduk, dijadikan kebun ladang. Sangat sedikit tanah persawahan yang ada di Pasar Panorama. Penduduk Panorama memiliki tanah persawahan di Desa Dusun Besar (2 km ) dan boleh dikatakan seluruh penduduk Panorama memiliki tanah persawahan di daerah itu. Tanah persawahan mendapat air dari tadah hujan dan pengaliran yang berasal dari Danau Dusun Besar atau Danau Dusun Tak Sudah.

Selain dari binatang-binatang liar, banyak pula hewan ternak yang hidup di pasar Panorama seperti sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Dari hasil ternak hewan-hewan inilah, mengantar sebagian penduduk Panorama menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Mekkah. Selain dari itu ada pula yang memelihara kuda tambangan (sado) dan hampir setiap rumah memelihara ayam walaupun hanya untuk sambilan saja.

### 2.2.3 Pendidikan

Kadaan pendidikan sangat rendah, rata-rata penduduk berpendidikan sekolah dasar. Baru setelah tahun 1960, di antara anak-anak mereka dapat merasakan pendidikan sekolah menengah atas. Sekolah yang ada hanya sebuah, yakni sekolah desa milik Marga Proatin XII dan masih bernama Sekolah Desa Dusun Besar. Kemudian sekolah desa ini ditingkatkan/dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat (SR). Pelajaran dan pendidikan agama (Islam) berupa pengajian-pengajian banyak terdapat di rumah-rumah.

Sekolah-sekolah swasta yang ada:

- a. Di zaman penjajahan Belanda: MAS (*Madrasah Arabische School*)
- b. Di zaman Merdeka: Madrasah/Ibtidaiyah Nur El Huda, letaknya pun di Dusun Jembatan Kecil.

### 2.2.3 *Struktur Pemerintahan*

Pasar atau Desa Panorama dipimpin oleh seorang pemangku yang bertanggung jawab kepada datuk wilayah dan pada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu. Pemangku ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pemangku muda dan penghulu syarak. Apabila terdapat hal-hal yang tak dapat diselesaikan mereka minta nasehat kepada tua-tua desa/pasar dan apabila ini juga tak dapat teratasi maka persoalan tersebut diserahkan kepada atasan yang lebih tinggi atau yang berwajib. Pemerintah desa ini adalah unsur pembantu pemerintahan Daerah Kotamadya Bengkulu dan alat penghubung Pemerintah Daerah Kotamadya dengan rakyat yang berada di desa/pasar.

Program Desa, terutama membantu pemerintah dalam pembangunan desa, seperti gotong royong kebersihan desa, membuka hutan, bersawah dan berladang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain itu secara bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan kampung/desa.

Di samping menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang digariskan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu melalui datuk wilayah pasar, pemerintahan desa berkewajiban memajukan taraf dan pendidikan dalam desa ini sesuai dengan potensi desa yang ada. Kepala desa berhak dan berkewajiban memajukan, mencerdaskan serta mensejahterakan penduduk desanya.

Begitu juga unsur-unsur pimpinan pemerintahan desa lainnya, seperti tua-tua desa, lembaga masyarakat desa, imam khatib dan lain-lain semua ikut membantu kepala desa dalam memajukan kesejahteraan rakyat di desa tersebut.

### 2.2.4 *Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa*

Jabatan Pemangku, selaku kepala desa Panorama hanya ditunjuk oleh walikota/KDH Tk. II Kotamadya Bengkulu melalui Datuk Wilayah II (1965 – 1978). Seharusnya kepala

desa tersebut dipilih oleh rakyat di pedesaan itu, tetapi karena pandangan walikota keadaan seperti itu belum memungkinkan maka terjadilah penunjukkan kepala desa demikian.

Baru pada awal tahun 1978 Pemangku kepala desa Panorama dipilih oleh rakyat. Persyaratannya waktu itu, cukup ringan, yakni orang dewasa, tamatan/lulusan SD, cakap, jujur dan berkemauan untuk memajukan pasar semua yang berkeinginan dibenarkan mencalonkan, tetapi sebelumnya calon-calon tersebut diteliti lebih dahulu oleh satu tim yang dibentuk oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu. Calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang berhak menjabat sebagai pemangku /kepala desa dan dilantik sendiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bengkulu.

### *2.2.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah*

Pemimpin masyarakat non pemerintah terdiri atas para penghulu syarak, tua-tua adat, dan pemimpin masyarakat yang profesional dan fungsional sifatnya.

Mereka amat penting fungsinya dan berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu pemimpin masyarakat non pemerintah selalu merupakan *partner* terbaik bagi pemangku dan pemangku muda dalam mengatur pemerintahan di desanya.

### *2.2.6 Organisasi Politik dan non-Politik*

Organisasi politik dan non politik tidak begitu menonjol, atau tidak banyak pengaruhnya. Lagi pula jumlah organisasi non politik (organisasi kesenian) yang ada sedikit sekali. Masyarakat pada umumnya patuh mengikuti petunjuk/saran-saran dari pemerintah dalam hal ini pemangku.

### *2.2.7 Perekonomian Masyarakat Pedesaan*

Keadaan potensi perekonomian tidak begitu menguntungkan bagi penduduk. Beberapa faktor dan peristiwa yang menyebabkan kemunduran di bidang perekonomian, ialah desa

Panorama tidak begitu luas. Lahan persawahan atau perladangan sangat terbatas, lagi pula taraf pengairannya tidak memadai sama sekali. Para petani memanfaatkan tanah-tanah yang ada di sekitarnya, secermat mungkin, namun hasil yang maksimal hanya terbatas pada sayur-sayuran seperti kangkung, genjer, kelapa, daun rumbia (bahan atap), kayu, bahan tikar, dan sedikit buah-buahan. Sebagian penduduk terpaksa mencari pekerjaan lain untuk penambah hasil yang didapatnya dari alam sekitar. Ada yang menjadi kusir, buruh di kota, bahkan banyak pula yang mengadukan nasibnya ke kota lain, misalnya ke Palembang sebagai buruh penakik parah dan lain-lain.

Keadaan sulit ini amat terasa setelah tahun 1949, saat-saat usainya agresi Belanda di daerah Bengkulu. Kehidupan rakyat waktu itu amat sederhana, hal ini tergambar dari suasana perumahan, perabot dan harta milik penduduk desa yang bersangkutan.

Mereka belum mengenal listrik, jalan aspal, pengairan yang teratur, bangunan sekolah, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan. Taraf pendidikan penduduk sangat rendah. Mereka seakan-akan mencari sinar yang akan memberi cahaya gemilang. Bagi yang memiliki tanah luas, hampir-hampir tidak berarti, karena tak mampu mengerjakannya. Tanaman produktif pun tidak mendapat hasil yang lumayan karena tidak adanya daya beli masyarakat. Hanya bagi kelompok kecil rakyat yang memiliki dan dapat memanfaatkan ternaknya saja, taraf hidupnya agak mantap. Perkembangan peningkatan perekonomian penduduk lambat sekali, barulah sejak pemerintahan Orde Baru sarana perekonomian desa ini, seakan-akan ditiup menjadi mekar dan berkembang pesat.

### 2.2.8 *Sosial Budaya*

Sama halnya dengan penduduk desa lain, penduduk Desa Panorama yang berintikan Suku Lembak Bulang ini, hidup dalam suatu kelompok dengan seorang pimpinan. Mereka hidup sesuai adat istiadat dan tradisi yang berdasarkan agama Islam. Walaupun penghidupan mereka berbeda seperti bertani, ber-

dagang, buruh dan lain-lain, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka rukun, suka bergotong-royong, menghayati dan mengamalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang berlaku, dengan suatu irama hidup yang sama. Suasananya aman tenteram tetapi sederhana. Perubahan-perubahan yang diakibatkan pengaruh-pengaruh dari luar, umumnya tidak terjadi. Hal ini bukan saja karena struktur dan kondisi masyarakatnya tetapi lebih banyak ditentukan oleh tidak adanya komunikasi dengan daerah lain. Sistem kekerabatan terpelihara dengan baik dalam suasana yang berimbang. Seseorang warga masyarakat yang telah menjalankan akad nikahnya bebas memilih tempat tinggal, apakah di rumah orang tua suami atau di rumah orang tua isteri ataupun di rumah lain. Namun menurut kebiasaan mereka lebih senang tinggal sementara bersama ayah dan ibu si isteri. Dalam masyarakat di samping kepala desa dan pimpinan agama (imam, khatib), peranan orang-orang tua amat menentukan.

Sikap masyarakat terbuka, dalam arti tidak menutup pintu terhadap tamu dan unsur-unsur yang datang dari luar. Namun mereka juga selektif, dalam arti tidak semua unsur dari luar cepat dan mudah diterima. Sifat seperti ini, sangat menonjol setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI. Dalam peristiwa yang terkutuk itu, banyak pemuda/pemudi yang menjadi korban. Peristiwa itu mereka hadapi dengan penuh ketabahan. Segala permasalahan dipecahkan dengan musyawarah dan mufakat. Tentu saja terhadap tindakan yang menekan perasaan dan di luar perikemanusiaan, akan menimbulkan gejolak masyarakat dan menimbulkan ekses yang bersifat menentang atau pembalasan.

Di samping kebudayaan leluhur yang masih percaya akan tenaga-tenaga gaib, kekuatan-kekuatan magis, kuburan-kuburan tua yang dikeramatkan, pengobatan tradisional, pendukunan dan lain-lain; pengaruh kebudayaan Islam juga cukup dominan. Masyarakat merayakan upacara-upacara sesuai lingkaran kehidupan mereka (*life cycle*) seperti merayakan kelahiran seorang anak (tertua), upacara mencukur anak, menyunat, rasulan, upacara perkawinan dan kematian. Pada setiap perayaan

yang bersifat gembira, selalu dimeriahkan dengan kesenian ber-zhikir yang didukung oleh sejumlah orang-orang dewasa/tua, dengan alat berupa rebana dan beduk.

Sambil duduk atau pun berdiri mereka bersama-sama melagukan syair yang ditulis dan diucapkan dalam bahasa Arab. Kesenian ini masih dihormati dan dipakai oleh penduduk hingga saat ini. Selain itu pada hari-hari tertentu misalnya setiap hari tiga likur (21 hari puasa) atau satu Muharam secara bersama-sama masing-masing rumah memasak kue, penganan seperti lemang, tapai ketan dan gelamai (seperti dodol), untuk menyelenggarakan kenduri ala kadarnya. Kehidupan semacam ini mereka tetap pelihara dengan baik, sekalipun secara ekonomi kehidupannya amat sederhana.

Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah :

- (a) Bahasa daerah Lembak Bulang, sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di desa tersebut.
- (b) Bahasa daerah Bengkulu, sebagai bahasa pergaulan dengan anggota masyarakat lain dalam Kotamadya Bengkulu.
- (c) Bahasa Indonesia, sebagai bahasa Nasional dan bahasa persatuan, dipakai pada tempat-tempat yang bersifat resmi dan formal seperti pada rapat-rapat, pemberian pelajaran di sekolah-sekolah atau pun terhadap orang-orang yang tidak mengerti bahasa daerah.

Lain-lain, seperti olahraga, kesehatan, usaha lingkungan hidup masih bersifat alamiah dan tradisional. Pembinaan dan pengarahan untuk meningkatkan usaha-usaha seperti ini, masih sangat kurang.

## **2.3 Desa Belakang Pondok**

### **2.3.1 Lingkungan Alam dan Penduduk**

Desa Belakang Pondok merupakan salah satu desa dalam Wilayah Tingkat II Kotamadya Bengkulu, yang terletak di dalam wilayah Kotamadya Bengkulu. Desa Belakang Pondok

ini terletak di atas tanah dataran rendah yang luasnya kurang lebih 6 ha, yang terdiri atas : tanah pekarangan 50%, tanah pertanian/sawah 30%, tanah pekuburan/air 20%.

Desa Belakang Pondok mempunyai batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan Desa Tanjung Agung, sebelah selatan berbatas dengan Desa Padang Jati, sebelah timur berbatas dengan Jalan Sentiong Besar dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Sudirman.

Desa ini berhawa tropis dengan curah hujan sedang, terletak di dataran rendah yang membentang dari timur ke barat, berbentuk empat persegi.

Sebelum dibangun pasar, terminal bis, perumahan, perkantoran, dan lain-lain, sebagian besar desa ini merupakan tanah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kayu besar semak belukar. Di dalam hutan itu hidup berjenis-jenis binatang mulai dari burung, monyet, binatang biawak, babi, ular, harimau dan beruang. Setelah tanah lokasi desa ini menjadi program daerah sasaran perluasan kota, maka hutan semak belukar dimusnahkan, dan di tempat itu dibangun, bangunan baik milik pemerintah maupun bangunan rakyat biasa.

Jumlah penduduk Desa Belakang Pondok : tahun 1949 lebih kurang 1000 orang atau 200 kepala keluarga/rumah tempat tinggal. <sup>3)</sup>

Desa Belakang Pondok mempunyai tanah yang kurang begitu menguntungkan untuk usaha pertanian. Mata pencaharian penduduk berasal dari perkebunan dan peternakan (secara sambilan), pertukangan, buruh harian dan pegawai negeri. Rata-rata penduduk berpenghasilan rendah.

Pada tahun 1940 Desa Belakang Pondok ini disebut Desa Pondok Juadah, karena pada masa dahulu di daerah ini banyak orang yang berjualan kue-kue seperti, lemang, nasi santan, goreng babat, serabi, pisang goreng, lepat binti, dan nagasari.

Pada tahun 1949 desa ini pernah berganti nama menjadi : Desa Penyinggahan Leret Gunung. Namun nama ini tidak begitu

populer karena itu pada tahun 1970 kembali lagi memakai nama Desa Belakang Pondok. Dinamakan Belakang Pondok karena sejak zaman penjajahan Belanda daerah ini sangat sepi, di situ hanya terdapat beberapa buah rumah pondok saja, karena itulah dinamakan Belakang Pondok.

Daerah ini merupakan suatu daerah perkuburan orang Cina yang biasa disebut Sentiong dan di sini juga terdapat kuburan orang-orang Islam, yakni di daerah Talang Gedang dan Talang Kecil. Suku-suku yang menetap di Belakang Pondok ini terdiri dari beberapa suku seperti orang Bengkulu, orang Serawai, orang Rejang dan orang Padang.

### *2.3.2 Pendidikan*

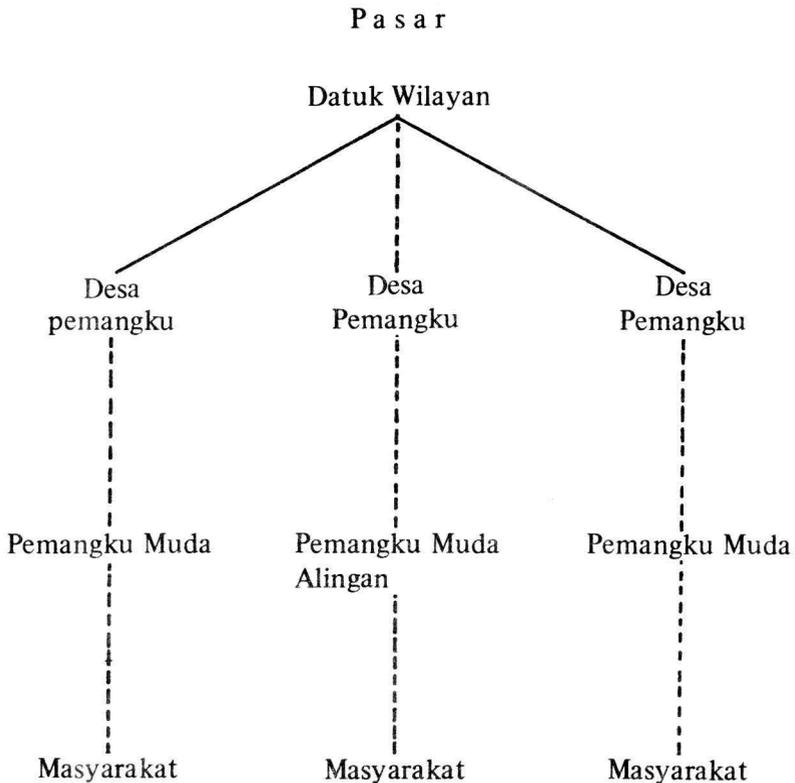
Di desa ini tidak satu pun ada gedung atau lembaga pendidikan. Anak-anak yang akan bersekolah, harus pergi ke desa lain yang jauhnya kurang lebih dua km. Rata-rata penduduk berpendidikan sekolah rakyat (sekolah dasar sekarang) bahkan tidak banyak yang berhasil menamatkan sekolah tersebut. Sekolah menengah tingkat pertama yang ada seperti Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Tehnik, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama dan Sekolah Kepandaian Putri Pertama jumlahnya tak memadai. Lebih-lebih Sekolah Menengah Pertama bukan saja menampung siswa yang berasal dari Kotamadya Bengkulu, tetapi menerima pula dari kecamatan atau kabupaten lain, sehingga sebuah SMP Negeri dan dua buah SMP swasta itu menjadi padat sekali.

Pendidikan agama Islam diwariskan secara turun temurun. Pendidikan agama berupa pengajian-pengajian berlangsung di mesjid, musallah dan di rumah-rumah. Di Desa Belakang Pondok hanya terdapat sebuah mesjid dan sebuah musallah, itupun hasil swadaya masyarakat setempat. Karena itu anak-anak yang akan bersekolah agama, harus pergi ke desa lain yang jaraknya tiga km. Pembiayaan pendidikan diatasi secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua murid. Perkembangan pendidikan dirasakan sangat lambat sekali.

### 2.3.3 Struktur Pemerintahan

Batas pengertian desa/kampung adalah suatu areal/tanah/wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu dan dihuni oleh sekelompok penduduk yang tidak kurang dari 40 kepala keluarga serta dipimpin oleh seorang kepala kampung atau yang biasa disebut pemangku, hasil pilihan masyarakat setempat. Kedudukan sebagai kepala desa disahkan oleh walikota setempat. Setelah seseorang terpilih sebagai pemangku, ia menunjuk pemangku muda sebagai pembantunya dan memilih imam, khatib sebagai pembina masyarakat di desanya.

Di bawah ini sekilas gambaran struktur pemerintahan desa/kampung pada tahun 1950 sampai 1965.



Jadi dapat disimpulkan, bahwa Kotamadya Bengkulu yang luasnya 18 km<sup>2</sup> itu terbagi atas empat wilayah pasar yang masing-masing dipimpin oleh seorang datuk wilayah. Setiap wilayah pasar, terdiri atas beberapa daerah kepemangkuan atau desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang pemangku dan dibantu oleh seorang atau lebih pemangku muda. Bagi desa yang penduduknya sedikit, atau letak desanya berdekatan biasanya menggabungkan diri dengan desa yang pengaruhnya lebih besar atau desa yang usianya lebih tua.

Dasar hukum pembentukan Desa Belakang Pondok, hanya dasar musyawarah dan persetujuan atasan belaka. Sekelompok penduduk yang terdiri atas puluhan kepala keluarga atau bubungan rumah, yang telah berhasil membina dan mengembangkan desanya, memilih salah seorang kepala desa dan selanjutnya melaporkan kepada datuk wilayah terdekat. Setelah melalui masa peninjauan dan penelitian datuk wilayah memasukkan calon desa itu menjadi desa wilayahnya. Selanjutnya menunjuk dan memilih seorang pemangku sebagai kepala desa. Program yang ditekankan pada pemerintah desa yang baru adalah membangun masyarakat untuk maju baik cara berpikir maupun cara hidup mereka.

Tugas dan wewenang pemerintah desa ialah, mengendalikan pemerintahan di dalam desanya sesuai dengan apa yang telah digariskan walikota melalui datuk wilayah pasar yang bersangkutan.

Seorang pemangku dalam menjalankan tugas mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- (a) tanggungjawab kepada pemerintah melalui atasan yaitu datuk wilayah dan walikotamadya Bengkulu.
- (b) tanggungjawab kepada masyarakat.

Sangsi yang diterima dari masyarakat sebagai akibat kesalahan dalam menjalankan tugas, biasanya secara kejiwaan dirasakan jauh lebih berat. Karena itu, seorang pemangku/

kepala desa, sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hak dan wewenang seorang pemangku, yaitu membantu para datuk wilayah dalam melaksanakan tugas sehari-hari seperti menyelesaikan persengketaan kecil antara masyarakat setempat, memimpin dan mengatur penyelesaian persoalan mengenai adat istiadat. Bagi pemangku diberikan hak untuk mengetahui tentang jual beli barang yang bergerak maupun tidak bergerak, di wilayah desanya untuk ditandatangani oleh datuk wilayah dan selanjutnya diteruskan kepada walikota.

Setiap pimpinan pemerintahan desa harus juga memikirkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat hidup dengan penuh tenteram damai, adil dan makmur sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu juga bagi seorang pemangku harus dapat mengatur administrasi wilayahnya. Oleh karena itu pemerintah desa bertanggungjawab pada masyarakat dan pada atasan lainnya.

Pencalonan atau pemilihan seorang kepala pemerintahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipandang oleh masyarakatnya antara lain sebagai berikut :

- (a) berwibawa dan berani menghadapi segala kemungkinan yang timbul baik negatif maupun positif,
- (b) bisa membaca dan menulis huruf latin,
- (c) cukup sehat jasmani dan rohani,
- (d) untuk segi umur tidak terbatas asal sudah dewasa dan memenuhi persyaratan yang dimaksud, dan
- (e) memahami adat istiadat setempat.

Kewajiban pemimpin pemerintahan desa dibagi menurut ketentuan-ketentuan antara lain :

- (a) datuk wilayah merangkap kepala adat dan pimpinan bidang pemerintahan atas wilayah pasarnya,
- (b) pemangku merangkap kepala adat dan pimpinan bidang pemerintahan atas wilayah desanya,
- (c) imam/khatib sebagai pegawai sarak menangani bidang agama/P3NTR, dan

(d) pemangku muda adalah pembantu pemangku dan pegawai sarak dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

#### 2.3.4 *Kedudukan dan Pimpinan Masyarakat non-Pemerintah*

Yang dimaksud dengan pimpinan masyarakat non-pemerintah adalah pemuka masyarakat, kaum cerdik pandai yang tugasnya sekedar membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan permusyawaratan dan kerjasama (gotong royong) yang sewaktu-waktu diperlukan.

#### 2.3.5 *Organisasi Politik dan non-Politik*

Di desa itu tidak ada organisasi politik, yang ada hanya anggota organisasi politik yang meliputi : Katolik (0,1%), PSII, NU (9%), PNI (80%), MURBA, IPKI (5%), dan PARKINDO.<sup>4</sup>

Organisasi non-politik yang bersifat swasta, mengurus bidang agama, seperti pengajian dan pendidikan agama serta bidang pemuda seperti organisasi kesenian dan olah raga.

Tujuan dan peranan organisasi tersebut adalah menunjang pelaksanaan Program Pemerintah dan membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat serta menanamkan rasa persahabatan dan persaudaraan, rasa kesatuan/gotong-royong dalam segala bidang.

Potensi perekonomian Desa Belakang Pondok pada tahun 1950 sampai tahun 1965 boleh dikatakan tidak begitu mengembirakan, sebab letak daerah ini kurang sesuai untuk daerah pertanian. Bagi masyarakat Belakang Pondok yang ingin bercocok tanam terpaksa harus keluar daerahnya, seperti bersawah atau berkebun di daerah Kandang Limun, Sungai Hitam, yang letaknya cukup jauh dari tempat kediamannya. Karena itu pulalah masyarakat Belakang Pondok ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh harian. Persentasi mata pencaharian penduduk Desa Belakang Pondok adalah berdagang (1%), bertani (9%), pegawai negeri/ABRI (2%), pertukangan/kerajinan tangan (8%), dan buruh harian (80%).<sup>5</sup>

Sebagai mata pencaharian lain penduduk asli sebahagian kecil berusaha sendiri seperti membuat sapu lidi, membikin sendok tempurung, yang agak menonjol, yaitu membuat tikar/kambut dari mensiang sawah, dengan peralatan yang sederhana.

Sungguhpun Desa Belakang Pondok ini masih merupakan daerah hutan belukar namun penduduknya hidup bergotong royong sebab setiap kali melaksanakan suatu pembangunan atau suatu pekerjaan di desa itu mereka selalu melaksanakannya dengan beramai-ramai. Misalnya, pada upacara adat perkawinan, kematian, menjaga keamanan, kebersihan desa dan lain-lain.

### *2.3.6 Keadaan Pasar dan yang Dipasarkan*

Di pinggiran batas desa Belakang Pondok, mengarah ke kota, terdapat Pasar Minggu. Bangunan pasar yang terdiri dari tiga buah, dengan luas masing-masing 50 x 15 m ini, pada hakikatnya adalah bangunan pasar yang pernah dibuat oleh pemerintah Belanda zaman dahulu. Pasar Minggu ini merupakan pusat perbelanjaan penduduk Kotamadya yang kedua setelah pasar ikan yang letaknya 3 km sebelah barat. Di pasar ini pula penduduk Desa Belakang Pondok berjual beli. Sekalipun fungsi pasar ini bersifat "pekan", namun kegiatannya tidak saja terbatas pada setiap hari Minggu. Pada hari-hari lain pasar ini tetap berfungsi walaupun suasananya tidak seramai pada hari Minggu.

Keadaan jalan dan jalur komunikasi serta alat transpor di Desa Belakang Pondok kurang memuaskan. Jalan aspal hanya 0,5 km dan jalan tanah/jalan setapak 2 km. Sesuai pula dengan zamannya, jenis alat transportasi yang ada pada waktu itu ialah sepeda dan gerobak. Sedangkan mobil hanya beberapa buah saja. Walaupun situasi transportasi masih sangat kurang namun keadaan kehidupan penduduk di desa ini tidak menjadi hambatan. Sumber penghasilan desa terdiri dari hasil swadaya masyarakatnya, yang mengolah potensi dari desanya sendiri dan bantuan dari pemerintah.

Struktur masyarakat tidak begitu menonjol. Perbedaan keadaan dalam susunan masyarakat hanya didasarkan atas profesi dan mata penghidupan. Kehidupan penduduk bergotong-royong, bersifat kekeluargaan dan sederhana sekali. Mereka terhitung orang-orang yang taat beragama, suka bertenggang rasa dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi yang sudah biasa dilakukan menurut adat tradisi hidup.

Sikap hidup penduduk konservatif, tidak begitu cepat menanggapi hal-hal yang baru. Perubahan yang terjadi hampir-hampir tidak ada. Kesenian dan kebudayaan masih meneruskan warisan budaya leluhur, seperti berzhikir, berdendang, pencak silat dan lain sebagainya.

Sesuai dengan lingkungan pendidikan dan kehidupannya, cara berpikir dan bekerja penduduk masih bersahaja sekali. Di bidang kesehatan sebagian besar penduduk belum menggunakan kakus (WC) dan masih juga menggunakan dukun kampung dalam pengobatan cara tradisional.

## **2.4 Desa Padang Sialang**

### *2.4.1 Lingkungan Alam dan Penduduk*

Desa Padang Sialang ini termasuk Marga Pasar Manna, Kecamatan Manna, wilayah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan. Letaknya dipantai selatan atau pantai Samudra Indonnesia, di sebelah selatan kota Bengkulu.

Marga Pasar Manna terdiri dari beberapa desa atau disebut juga Kepemangkuan. Desa-desa atau Kepemangkuan di Marga Pasar Manna ini, ialah : desa Pasar Bawah, desa Belakang Gedung, desa Ketapang, desa Pematang Bangau, dan desa Padang Sialang.

Sekarang yang akan kita bicarakan khusus desa Padang Sialang, desa yang dapat dikatakan desa terbesar dari desa-desa yang ada di Marga Pasar Manna ini. Karena desa Padang Sialang ini sendiri terdiri dari beberapa kampung atau lorong atau disebut juga dengan nama jalan.

Sedangkan letak dari lorong-lorong itu tidak berjauhan. Kampung atau jalan atau lorong yang termasuk wilayah desa Padang Sialang ini, yaitu : Jalan Kemas Djmalluddin, Jalan Mulkar Naum, Jalan Pamah Suki atau Jalan Serma Djakfar, Jalan Inspektur Awaluddin, dan Jalan Setia Budi.

Desa Padang Sialang ini letaknya di tengah-tengah kota Manna yang lebih kurang luasnya 2 kilometer persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan desa Pematang Bangau, Sebelah selatan dengan Desa Duayu Marga Tujuh Pucukan, sebelah barat dengan desa Ketapang dan Tanah Lapang, sebelah timur dengan desa Duayu Marga Tujuh Pucukan.

Ditinjau dari keadaan alamnya desa Padang Sialang ini termasuk daerah pantai yang merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan daerah rawa. Tetapi rawa yang sudah dimanfaatkan, yaitu oleh penduduk dijadikan sawah.

Daerah rawa dijadikan sawah dan yang tak mungkin menjadi sawah selain perumahan penduduk dijadikan tegalan. Tegalan yang ditanami dengan tanaman budidaya daerah pantai, yaitu kelapa dan tanaman lain seperti buah-buahan. Sedangkan hutan atau tumbuh-tumbuhan liar sudah tidak ada lagi. Demikian juga jenis binatang liar sudah tak terdapat lagi di desa ini. Kecuali binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan sebangsa unggas.

Penduduk desa Padang Sialang ini hampir 100% penduduk asli Marga Pasar Manna ini, yaitu suku Serawai. Dengan jumlah kepala keluarga lebih kurang 125 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 325 laki-laki dan 300 wanita. Desa Padang Sialang ini termasuk desa yang terpadat penduduknya di Marga Pasar Manna ini. Karena sesuai dengan letaknya di tengah-tengah Kota Manna ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan mata pencaharian penduduk ini sebagian besar bertani, selebihnya berdagang, buruh kasar dan pegawai negeri.

Menurut tradisi lisan bahwa desa Padang Sialang ini didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan lahirnya

kota Manna sekarang ini yang asalnya adalah Marga Pasar Manna. Maka dibagilah marga itu atas beberapa kepemangkuan atau desa. Seperti tadi telah dibicarakan bahwa Marga Pasar Manna terdiri dari beberapa desa atau kepemangkuan antara lain desa Padang Sialang.

#### 2.4.2 Pendidikan.

Desa Padang Sialang dalam Marga Pasar Manna ini yang letaknya di tengah-tengah Kota Manna, pada zaman Hindia Belanda ada sebuah sekolah desa Padang Sialang. Letaknya di Jalan Kemas Djamaluddin. Sekarang lokasi itu menjadi tempat SMEA Negeri Manna. Sudah barang tentu penduduk desa ini sudah menerima pendidikan jauh sebelum kita merdeka. Dengan kata lain penduduk sudah tak buta huruf lagi. Sedangkan sarana pendidikan yang ada pada saat ini antara lain :

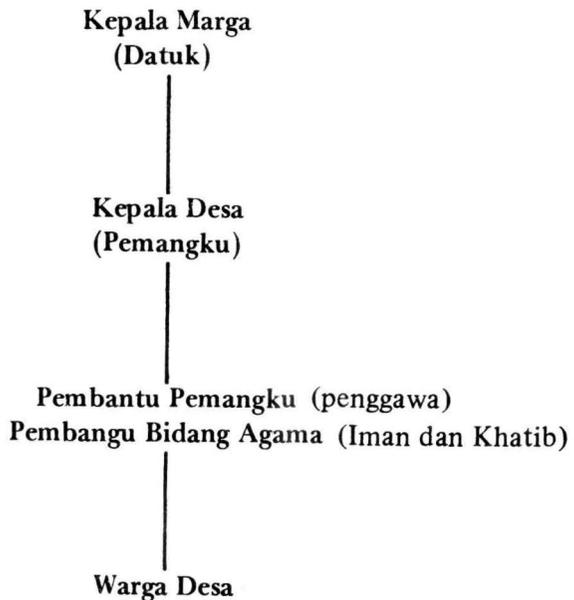
- (a) Dua buah SD Negeri, yaitu SD Negeri Nomor 2 dan 7 terletak di jalan Pamah Suki atau Jalan Serma Djakfar Manna. Sarana yang ada masing-masing satu gedung terdiri tiga lokal, sedangkan kelasnya terdiri enam kelas, sehingga anak-anak terpaksa masuk pagi dan sore. Dengan tenaga guru masing-masing enam orang.
- (b) Sebuah SMP Negeri terletak di Jalan Pamah Suki, dengan fasilitas yang ada dua gedung terdiri tiga lokal. Sebagian hasil sumbangan dari orang tua murid.
- (c) SMEP Negeri yang letaknya di Jalan Kemas Djamaluddin, yang mana gedung sekolah ini sebelumnya adalah gedung SGB IV Manna. Karena pada awal tahun enam puluhan SGB dihapuskan maka gedungnya dimanfaatkan untuk sekolah kejuruan yang lain, yaitu SMEP. Akhirnya SMEP juga dilebur menjadi SLP dan gedung ini diberikan pada SMEA Negeri Manna.
- (d) SMA Negeri yang terletak di ujung jalan Kemas Djamaluddin dan Jalan Inspektur Awaluddin. Mula-mula sekolah ini dibangun atas usaha Yayasan Pendiri Sekolah Lanjutan

Bengkulu Selatan, akhirnya dapat di negerikan. Dengan dua gedung terdiri dari lima lokal.

Biaya pendidikan dari sekolah-sekolah yang tersebut di atas diperoleh dari pemerintah dan sebagian dari bantuan orang tua murid melalui organisasinya yaitu POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru). Sedangkan administrasi pendidikan dari sekolah-sekolah itu dikelola oleh Kepala Sekolah masing-masing dengan dibantu oleh guru dan staf tata usahanya.

### 2.4.3 Struktur Pemerintahan

Desa merupakan suatu unit pemerintahan yang terkecil. Dengan dasar pembentukannya dilihat dari segi luasnya wilayah itu, dan jumlah penduduknya juga menentukan dalam berdirinya suatu desa. Adapun struktur pemerintahan desa di desa ini dapat dilihat pada bagan berikut.



Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa ialah menyelenggarakan mengatur mengawasi pemerintahan di desanya sendiri. Bertanggungjawab di bidang pembangunan dan kemasayarakatan desanya. Membina ketertiban dan ketenteraman umum sesuai undang-undang yang berlaku. Memupuk jiwa gorong royong sebagai sendi dan warisan masyarakat desa.

Selain itu berkewajiban juga memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Kepala Marga atau pemerintah yang lebih tinggi. Sedangkan administrasi penyelenggaraan desa dilakukan oleh kepala Desa sendiri dan bila perlu dapat diminta bantuan Penggawa.

#### *2.4.4 Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peranannya*

Warga desa mengajukan beberapa calon atau satu calon dengan syarat-syarat: (a) berkelakuan baik dan sehat jasmani rohani, (b) umur tak lebih dari 50 tahun, dan (c) pendidikan minimal SD. Pemilihan dilakukan oleh warga desa secara langsung. Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan dapat menjabat Kepala Desa. Pelantikan dilakukan oleh Bupati atau Camat atas nama Bupati.

#### *1.4.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah*

Pemimpin masyarakat non pemerintah, adalah pemimpin pemimpin dari unsur-unsur kelompok masyarakat yang berpengaruh di desa yang tidak langsung berada dalam garis kelompok dan kegiatan pemerintah. Pemimpin masyarakat non pemerintah dari kelompok masyarakat yang berpengaruh tersebut adalah: (a) pemimpin atau tua-tua adat, (b) pemimpin dari kelompok agama, dan (c) pemimpin dari kelompok profesi seperti pimpinan kelompok petani.

Karena ruang lingkup kehidupan desa tidak dapat dipisahkan dari suasana kehidupan adat tradisi yang masih berlaku, agama yang diyakininya, serta mata penghidupan, kesenian dan profesi lainnya, yang dihayati, tentu saja kehidupan akan

kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah ini sangat berpengaruh bahkan menunjang keberhasilan program pemerintah, sekalipun tidak dominan sifatnya. Jadi kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah sangat penting, dan sepanjang sejarah selalu berpartisipasi menunjang program pembangunan pemerintah desa itu sendiri.

#### *2.4.6 Organisasi Politik dan non-Politik*

Keadaan organisasi politik dan non politik yang berada di desa Padang Sialang ini hidup dengan baik. Antara lain organisasi politik yang ada di sini, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam PERTI, Nahdatul Ulama (NU), dan Masyumi

Adapun organisasi non-politik ialah Muhammadiyah, dan Aisyah. Keduanya bergerak di bidang sosial sedangkan untuk organisasi politik tujuannya secara umum di tengah-tengah masyarakat ialah: (a) meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, (b) menyadarkan/membina para anggota bagaimana hidup bernegara, (c) membina/mendidik para anggota hidup berdemokrasi, (d) meningkatkan pengabdian para anggota terhadap bangsa, negara dan agamanya, dan (e) berbagai alat sosial kontrol pemerintah.

#### *2.4.7 Perekonomian*

Karena sebagian besar penduduk hidup dari pertanian maka hasil yang umum dipasarkan ialah beras, kelapa dan hasil tegalan lainnya. Sedangkan lapangan kerja lain seperti perdagangan, pertukangan, peternakan dilakukan oleh penduduk secara sambilan. Peternakan selain usaha sampingan dimanfaatkan juga untuk pertanian, seperti sapi dan kerbau. Sapi sebagai alat pengangkutan, kerbau untuk mengolah sawah. Kerajinan rumah tangga seperti anyam menganyam, menjahit dan sebagainya juga ada.

Alat transportasi yang khusus yang dimiliki oleh sebagian penduduk seperti gerobak, pelangkin dan sepeda (alat pengang-

kut). Ini dapat dimasukkan alat transportasi tradisional desa Padang Sialang.

Industri rumah tangga secara kecil-kecilan untuk mengolah hasil pertanian, misalnya membuat minyak kelapa. Sebagian dari hasilnya juga untuk dijual di pasar. Semua pekerjaan dilakukan secara tradisional, karena penduduk belum memiliki ketrampilan lain, dan alat-alat yang lebih baik belum ada sedangkan dana untuk meningkatkan usahanya tidak ada. Dengan kata lain tak ada dana dari luar.

Sikap mental penduduk diwarnai oleh sifat kegotongroyongan yang tinggi dan mental beragama (agama islam). Realisasinya dapat dilihat dalam upacara perkawinan/kematian yang selalu dikerjakan secara gotong royong. Saling membantu dalam kesusahan dapat dilihat, misalnya bila salah seorang warga desa mendapat musibah selalu mendapat bantuan dari seluruh warga desa. Bahkan juga hal seperti ini terjadi pada warga desa lain dan marga lain atau terikat dalam satu desa Padang Sialang saja.

Pengaruh dari luar belum begitu terasa, karena pada waktu sebelum Pelita hubungan untuk menuju daerah Manna cukup sulit, lagi pula desa Padang Sialang berlokasi terpencil. Jadi pendatang dari luar sangat langka di daerah ini.

Keadaan perumahan penduduk Padang Sialang sudah banyak mengalami perubahan, rumahnya ada yang bertiang kayu dan rumah tembok. Atapnya ada yang dari daun, genting dan seng. Sedangkan rumah yang beratap daun sudah banyak ditukar dengan genting. Perbedaan rumah penduduk tidak menyolok. Dengan kata lain tingkat penghidupan penduduk hampir merata. Demikian juga alat-alat rumah tangga yang dimilikinya. Hampir 75% mereka memiliki sepeda, karena ini alat yang murah dan penting fungsinya. Beberapa di antaranya ada juga yang sudah memiliki kendaraan bermotor. Radio adalah sarana yang penting, sebagai alat komunikasi dan hiburan. Selain perabot rumah tangga yang lazim, kekayaan penduduk banyak yang berupa ternak, sawah dan benda mati lainnya. Penduduk di

sini biasa memiliki sapi dan kerbau sampai puluhan ekor jumlahnya.

Jalur jalan yang terdapat di desa Padang Sialang ini meliputi dua jenis. Ada jalan Kabupaten seperti jalan Mulkan Naum dan Jalan Kemas Djamaluddin yang panjangnya kurang lebih masing-masing 1 km. Sedangkan sisanya jalan Marga, seperti Jalan Pamah Suki, Jalan Setia Budi dan Jalan Inspektur Awaluddin. Alat transportasi yang melalui jalur jalan di desa ini ialah mobil, gerobak, sepeda dan kendaraan lain.

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk bertambah dan memenuhi lorong-lorong yang masih jarang penduduknya, seperti Jalan Pamah Suki, Jalan Setia Budi dan Jalan Inspektur Awaluddin. Sedangkan di Jalan Mulkan Naum di mana terletak pasar desa ini dan juga pasar umum, penduduk sudah padat. Di pasar ini atau pasar Ampera dipasarkan hasil-hasil pertanian seperti beras, kelapa dan hasil tegalan, selain kebutuhan pokok lainnya. Pasar yang terletak di Desa Padang Sialang ini bukan pasar desa tetapi pasar Marga Manna.

Sumber penghasilan kepala desa antara lain berupa: uang adat, pajak Marga, pajak jual beli, sebagian sewa pasar, dan hasil lain yang sah.

#### **2.4.8 Sosial Budaya**

Masyarakat desa Padang Sialang umumnya bersifat agraris, taat beragama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai warisan dari leluhurnya. Kebiasaan hidup bergotong royong dari lingkungan dari leluhurnya. Kebiasaan hidup gotong royong dari lingkungan yang kecil meluas menjadi kebiasaan hidup penduduk desa. Bahkan menjadi lebih luas lagi ke margamarga dan meliputi handai tolan dan kenalan. Kenyataan ini dapat dilihat dalam upacara perkawinan/kematian dan dalam membangun rumah-rumah peribadatan, seperti masjid dan langgar. Kebiasaan yang baik ini belum ada tanda-tanda pengaruh yang negatif dari luar. Bahkan orang-orang yang masuk ke

desa Padang Sialang ini banyak yang mengikuti cara yang dilakukan oleh warga desa ini.

Kepala desa dalam desa Padang Sialang ini berfungsi ganda. Sebagai kepala pemerintahan formal dan sebagai pemegang adat atau penghulu adat. Adat istiadat yang ada diatur oleh penghulu adat, dan dibantu oleh tua-tua adat. Di segi pemerintahan mewakili pemerintah yang lebih tinggi dan di segi adat sebagai ketua adat.

Di desa Padang Sialang ini mempunyai juga kesenian adat, yaitu warisan dari pendahulunya. Adatnya disebut adat Melayu atau adat pasar, ini berlaku untuk Marga Pasar Manna. Kesenian adatnya antara lain seni dendang, berjanji/zikir, dan tari rendai, tari piring, tari kain, dan lain-lain. Adapun bimbang adat dengan susunan acara: mupakat adik sanak, masang pepucuk, mecah nasi, inai curi/inai gedang, mupakat raja penghulu, mengantar/menerima pengantin, dan merebah pelaminan.

Kesemuanya di atur dan dinalankan menurut adat dari nenek moyang dulu. Diawasi dan dijaga oleh pemegang adat atau ketua adat, yaitu kepala Desa dan Kepala Marga. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan denda atau sanksi. Keputusan ditentukan oleh para pemegang adat. Selain hukum adat atau undang-undang yang sifatnya lebih umum, yaitu undang-undang Simbur Tjaja ini berlaku hampir di seluruh Propinsi Bengkulu.

Kesenian adat warisan budaya bangsa ini sekarang mulai berangsur pudar di masyarakat. Kepudarnya bukan saja karena pengaruh dari luar, tetapi kemundurannya dikarenakan kaum muda tidak diarahkan untuk menguasai kesenian itu. Kesalahan ini terletak pada generasi terdahulu yang tidak mendidik para penerusnya, sehingga mereka merasa kurang mengetahui dan akhirnya tidak merasa memiliki warisan itu. Akibatnya banyak tata cara adat dan larangan-larangan adat yang pada waktu dulu dianggap tabu, sudah dianggap hal yang biasa saja. Namun ini bukan disengaja tetapi memang benar-benar tidak mengetahui.

Di sudut lain ada juga kesenian yang bersifat lebih modern, seperti musik dan sebangsanya. Di desa Padang Sialang ini ada dua kelompok musik, yaitu Orkes Kencana dan Orkes Nirmala. Perkembangannya tersendat-sendat karena kekurangan alat dan biaya.

Namun situasi yang selalu berkembang dan menghendaki perubahan, maka di sana sini pesta adat yang memakan biaya cukup besar, waktu dan tenaga yang banyak itu disadari oleh warga desa, sehingga mereka mulai mengadakan penghematan uang, tenaga dan waktu. Mereka banyak memilih jalan yang lebih praktis. Pesta adat banyak diambil pokok-pokoknya saja.

Dengan adanya pengaruh pendidikan maka para warga desapun lebih kreatif dalam mengembangkan dan memodernkan warisan yang ada. Misalnya lagu-lagu dengan bahasa daerah, membuat demokrasi yang lebih baik dalam pesta-pesta dan sebagainya.

Kehidupan berkeluarga di desa Padang Sialang ini selalu diliputi rasa gotong royong dan rasa keagamaan yang baik. Pokok-pokok hukum adat masih banyak dipelihara, walaupun kaum muda banyak yang kurang mengetahui.

Bahasa yang selalu digunakan adalah bahasa daerah Serawai, bahasa Serawai ini mirip dengan bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik. Tak seorang pun warga desa Padang Sialang ini yang tak dapat berbahasa Indonesia.

Di desa Padang Sialang ini terdapat organisasi sosial seperti Muhammadiyah dan Aisyah, suatu organisasi non politik yang bergerak di bidang sosial. Perkumpulan kesenian yang ada tadi telah disebut-sebut dua grup musik Orkes Nirmala dan Orkes Kencana. Hal lain yang ada di desa ini seperti organisasi olah raga baru pada tarap permulaan. Persatuan batminton untuk warga desa yang bekerja sebagai pegawai negeri. Sarana dan prasarana lainnya belum baik dan belum teratur.

Dibidang kesehatan di desa Padang Sialang ini belum terdapat rumah sakit. Keluarga berencana belum banyak diketahui oleh penduduk, karena pada waktu itu pemerintah belum mencanangkannya.

Di desa ini sumber air bersih diperoleh dari sumur, setiap rumah punya sumur untuk mandi, minum dan mencuci. Mereka tidak menggunakan air sungai untuk minum. Karena letak desa ini agak jauh dari sungai. Selain sumur mereka juga membuat jamban, kondisinya masih sederhana. Di setiap rumah mempunyai tempat pembuangan sampah sendiri, yaitu di pekarangan rumah masing-masing.

Organisasi pemuda belum ada, tetapi pemudanya banyak yang bersemangat tinggi dalam menuntut ilmu. Banyak di antara mereka yang bersekolah ke luar daerah, misalnya ke Jakarta, Bandung dan tempat-tempat lain.

## *2.5. Desa Padang Genting*

### *2.5.1 Lingkungan Alam dan Penduduk*

Desa Padang Genting ini terletak di dataran rendah pantai Seluma ± 6 km jauhnya dari pantai Samudra Indonesia dan terletak di antara Pasar Seluma dengan Pasar Tais. Desa ini termasuk desa dalam Kecamatan Seluma, Wilayah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penduduk Desa Padang Genting berasal dari enam buah dusun kecil, yaitu: dusun Kembang Ayun, dusun Terusan, dusun Panggung Bumi, dusun Pematang Bungin, dusun Merbau, dan dusun Tangga Batu.<sup>6</sup>

Keenam dusun ini letaknya di pinggir sungai Air Seluma di sebelah timur dari desa Padang Genting sekarang. Sebelum mereka ini datang atau pindah, daerah Padang Genting ini masih merupakan padang alang-alang yang luas dan ini terdapat tanah yang genting dan berhutan lebat, di sinilah tempat sarang perampok pada waktu itu, itulah sebabnya desa ini dinamakan Padang Genting.

Setelah Pemerintah Belanda membuat jalan raya dari Pasar Tais ke Pasar Seluma dan demi menyelamatkan diri dari serangan penyakit cacar yang menular di situ waktu itu, serta menghindari diri dari keadaan dusun yang tidak aman, maka pindahlah penduduk keenam desa ini ke sebuah desa di pinggir jalan raya, dan langsung pada waktu itu diresmikan nama desa itu sebagai desa Padang Genting.

Pemerintah Belanda menganggap desa ini paling banyak penduduknya dari desa lain, maka oleh Pemerintah Belanda didirikan sebuah Sekolah Desa berkelas tiga.

Untuk tenaga pengajar pada waktu itu Pemerintah Belanda hanya memberikan seorang guru. Guru yang bertugas mengajar di sekolah desa Padang Genting ini, berturut-turut adalah guru desa Abus, guru desa Duarip, guru desa Dalip, dan guru desa Manap.

Itulah sebabnya di Desa Padang Genting ini 90% penduduknya sudah pandai membaca dan menulis.

Desa Padang Genting pada tahun 1950, dapat dikatakan sangat rawan keadaannya, karena baru selesainya peristiwa Agresi Militer Belanda II. Keadaan ekonomi terutama dari hal makanan dan pakaian masyarakat sangat menyedihkan, banyak sekali yang memakai pakaian dari kulit kayu.

Desa Padang Genting ini pernah menjadi tempat para pengungsi yang ingin menjauhkan diri dari serangan Belanda, umpamanya pengungsi dari Pekan Sabtu, Pagar Dewa dan Tais, mereka juga ke Desa Padang Genting untuk berladang dan bersawah karena daerah ini adalah daerah yang subur.

Desa ini memanjang dari utara ke selatan, dan luasnya  $\pm 3$  km<sup>2</sup>. Sebelah utaranya berbatas dengan Desa Sukarami, sebelah timurnya berbatas dengan Sungai Air Seluma, dan sebelah baratnya berbatas dengan Sungai Air Ngalam Kecil.

Keadaan alamnya banyak dataran rendah dan berawa-rawa, iklimnya sedang dan banyak turun hujan. Di desa ini banyak terdapat persawahan rawa, tanah perladangan yang subur, dan

hasil perkebunannya terutama kopi. Jenis tumbuh-tumbuhan di daerah ini yang terbanyak adalah, jenis kayu gadis, kelapa, pohon aren, kopi, durian, dan lain-lain. Jenis binatang yang hidup, adalah harimau, babi, rusa, kijang, kancil, bangau, ayam hutan dan lain-lain.

Jumlah penduduk pada waktu itu baru sekitar 270 kepala keluarga dengan laki-laki sekitar 650 orang dan perempuan 530 orang atau berjumlah lebih kurang 1180 orang.<sup>7</sup>

Mata pencaharian penduduk desa ini yang terutama adalah bertani dan berkebun, umpamanya bersawah, berkebun kopi, menanam sayur-sayuran, dan di antaranya ada pula yang menangkap ikan.

### 2.5.2 Pendidikan

Di desa ini pada waktu itu sudah ada sebuah SR Negeri VI tahun dan sebuah sekolah Agama Swasta, dengan tenaga guru sebanyak lima orang dan tenaga guru agama swasta sebanyak satu orang. Keadaan sarananya sangat kurang sekali. Usaha Keuangan Pembiayaan Pendidikan di dapat dari Pemerintah, dan masyarakat, umpamanya masyarakat bergotong royong membawa satu buah kelapa tiap-tiap wali murid, serta dari orang tua murid (POMG). Administrasi pendidikan dipegang oleh guru dan bekerja sama dengan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).

### 2.5.3 Struktur Pemerintahan

Pengertian desa ialah, suatu bentuk pemerintahan yang terkecil dalam wilayah Indonesia dan yang paling rendah dari pemerintahan marga.<sup>8</sup>

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan bagian-bagiannya terdiri atas: depati kepala desa, penggawa wakil kepala desa, imam/khatib ialah pemimpin agama, *alingan* atau pesuruh kepala desa, dan jungku atau badan Musyawarah Kepala Desa (non-pemerintah) sebanyak enam *jungku*. Dasar hukum pembentukan pemerintahan desa ialah (a) meningkatkan perekon-

mian rakyat, (b) mengadakan pekerjaan dengan secara gorong royong umpamanya, memperbaiki/membuat jalan-jalan yang ada di desa-desa, dan (c) melaksanakan perintah dari kepala marga, mengenai penagihan uang cukai *limir (belasting)*.

Pemerintah Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- (a) menjalankan perintah dari kepala marga,
- (b) menyelesaikan persengketaan antara rakyat di dalam desa tersebut, dan
- (c) mengeluarkan surat izin/keterangan kepada rakyat yang hendak menjual hak miliknya, umpamanya: menjual ternak seperti kerbau, sapi, tanah persawahan dan tanah perkebunan.

Hak/wewenang dan kewajiban unsur pimpinan pemerintah lainnya, yaitu membantu pekerjaan/tugas Dinas Kepala Marga/Desa sehari-hari, kecuali imam/khatib yang tugasnya menyelesaikan urusan pernikahan dan kematian dalam desa tersebut. Administrasi pemerintahan desa dipegang/dikerjakan oleh kepala desa itu sendiri.

Persyaratan pencalonan kepala desa antara lain ialah :

- (a) setidak-tidaknya tamat SR 6 tahun atau sederajat,
- (b) berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian,
- (c) telah berumur minimum 25 tahun.
- (d) penduduk desa itu sendiri. Adapun pengangkatannya diputuskan oleh Bupati/kepala daerah setelah ternyata menang dalam pemilihan, dan seterusnya dilantik oleh camat atas nama bupati.

Kedudukan dan Peranan Pimpinan Masyarakat non-pemerintah seperti ketua jungku adalah sebagai anggota musyawarah, peranannya sebagai wakil rakyat dalam desa itu.

#### 2.5.4 Organisasi Politik dan non-Politik

Jumlah partai politik yang ada di Desa Padang Genting pula pada waktu itu ada tiga partai yaitu : Masyumi, PSSI, dan Perti. Organisasi non-politik ada satu, yaitu Muhammadiyah.

### 2.5.5 *Perekonomian Masyarakat Pedesaan*

Mata pencaharian penduduk dan lapangan kerja pada waktu itu adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan rumah tangga seperti menganyam tikar, bakul dan lain-lainnya. Jenis peralatan yang digunakan waktu itu, pisau, parang dan beliung. Alat-alat modern sama sekali tidak ada.

Sikap mental penduduk masih tradisional dan umumnya religius. Pengaruh dari luar, hampir-hampir tidak ada. Keadaan perlengkapan kehidupan masih sederhana sekali, masih ada yang belum mempunyai tempat duduk (kursi) dan tempat tidur (ranjang). Rumah penduduk kebanyakan rumah panggung yang terbuat dari pada kayu, keadaan penghuninya masih hidup secara kuno.

Jalan utama di desa ini  $\pm$  3 km. Susunan rumahnya menghadap ke jalan raya. Alat transportasi masih menggunakan gerobak yang ditarik oleh kerbau/sapi, hubungan dengan penduduk desa lainnya masih mempergunakan jalan setapak.

Pemukiman baru belum ada. Di desa ini belum ada pasar, satu-satunya pasar ada di Tais, ibukota Kecamatan Seluma. Barang-barang yang dipasarkan ialah kopi, beras, kelapa dan sayur-sayuran. Sumber penghasilan kepala desa secara khusus tidak ada, hanya tiap tahun, sawah dan ladang kepala dikerjakan oleh rakyat dengan secara gotong royong.

Usaha kegiatan masyarakat lainnya pada waktu itu telah dimulai dengan mendirikan koperasi, akan tetapi belum begitu maju dan kegiatan lainnya belum ada.

### 2.5.6 *Sosial Budaya*

Struktur masyarakat kebanyakan berdasarkan kelompok profesi, mata penghidupan seperti kelompok petani, pedagang, pegawai negeri, tukang kayu dan pengrajin pekerjaan tangan, misalnya pembuat tikar, bakul dan sebagainya. Adat istiadatnya masih kebanyakan memakai Undang-Undang Kitab Simbut Cayo dan kebiasaan hidup penduduk bergotong royong, seperti bergotong royong mendirikan rumah, menugal padi di ladang.

bertanam padi di sawah dan berotong royong apabila akan mengadakan peralatan perkawinan dan lain-lain.

Fungsi dan peranan Kepala Desa adalah pimpinan di dalam desa tersebut. Kesenian warisan sejarah budaya yang berkembang di desa berupa seni tari adat, dengan redap kelintangannya, rejung dan pencak silat. Di samping itu ada pula seni berden-dang, zikir/serapal anam. Agama yang dianut oleh penduduk desa ini 100% beragama Islam. Bahasa Indonesia dipakai pada saat pertemuan formal, atau kepala adat yang tak paham bahasa daerah (bahasa Serawai).

Mengenai Olah Raga dan Kesehatan di desa ini belum nampak kemajuannya. Balai Pengobatan yang ada hanya ada di Ibu-kota Kecamatan Seluma di Tais. Penggunaan air bersih, kakus, pembuangan sampah dan pelaksanaan Keluarga Berencana belum membudaya. Kesenangan pemuda/pemudinya siang hari pergi ke sawah atau ke kebun, dan malam harinya bertamu ke rumah gadis dengan kata lain dalam bahasa daerahnya, *tandang bergadis*.

## ***2.6 Desa Semidang Alas (Pajar Bulan)***

### ***2.6.1 Lingkungan Alam dan Penduduk***

Desa Semidang Alas Lebih dikenal dengan nama Pajar Bulan termasuk dalam Wilayah Tingkat II kabupaten Bengkulu Selatan. Hal itu tak lain Pajar Bulan adalah pusat pemerintahan desa ini. Kegiatan-kegiatan dari semua sektor, baik pemerintahan maupun pembangunan dalam desa ini dikendalikan dari Pajar Bulan.

Desa yang dimaksudkan di sini adalah daerah unit organisasi pemerintahan dalam kecamatan. Daerah ini sering juga disebut Kelurahan. Umumnya dalam Propinsi Bengkulu disebut Marga. Desa Semidang Alas dimaksudkan adalah Marga Semidang Alas. Pusat Pemerintahan desa ini ialah Pajar Bulan.

Pajar Bulan sebagai pusat pemerintahan desa meliputi areal kurang lebih 1600 ha. Areal tersebut terdiri dari unit-

unit desa : Bandung Agung, Sedawar III, Gersik Nanjungan, Pajar Bulan, Rantau Panjang dan Nanti Agung. Unit-unit desa tersebut merupakan sektor pembantu pasirah dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Bengkulu daerah ini merupakan pemukiman sebagaimana dari suku Serawai.

Wilayah Desa Semidang Alas meliputi luas kurang-lebih 712 kilometer persegi, dengan batas-batasnya, sebelah barat--Lautan Indonesia, sebelah timur-Bukit Barisan, sebelah utara--Desa Ilir Yalo, dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pino.

Wilayah Desa Semidang Alas terdiri atas dataran-dataran tinggi dan rendah serta berbukit-bukit. Lembah-lembah yang subur terdapat di daerah pinggiran sungai. Sungai yang terbesar adalah Sungai Alas dan Sungai Maras. Di samping sungai tersebut banyak juga sungai-sungai kecil misalnya Air Hitam, Air Pering, Air Pengumbutan, Air Talang Radin, dan lain-lain.

Hutan belantara di sebelah timur dan sepanjang Bukit Barisan merupakan cagar alam bagi daerah ini. Bukit Barisan merupakan pagar daerah di sebelah timur. Daerah pantai kebanyakan berawa-rawa. Sebagian dari rawa-rawa itu telah diusahakan sehingga berhasil dan sebagian masih merupakan hutan rawa. Hutan-hutan tersebut kini semakin habis dijadikan persawahan.

Di dataran-dataran rendah dan lembah sungai membentang sawah-sawah rakyat yang terdiri atas : sawah tadah hujan seluas kurang lebih 1.046 ha, sawah pengairan desa seluas 376 ha, sawah raya/sawah dalam seluas 2.550 ha, sehingga areal persawahan penduduk berjumlah 3.972 ha.<sup>9</sup>

Di dataran tinggi daerah hutan dibuka kebun-kebun dan ladang. Ladang darat rakyat setiap tahun meliputi kurang lebih 400 ha. Di bagian timur sebelah utara terdapat hutan rimba yang ditumbuhi berbagai jenis kayu dan jenis tetumbuhan lainnya. Di sini pulalah tumbuh berjenis-jenis rotan dan manau. Produksi rotan dan manau ini setahunnya dapat mencapai

ribuan ton. Di daerah hutan itu hidup berjenis-jenis binatang, seperti harimau dan babi dan jenis kera dan lain-lain.

Penduduk waktu itu berjumlah  $\pm$  15.000 jiwa. Umumnya penduduk asli. Dalam tahun 1980 jumlah penduduk desa ini 4.360 kepala keluarga yang terdiri dari pria 12.942 jiwa dan wanita 12.969 jiwa. Sejumlah penduduk tersebut di atas tercatat sebagai petani (98,7%), pegawai negeri (0,5%), dagang (0,3%), buruh (0,5%). mereka itu terdiri atas 98% suku bangsa Serawai dan 2% suku bangsa Pasmah. Agama yang dianutnya adalah 99,9% agama Islam dan agama Kristen/Katolik 0,1%.

Desa Semidang Alas, dahulu kala merupakan pemukiman penduduk yang terpencar-pencar. Nenek moyang mereka membuat tempat tinggal yang berjauhan dan dibatasi oleh hutan-hutan. Tempat-tempat pemukiman itu ada empat tempat. Keempat tempat itu makin lama makin berkembang sehingga akhirnya tempat-tempat itu semakin luas. Pencaran-pencaran tersebut ialah bernama :

(a) Semidang Babat

Semidang Babat adalah permukiman penduduk di pinggir sungai Alas dari Tanjung Raya sampai ke hulu sungai.

(b) Semidang Resam

Semidang ini ialah tempat permukiman di sekitar Pajar sekarang.

(c) Semidang Empat Dusun

Semidang Empat Dusun adalah tempat permukiman sepanjang sungai Maras dari Muara sampai ke hulu sungai. Empat dusun maksudnya ialah sekitar Gunung Mesir, sekitar Maras Jauh, sekitar Jembat Akar, dan sekitar Bungin Ampo dan Talang Alai sekarang.

Sampai zaman jejahan Belanda pertama desa ini masih terbagi atas empat Semidang itu. Zaman ini dikenal dengan zaman Pangeran. Pada zaman jajahan Jepang Empat Semidang itu menjadi satu Semidan saja. Sampai sekarang tetap hanya satu Semidang yaitu Semidang Alas. Semidang yang keempat ialah Semidang Liput Pantai. Semidang ini letaknya adalah

sekitar dusun Tedunan sekarang. Di sinilah tempat permukiman Raden Keling yang berasal dari Muara Bengkulu.

### 2.6.2 Pendidikan

Sebelum zaman Pelita di lingkungan Desa Semidang Alas hanya terdapat delapan buah Sekolah Dasar pemerintah dan dua buah sekolah dasar swasta. Sekolah-sekolah itu ialah SD Pajar Bulan I, SD Pajar Bulan II, SD Talang Durian, SD Muara Dua, SD Maras Jauh, SD Jambat Akar, SD Karang Anyar, dan SD Tedunan.

Sekolah dasar swasta terdapat di Gunung Mesir dan di Pajar Bulan.<sup>10</sup> Sekolah-sekolah Lanjutan dari Sekolah Dasar belum ada di desa ini. Sekolah-sekolah tersebut di atas walaupun berstatus pemerintah tetapi di waktu itu pembiayaannya hanya swadaya masyarakat. Yang membiayai adalah Persatuan Orang Tua Murid Dan Guru (POMG). Semua peralatan belajar mengajar, bangku dan meja murid semuanya dari hasil upaya orang tua murid dan guru. Demikian pula buku-buku pedoman mengajar untuk guru dibeli dari pasar-pasar. Keadaan fisik gedungnya atau peralatan dan sebagainya kurang terurus.

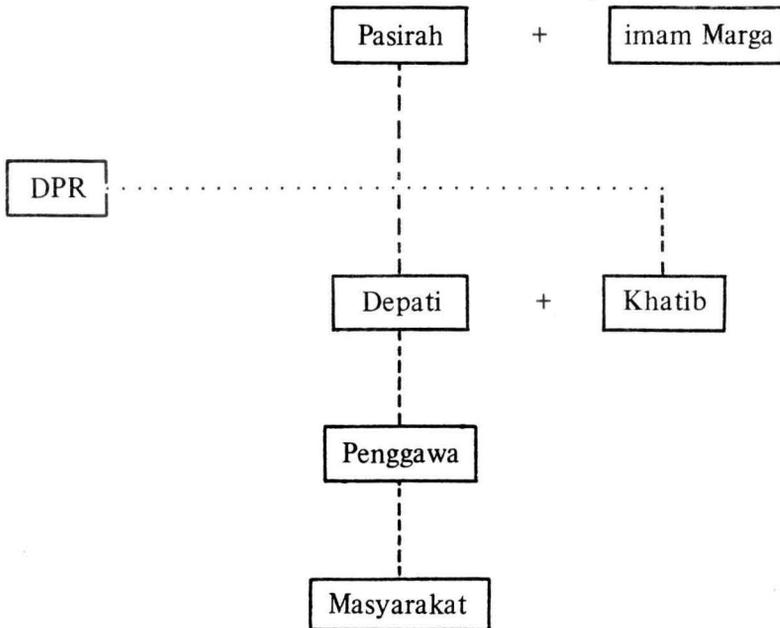
Sekolah-sekolah swastapun tidak ada, karena tak teratasi masalah keuangan dan ketenagaan. Rakyat benar-benar tidak mampu membiayai pendidikan yang biayanya memang besar itu. Namun masyarakat tetap berusaha agar anak-anak dapat bersekolah walaupun dengan prasarana dan biaya seadanya. Minimal rakyat harus lepas dari buta huruf. Usaha keuangan untuk membiayai pendidikan baik pemerintah maupun gaji guru pun tidak mencukupi sehingga sering menjadi tanggungan wali murid berupa iuran beras dan sebagainya. Keadaan demikian semakin lama semakin memburuk. Hal itu berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 dan tahun 1967.

Demikian pula pendidikan non formal dapat dikatakan tidak ada. Tidak ada kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Walaupun ada mungkin hanya di kota-kota saja.

### 2.6.3 Pemerintahan

Desa Semidang Alas diperintah oleh seorang pasirah atau Kepala Marga. Di bidang administrasi pasirah dibantu oleh juru tulis. Dalam bidang pemerintahan ia dibawahi oleh para depati. Depati adalah kepala dusun.

Struktur Organisasi pemerintahan di desa ini dapat dilihat pada bagan berikut : <sup>11</sup>



Sebelum G.30.S/PKI sampai-sampai dengan saat-saat pemberontakan tersebut sektor pemerintahan boleh dikatakan mengalami kemacetan. Pemerintah Desa selama itu, juga tidak dapat dilaksanakan terutama sekali dalam hal menyampaikan perintah-perintah dari atasan kepada rakyat. Di samping itu pemerintah desa dapat mengatasi langsung bila terjadi kekacauan/keributan yang akan mendatangkan bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya di bidang agama dan adat kepala desa dibantu oleh ketua adat dan Penghulu sebagai ketua dalam segi agama.

DPR Marga adalah wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan kehendak rakyat. Dialah yang membuat peraturan-peraturan marga atau desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Marga juga ditentukan oleh Dewan ini.

Dasar hukum pembentukan pemerintahan desa adalah peraturan pada zaman Belanda yang masih dipakai yaitu IGOB 1939 dan peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1967.

#### *2.6.4 Organisasi Politik dan non-Politik*

Setelah selesai menghadapi perjuangan fisik menentang penjajahan, maka di antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1958 keadaan sedikit membaik dan dirasakan bakal ada kemungkinan akan mengecap nikmat kemerdekaan. Pada akhir tahun 1958 keadaan mulai memburuk kembali. Tahun demi tahun keadaan semakin buruk. Ekonomi desa sangat merosot. Rakyat kembali merasakan kesengsaraan dan ketakutan. Rasa ada kemungkinan akan mengecap nikmat hasil kemerdekaan tadi menjadi kabur kembali.

Di tengah-tengah kemelaratan ekonomi rakyat digoncangkan oleh organisasi politik. Partai-partai politik saat itu bergoncang. Mereka bergumul satu dengan lain ide. Suasana dihangatkan oleh pertentangan-pertentangan. Organisasi-organisasi pada zaman itu asyik tuduh menuduh, saling membenci, cela mencela dan sebagainya. PKI, PNI, Masyumi, Partindo dan lain-lain bergumul, saling bersaing, tuduh menuduh satu dengan yang lain. Bukan bahu membahu, dan bela membela, sehingga di mana-mana sering terjadi kekacauan. Organisasi-organisasi lain pun demikian pula. BTI (Barisan Tani Indonesia), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Pemuda Rakyat semua adalah kaki tangan Partai Komunis Indonesia.

Dengan demikian di dalam masyarakat selalu diliputi pertentangan yang amat mendalam. Oleh karena itulah orang semua lupa, apa yang seharusnya dilaksanakan. Padahal yang seharusnya adalah menciptakan keamanan dan bahu membahu melaksanakan pembangunan. Justru itu yang tidak dikerjakan, karena itu pulalah semua sektor ekonomi jadi berantakan.

Sejak dari zaman penjajahan rakyat menghadapi kesengsaraan dan berbagai kekejaman. Maka di saat itu rakyat bersatu padu. Yang dihadapi hanya kaum penjajah, mereka tidak bertentangan sesama mereka. Karena itu, mereka menjadi kuat.

Setelah merdeka rakyat dihadapkan pada kemelut politik yang merugikan. Satu pihak dengan pihak yang lain selalu berprasangka.

Segala kemerlaratan dan kegoncangan yang berlangsung lama itu telah membentuk watak masyarakat menjadi fanatik. Mereka berpegang teguh kepada pendirian masing-masing.

Penduduk desa Semidang Alas mempunyai sikap sendiri-sendiri. Golongan yang satu berbeda dengan yang lain. Golongan Komunis dengan berbagai organisasi naungannya berusaha untuk mengkomunikasikan semua penduduk. Suasana makin lama semakin buruk dan sebagai puncaknya adalah gerakan 30 September 1965 (G. 30. S/PKI).

Gerakan 30 September dengan segera dapat dipadamkan oleh rakyat, ABRI dan pemerintah dengan kemenangan Pancasila. Dengan itu berakhirlah kemelut politik yang menjadikan kesengsaraan itu. Keadaan berubah 180 derajat. Kekuatan tidak digunakan untuk bergumul sesama mereka yang satu nusa satu bangsa dan satu bahasa tercinta ini, tetapi kekuatan digunakan untuk menekan semua kekacauan dan melaksanakan pembangunan.

#### *2.6.5 Ekonomi dan Sosial*

Di luar sektor pendidikan, keadaan tetap memburuk. Ekonomi rakyat morat-marit. Jalan-jalan raya tidak sempat di-

urus. Di sepanjang jalan terdapat lobang-lobang besar yang di waktu itu sering disebut lobang buaya.

Penghasilan rakyat yang tetap melimpah-ruah, dirasakan tak ada manfaatnya. Hasil kebun dijual tak seimbang dengan kebutuhan. Barang negeri tak bisa masuk sampai ke desa-desa, karena tak ada kendaraan mengangkutnya. Padahal penghasilan hasil bumi rakyat tetap baik.

Menurut catatan, hasil produksi rakyat setiap tahun adalah : kopi kurang lebih 300 ton, karet kurang lebih 100 ton, damar kurang lebih 20 ton, cengkih kurang lebih 30 ton, buah-buahan kurang lebih 90 ton, dan kelapa kurang lebih 100 ton.<sup>1 2</sup>

Di lapangan peternakan juga banyak dijual hewan-hewan seperti kerbau, sapi, kambing dan biri-biri. Di desa ini peternakan hanya merupakan cara sambilan. Di samping mengerjakan sawah, ladang dan kebun banyak rakyat yang mempunyai binatang ternak. Hewan-hewan ini dimiliki rakyat secara perorangan. Caranya hanya dengan membiarkannya bebas tak terikat dengan kandang dan sebagainya.

Potensi lain ialah daerah hutan. Sektor ini mempunyai arti penting dalam potensi perekonomian desa. Dari sini dikeluarkan kayu bahan bangunan. Bambu juga sebagai pelengkap bahan bangunan. Rotan dan manau sebagai bahan perlengkapan dan alat perabot rumah tangga, dihasilkan dari daerah hutan yang meliputi hasil kurang lebih 200 ton satu tahunnya.

Sarana dan prasarana kesehatan di desa ini sangat dibutuhkan. Sebelum Pelita, desa Semidang Alas yang luasnya 700 km dengan penduduk hampir 26.000 jiwa. Di desa ini hanya mempunyai satu Balai Pengobatan. Inipun dengan fasilitas yang di bawah normal. Sumber-sumber air bersih, jamban atau lain sebagainya belum mendapat perhatian.

Tempat-tempat ibadah belum mendapat perhatian pemerintah. Mesjid-mesjid hanya buatan rakyat dengan biaya swadaya murni yang amat lemah, sehingga tempat-tempat itu kurang pantas menurut semestinya.

Irigasi dan pemasaran dibuat oleh rakyat secara gotong royong. Pendek kata semua lapangan di waktu itu belum dibangun.

#### 2.6.6 Sosial Budaya

Penduduk Desa Semidang Alas tidak mempunyai tingkat dan kelas. Hanya saja dalam mata penghidupan mereka berbeda-beda seperti tani, dagang, pegawai negeri, buruh dan sebagainya. Sebagian besar mereka adalah petani. Agama dan kepercayaan mereka hampir tunggal, yaitu 99,9% beragama Islam. Selainnya 0,1% adalah beragama Kristen Katolik.

Sebagian dari suku Serawai masyarakat desa ini mempunyai adat istiadat dan kebiasaan hidup seperti suku bangsa lainnya. "*Adat bojanji nunggu- Adat sesamo beragih*", ini adalah adat kebiasaan hidup masyarakat. Maksudnya, bersama harus dibagi. Demikian pula adat-adat lainnya, seperti Adat Bujang dengan Gadis, Adat Dusun Lembago Laman, Adat Duso dan Cepalo, Adat Bertani beternak, dan lain-lain.

Pelanggaran atas adat-adat tersebut mempunyai sanksi. Apabila dilanggar adat itu, sebagai sanksinya adalah jambar nasi kunyit dan uang yang besarnya ditetapkan oleh kepala adat. Uang tersebut dinamakan denda. Besar atau kecilnya adalah menurut ketentuan besar kecilnya tingkat pelanggaran itu.

Contoh : Bujang dengan gadis; apabila seorang bujang atau lelaki dengan sengaja memegang atau menyentuh seorang gadis yang bukan muhrimnya, ini adalah pelanggaran adat. Kepada-nya dikenakan jambar nasi kunyit.

Kehidupan adat istiadat ini makin lama makin menurun. Tak lain sebabnya adalah kemajuan zaman dan pengaruh dari luar. Adat dan kebiasaan hidup itu dipegang dan dipelihara oleh kepala dusun atau Depati. Dialah yang memutuskan pelanggaran adat kepada orang-orang yang melanggarnya setelah mendengar saran dan pendapat dari orang-orang tua.

Kepala dusun juga memegang adat kesenian; seperti dalam pesta perkawinan dan lain-lain sebagainya di mana kesenian

akan diketengahkan. Kesenian dan warisan sejarah budaya telah mengisi kehidupan masyarakat sejak lama. Terutama kesenian yang identik sekali dengan kehidupan masyarakat.

Hanya saja apresiasi seni dan sosial budaya, di sini tentu saja menurut tingkat kemampuan dan kehidupan masing-masing penduduk. Kesenian yang mereka hayati adalah meliputi seni tari, seni musik tradisional dan lain-lain. Hal ini semua tidak mendapat perhatian dari pihak Pemerintah.

## **2.7. Desa Mubai**

### *2.7.1 Lingkungan Alam dan Penduduk*

Luas desa Mubai ini yang termasuk dalam Wilayah Tingkat II kabupaten Rejang Lebong seluruhnya lebih kurang 1 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan desa Turan Lalang,  
Sebelah selatan berbatas dengan desa Taba Anyar,  
Sebelah barat dengan desa Turan Lalang,  
Sebelah timur dengan desa Taba Anyar.

Desa ini terdiri dari sebidang tanah yang tidak datar. Terdiri dari tanah tebing (miring), lembah dan dataran tinggi, serta berbukit-bukit dan dilalui oleh dua buah anak sungai, yaitu Air Mubai Besar dan Air Mubai Kecil.

Di sebelah kiri dan kanan desa ini terdapat bukit, yaitu rangkaian Bukit Barisan yang terkenal membujur dari utara sampai ke selatan Pulau Sumatera. Di bagian sebelah barat terdapat pula dua buah puncaknya yang bernama Bukit Berinti dan Bukit Belerang. Yang terakhir ini terbagi dua, sebagian masuk ke wilayah Marga Suku VIII dan sebagian lagi yaitu bagian timur masuk ke wilayah Marga Bermari Juru Kalang.

Di sebelah timur, di seberang Air Ketahun, terdapat sebuah puncak yang terkenal, yaitu Bukit Iking, Diberikan nama ini karena di bukit tersebut banyak terdapat pohon iking, yaitu sebangsa buah-buahan yang menyerupai rambutan, tetapi rambutnya pendek dan rasanya tidak berbeda dengan rambutan. Buahnya sebesar ibu jari tangan.

Melintasi pertengahan dusun terdapat dua buah anak sungai, yaitu Air Mubai Besar dan Air Mubai Kecil. Kedua anak sungai tersebut berhulu di Bukit Berinti dan bermuara ke Air Ketahun. Melintasi pinggiran dusun sebelah timur, mengalir Air Ketahun, yaitu sebuah sungai yang terbesar di wilayah Lebong. Air Ketahun ini besar sekali manfaatnya bagi pembangunan, yaitu sumber tenaga listrik (PLTA) dan sumber air irigasi untuk mengairi sawah.

Di seberang Air Ketahun, berulu di Bukit Iking terdapat sebuah anak sungai yang bernama Air Males. Air ini bermuara ke arah timur yang dipergunakan untuk mengairi sawah daerah Tes dan Kota Donok.

Ada dua buah danau kecil di kaki Bukit Belerang dan Bukit Berinti, yaitu Danau Lupang Besar dan Danau Lupang Kecil. Yang menarik di danau itu ialah tempat hidup burung belibis, sehingga sangat baik kalau dijadikan tempat rekreasi.

Daerah ini beriklim (berhawa) sedang. Dibandingkan dengan daerah lainnya yang mengarah ke utara, seperti Talang Leak, Ujung Tanjung sampai ke Muara Aman, suhunya lebih dingin, apalagi pada waktu malam hari. Mungkin ini disebabkan tanahnya lebih tinggi.

Pada tahun 1965 luas sawah hanya lebih kurang 126 ha.<sup>13</sup> Lebih kurang 25% dari sawah ini merupakan sawah tadah hujan (bendar langit), karena air irigasi belum mencukupi. Pada umumnya baik tanah sawah maupun tanah ladang tanahnya subur. Kebun kopi ada lebih kurang 25 bidang ( $\pm$  15 ha). Hasilnya kurang memuaskan karena kurang rawatan dan belum adanya bimbingan dari petugas yang berwenang.

Pada bukit-bukit yang telah disebutkan di atas tumbuh bermacam-macam jenis kayu dan bambu. Kayunya yang terkenal ialah: meranti, rasamala, medang dan lain-lain. Kayu ini diambil oleh penduduk untuk bahan bangunan rumah dengan digergaji cara tradisional (tenaga manusia).

Penduduk seluruhnya berjumlah  $\pm$  1400 jiwa (200 kk) yang terdiri atas empat *kutai* (suku), yakni Kutai Talang Padang, Kutai Turan Tigiang, Kutai Karang Tinggi, Kutai Mubai.

Untuk membantu kepala desa, di tiap kutai diangkat seorang penggawo. Dari tiap kutai ada pula Tua Kutainya. Sebenarnya pembagian kutai tadi disebabkan asal penduduk yang mendiami perkampungan itu, misalnya Kutai Talang Padang, penduduknya berasal dari orang-orang Padang yang berladang di daerah itu, Kutai Karang Tinggi penduduknya berasal dari Suku Serawai, Kutai Turan Tiging berasal dari desa tua di seberang Air Ketahun, dan Kutai Mubai adalah Kutai yang tertua di desa itu.

Ketika terjadi kemarau panjang (kira-kira tahun 1917) yang lebih dikenal dengan sebutan kemarau sembilan bulan, seluruh tanah menjadi tandus, air sungai kering, tanaman banyak yang mati, penduduk wilayah Lebong mengalami bahaya kelaparan. Mereka makan apa yang dapat dimakan. bahkan ada yang memakan kayu lapuk. Pada suatu waktu, di pinggir air tumbuh batang ubi. Dalam bahasa daerah ubi ini disebut *ubai*. Penduduk memakan ubi tersebut. Dengan ubi ini sebagian penduduk dapat terhindar dari bahaya kelaparan. Ketika diketahui bahwa nyawa mereka diselamatkan oleh ubi. (*mbuk ubai*), dusun itu terkenal dengan dusun Mbuk Ubai dan seterusnya disingkat menjadi *Mubai*.

Perkampungan yang pertama kali bernama *Turan Pukut*. *Turan* artinya tempat pelancongan (rekreasi), sedangkan *pukut* adalah nama sebangsa pohon yang bergetah. Kulit batangnya dapat dibuat tali pemikul beronang. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang, kulit batang pukut ini dibuat pengganti kain (pakaian). Proses pembuatan kain ini mudah sekali. Setelah kayu itu dikuliti, lalu dilepaskan kulit arinya. kemudian dipukul-pukul agar kulit itu menjadi lunak. Setelah dijemur sampai kering dapat dibentuk (dibuat) baju, celana atau hanya sebagai kain saja. Terjadinya wilayah Turan Tigingi, adalah perpindahan penduduk dari sebuah desa di seberang Air Ketahun.

Pada zaman dahulu di sebuah perkampungan yang bernama Kutai Menganyeu ada seorang orang gagah dan suka mengganggu penduduk terutama perempuan. Mereka lalu melarikan diri dan membentuk perkampungan baru di Turan Tiging sekarang. *Tiging* aritnya miring. Memang tanahnya sepanjang perkampungan ini miring.

Perkampungan Talang Padang pada mulanya adalah ladang orang Suku Padang. Orang yang pertama sekali berladang di sini bernama Pekih Cilik Ali. Pada akhir-akhir ini telah diramaikan pula oleh penduduk Suku Rejang.

Perkampungan Karang Tinggi, sesuai dengan namanya tanahnya lebih tinggi dari tempat lainnya. Penduduk aslinya berasal dari Suku Serawai yang melarikan diri akibat harimau mengganas di daerahnya zaman dahulu. Tiap perkampungan yang disebutkan di atas dikepalai oleh seorang penggawo untuk membantu kepala desa

### 2.7.2 Pendidikan

Sekolah Pemerintah belum ada. Sedangkan Sekolah Swasta yang ada ialah Madrasah Muhammadiyah, didirikan tahun 1925. Sejak tahun 1974 diubah menjadi SD Muhammadiyah. Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri Mubai didirikan pada tahun 1967.

Kedua madrasah ini sebagian besar memberikan pendidikan agama Islam. Setelah berubah status menjadi Sekolah Dasar Muhammadiyah maka SD Muhammadiyah tersebut telah menyesuaikan pendidikannya dengan Kurikulum 1975.

Pada umumnya saat itu guru Muhammadiyah didatangkan dari luar daerah, terutama dari Sumatera Barat dan dari daerah Jawa (Jogjakarta). Banyaknya guru tergantung kepada kemampuan daya tampung sekolah/organisasi yang bersangkutan.

Untuk membantu kelancaran pendidikan, gaji guru dan alat-alat pelajaran, diambil dari wali murid atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi tersebut, umpamanya dari hasil pe-

ngumpulan zakat fitrah, iuran anggota organisasi, atau amal lainnya yang diperoleh dari para demawan.

Dalam organisasi Muhammadiyah ada badan khusus yang mengelola bidang pendidikan yaitu Pengurus Pengajaran. Pengurus ini berkewajiban mengatur dan memperhatikan maju mundurnya sekolah/madrasah tersebut. Administrasi sekolah di pegang sepenuhnya oleh guru seperti batas-batas pelajaran, absen murid daftar nilai, dan sebagainya. Buku-buku pelajaran untuk pegangan guru biasanya dibawa atau dicari sendiri oleh guru yang bersangkutan.

### 2.7.3 Struktur Pemerintahan

Sesuai dengan sejarah terbentuknya desa seperti yang telah diterangkan di atas (pada pasal 1 ayat 4), anggota masyarakat membentuk kelompok sosial penghidupan yang diketuai oleh seorang kepala suku. Dahulu sebutan desa belum dikenal. Yang ada adalah sebutan *Talang*,<sup>14</sup> yang artinya ladang. Sampai sekarang masih ada beberapa buah dusun yang masih bernama talang, seperti Talang Ratu, desa Talang Benih, desa Talang Leak, dan sebagainya.

Struktur organisasi pemerintahan desa dan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- (a) desa dikepalai seorang kepala desa, yang disebut depati.<sup>15</sup>
- (b) pembantu depati disebut penggawa.
- (c) wakil depati disebut alingan.
- (d) tua Kutai untuk mewakili kutai/suku dalam musyawarah desa.
- (e) tua sarak terdiri dari pegawai mesjid, untuk membantu depati di bidang agama.
- (f) LSD dan cerdik pandai menjadi anggota dalam suatu musyawarah desa.

Dasar hukum pembentukan pemerintahan desa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140 – 502 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan tanggal 22 September 1980.

Adapun program dan tujuan pemerintahan desa ialah:

- (a) di bidang pembinaan agama Islam : membangun dua buah mesjid, yaitu mesjid Mubai dan mesjid Turan Tiging.
- (b) di bidang pertanian, untuk meningkatkan hasil sawah, dibangun beberapa buah siring irigasi, yaitu siring irigasi Air Mengayau, Air karat dan Air Pauh. Semua pembangunan itu adalah swadaya masyarakat. Sangat disayangkan pembangunan irigasi Air Pauh tidak dapat diselesaikan, karena kurang perhatian sepenuhnya dari masyarakat.
- (c) membangun jalan marga panjangnya  $\pm$  800 m dengan swadaya masyarakat, yaitu jalan yang menuju ke wilayah Karang Tinggi.
- (d) untuk membina generasi muda dan masyarakat, diadakan pengajian, perguruan pada malam hari di mesjid/surau.
- (e) untuk memajukan kesenian, diadakan kesenian bazikir, tari daerah dan musik band.
- (f) membentuk sebuah madrasah Ibtidaiyah persiapan negeri (1967).

Pemerintahan di desa yang masih berstatus Desa berwenang menyusun rumah tangga sendiri. Ini berarti masih berstatus daerah (desa) otonom. Kepala desa berfungsi juga sebagai tua kutai (tua adat). Sedangkan desa yang berstatus kelurahan, bentuk pemerintahannya langsung dibawah oleh pemerintah kecamatan (camat). Kepala kelurahan tidak lagi sebagai tua kutai (tua adat). Kepala Desa juga memegang jabatan tua kutai itu mempunyai hak/pembagian di dalam uang adat yang disebut *mas kutai*, tetapi kepala kelurahan tidak lagi menerima mas kutai tersebut. Hak ini diterimakan langsung kepada ketua adat/kutai yang khusus dibentuk dalam organisasi pemerintahan kelurahan.

Sebagai seorang pimpinan di tingkat desa, Kepala Desa berkewajiban untuk menyusun organisasi pemerintahan desa. Selain itu membantu pemerintah untuk menjaga keamanan desa, mengatur keuangan, mengatur dan memelihara perkembangan pembangunan desa di segala bidang, menjaga dan mengatur pengairan, mengawasi pembukaan hutan dan sebagainya.

Selain itu, Kepala Desa sebagai Kepala Adat, menjaga keutuhan adat istiadat/kebudayaan daerah bersama-sama dengan tua-tua adat/kutai. Misalnya pada upacara peralatan perkawinan, sebelumnya lebih dahulu sirih pinang di letakkan di hadapan Kepala Desa untuk meminta izinnya/restunya. Kalau telah dinyatakan oleh kepala desa bahwa tidak ada lagi hal-hal yang patut diselesaikan di bidang adat istiadat, maka peralatan itu dilangsungkanlah.

Di daerah ini pada umumnya seorang kepala desa tidak mempunyai sumber penghasilan khusus seperti halnya tanah bengkok di daerah pulau Jawa dan lain-lain. Kepala Desa hanya mendapat 25% dari biaya surat menyurat dan meminta uang jajan bila diminta oleh masyarakat untuk memeriksa tanah/kebunnya. Umpamanya: Surat Keterangan Nikah (NA) sebesar Rp 75,- izin tanah Rp 250,- izin mendirikan rumah Rp 250,- surat memotong kerbau/sapi Rp 250,- dan sebagainya.<sup>16</sup> Jika kepala desa diminta untuk memeriksa tanah yang akan dijual atau hutan yang akan dibuka, maka pemohon diwajibkan membayar uang jalan sebesar Rp 200,- tiap 1 kilometer perjalanan. Dalam musyawarah adat, kepala desa tidak mempunyai kata akhir, melainkan harus diputuskan bersama-sama dalam rapat kutai.<sup>17</sup>

Hak, wewenang, dan kewajiban unsur-unsur pimpinan pemerintahan desa lainnya diatur sebagai berikut:

- (a) penggawo, membantu kepala desa dalam wilayahnya yang tertentu (sama dengan RT sekarang).
- (b) tua kutai, mewakili kutainya dalam musyawarah desa.
- (c) pegawai mesjid (imam, khatib, bilal dan garim), mengurus soal agama (Islam).
- (d) tua Kutai, mendapat pembagian dari uang mas kutai yang biasanya dikeluarkan pada acara pernikahan.

Pada umumnya pemerintahan desa tidak mempunyai perangkat perkantoran. Administrasi dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa. Jenis administrasi yang dikerjakan antara lain: Surat Keterangan Nikah (NA), surat-surat izin, daftar penduduk wajib pajak, daftar jumlah penduduk (Buku Jiwa) dan sebagainya.

## 2.7.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Persyaratan pencalonan dan prosedur pemilihan Tua Suku/Kutai dipilih dari keturunan suku petuai) menurut garis lurus keturunan patrilineal<sup>18</sup> dengan syarat mempunyai sifat sabar, berpandangan luas, dan adil.

Kepala desa diangkat dengan mengadakan pemilihan. Sebelum tahun 1955 pemilihan kepala desa dilakukan dengan jalan pengelompokan, yaitu mata pilih berbaris (berdiri) di belakang calonnya masing-masing. Bagi calon yang banyak pengikut berdiri di belakangnya itulah yang menang (terpilih) menjadi kepala desa. Dengan cara begini mengakibatkan sering terjadi perkelahian atau percekocokan setelah kembali dari pemilihan kepala desa tadi. Bahkan ada rumah tangga yang berantakan, karena dua suami isteri bertengkar akibat tidak sama pilihan antara orang tua kedua belah pihak. Tidak mengherankan hal-hal itu akan terjadi, karena cara pemilihan yang bebas dan tidak rahasia itu. Cara pemilihan yang demikian tentu bertentangan dengan Pancasila, karena bertujuan mengadu domba. Dengan adanya sistem Pemilu, sejak tahun 1965, pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan bebas rahasia, yaitu pemungut suara dengan menggunakan tabung. Kepala desa diangkat dengan keputusan bupati dan pelantikan dilaksanakan oleh bupati.

Struktur kepemimpinan pemerintahan desa di data ini dapat dilihat pada bagan berikut.



### *2.7.5 Organisasi Politik dan non-Politik*

Pada waktu itu hanya ada satu organisasi non politik, yaitu organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam. Sekarang Madrasah Muhammadiyah telah dijadikan SD Muhammadiyah. Di desa Mubai pernah tercatat adanya anggota Masyumi, NU dan PSII.

Hampir 90% penduduk memasuki organisasi Muhammadiyah, karena organisasi Muhammadiyah hanya bergerak di bidang pendidikan agama Islam. Organisasi politik lainnya adalah terdiri dari beberapa anggota saja.

### *2.7.6 Perekonomian Masyarakat Pedesaan*

Tanah sawah dan tanah perkebunan berkualitas subur terdapat di daerah Desa Mubai. Juga areal tanah untuk perkembangan pertanian masih memungkinkan untuk ditambah lagi jika siring irigasi dibangun lagi, misalnya siring irigasi Air Mubai, Air Menganyau, dan Air Pauh.

Lokasi Danau Lupang, memungkinkan untuk diadakan tempat peternakan unggas (ayam dan itik) karena tanah datar di sekitar itu masih kosong dan danau dapat dipergunakan melepaskan itik. Tanah dan iklim di daerah ini memungkinkan pula ditanami kepala, kopi, dan cengkeh. Dilihat dari banyaknya sawah dan mudahnya mendapatkan air, memungkinkan pula dilaksanakan peternakan ikan, seperti ikan mas, ikan mujair, dan ikan lele.

Mata pencaharian penduduk lainnya ialah pertanian dan peternakan. Peternakan unggas (ayam dan itik) dilakukan sebagai usaha sampingan, artinya tidak diusahakan secara khusus. Hasilnya hanya cukup untuk dimakan atau dijual dalam kampung saja. Ayam misalnya dalam satu keluarga tidak melebihi dari dua atau tiga induk saja, dan hanya mengharapkan pembiakan (bukan untuk dijual terlunya). Itik dalam satu keluarga paling mampu memelihara sampai dua puluh ekor jantan dan betina. Itik ini menghasilkan telur.

Pemeliharaan itik terbatas dengan musim. Apabila sudah tiba musim bertanam padi, maka semua itik itu harus dikurung supaya tidak mengganggu tanaman padi. Karena itik-itik ini terkurung, maka produksi telurnya pun terhenti pula. Ini disebabkan bahwa pemeliharaan itik tersebut tidak dilakukan secara khusus. Yang disediakan oleh peternak itik hanya dedak, padi, dan sugu batang rumbia (kalau ada). Tidak pernah diberikan makanan tambahan, seperti makanan-makanan yang mengandung mineral, protein, tulang dan sebagainya yang biasa diberikan oleh peternak modern sekarang.

Perikanan, juga merupakan usaha sambilan. Ini dilakukan sebelum bertanam padi. Apabila kolom-kolom dikeringkan untuk menanam padi maka peternak ikan pun terhenti. Penangkapan ikan di Air Ketahun dilakukan dengan menjala. Hasilnya tidak memuaskan. Cukup untuk dimakan/kebutuhan keluarga saja.

Di Desa Mubai juga ada kegiatan kehutanan. Hasil hutan ialah kayu untuk bahan bangunan rumah. Pengolahannya dengan tenaga manusia (menggesek cara tradisional) dan hanya untuk keperluan sendiri.

Dalam hal perburuan ternyata masih sedikit sekali penduduk desa ini bekerja sebagai pegawai. Mungkin ini disebabkan karena potensi pertaniannya masih cukup di samping pendidikan yang masih kurang diperhatikan oleh orang-orang tua.

Pada bidang perdagangan, hanya terdapat beberapa buah warung manisan kecil-kecilan. Oleh karena pasar Tes sangat dekat, maka penduduk dapat berjual beli di pasar Tes saja.

Perindustrian juga sudah tercatat kegiatannya. Untuk menumbuk padi dilakukan di mesin tumbuk dengan menggunakan kincir air. Usaha ini sangat menguntungkan, karena ongkos menumbuk padi ditimbang dari berasnya sebesar 10% atau 8%. Umpamanya, dari beras satu kaleng maka dikeluarkan satu cupak. Tetapi kalau sudah mencapai empat kaleng dikeluarkan hanya tiga cupak saja. Suatu mesin tumbuk dalam satu hari mampu menumbuk padi 100 kaleng atau 40 kaleng beras.

Ini berarti si pemilik mesin tumbuk akan menerima ongkos sebanyak 30 cupak (tiga kaleng) beras. Sedangkan biaya menjalankan mesin tidak ada sama sekali.

Kerajinan rumah tangga juga ada kegiatannya. Seperti kebiasaan Suku Rejang, pada umumnya kaum ibu dapat membuat bakul, beronang, tikar dan alat rumah tangga lainnya, yang dianyam dari bambu. Untuk bahan anyaman (bambu) banyak terdapat di daerah ini, baik bambu liar (bambu hutan) maupun bambu yang sengaja ditanam. Bambu untuk bahan berjenis-jenis kerajinan ini cukup banyak terdapat di wilayah Lebong. Bahkan dapat dikatakan melimpah.<sup>19</sup>

Sangat disayangkan bahan-bahan ini belum dapat dimanfaatkan oleh penduduk sepenuhnya. Ini disebabkan belum ada bimbingan/peningkatan keterampilan kerajinan rakyat. Misalnya dari bambu dapat dibuat bermacam-macam permainan, baik permainan untuk anak-anak maupun permainan-permainan tingkat dewasa, seperti alat musik (angklung) dan sebagainya.

Sesuai dengan sejarah kejadian dan perkembangan penduduk, bahwa penduduknya ingin mendapat kedamaian di dalam kehidupannya, dapat menyatukan diri dengan kelompok lain dan suka bekerja saling membantu dalam pekerjaan berat ataupun ringan. Wataknya sabat dan kreatif. Terbukti dari perkembangan desa, baik di bidang keamanan desa maupun organisasi-organisasi desanya yang berjalan dengan aman dan lancar.

Kebudayaan dan kebiasaan tradisional penduduknya hanya sedikit mendapat pengaruh dari luar. Umpamanya pergaulan para remaja dan sistem pemerintahan.<sup>20</sup> Mengenai keadaan perlengkapan kehidupan penduduk (isi dan kekayaan rumah tangga) perlu pula diperhatikan sebagai salah satu indikator. Tiap rumah tangga pada umumnya mempunyai perlengkapan yang sederhana. Hanya sekedar kebutuhan sehari-hari dan produksi rakyat daerah. Umpamanya meja, kursi, lemari dan alat-alat rumah tangga untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga sehari-hari oleh karena desa ini telah lama mendapat penerangan lampu listrik (sejak tahun 1960) ada juga penduduk yang telah mempunyai radio. Perumahan penduduk kebanyakan dibuat dari bahan-ba-

han sebagai berikut: tiang kayu, dinding dan lantai papan, ber-atap seng. Bahan bangunan dari kayu di daerah ini mudah di dapat dan dikerjakan sendiri. Tinggal lagi penduduk membeli seng untuk atap. Tiap perumahan hanya dihuni oleh satu keluarga. Bagi keluarga yang baru setelah melepaskan dirinya dari orang tua ada juga yang membuat rumah sementara, yaitu dinding bambu dan atap daun rumbia.

Data jalur komunikasi dan alat transportasi adalah sebagai berikut:

- (a). jalan propinsi panjangnya 1 km, dan jalan marga  $\pm$  800 m terletak di wilayah Karang Tinggi.
- (b) jenis alat transportasi adalah: sepeda, gerobak yang ditarik sapi/kerbau, dan oplet.
- (c) Sarana komunikasi adalah radio, dan untuk mengirim surat ke luar daerah dapat dititipkan ke mobil yang berlalu-lintas antara Muara Aman ke Curup.

Di desa-desa itu pernah didirikan koperasi, yaitu Koperasi Konsumsi Setia Tani. Koperasi ini bertugas (bergerak) sebagai penyalur sandang pangan, yaitu gula, garam, minyak dan bahan kain (sandang). Koperasi itu berjalan lancar dan telah mempunyai kekayaan yang lumayan, tetapi pernah pula terjadi salah pengolahan, karena tertipu oleh salah seorang pengurus yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan LSD masih terasa kurang berfungsi.

### **2.7.7 Sosial Budaya**

Dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari tidak dapat dilihat dengan jelas struktur masyarakatnya.

Hal ini dapat dilihat apabila suatu keluarga akan mengadakan peralatan atau perayaan keluarga. Dalam hal ini seluruh anggota masyarakat ikut mendukung pelaksanaannya, baik moril maupun material. Dalam suatu peralatan dibentuk semacam panitia, tua tukang masak, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Musyawahar desa hanya berlaku di dalam hal adat istiadat saja, seperti menampung untuk mendamaikan suatu perkelahian

atau melakukan pekerjaan sumbang.<sup>2 2</sup> Adat istiadat, kebiasaan hidup penduduk dan realisasinya dalam bentuk kegiatan.

Dalam hal adat istiadat masih dipakai dengan baik menurut buku Simbur Cayo, seperti adat perkawinan, bergotong royong dan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan berat atau pun ringan. Dalam hal hukum adat ditetapkan dalam musyawarah kutai, seperti menetapkan denda bagi penduduk yang melanggar adat.

Dalam kebiasaan hidup sehari-hari, umpamanya mengerjakan pekerjaan untuk kehidupan keluarga, pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama. Hampir tidak dibedakan antara pekerjaan pria dan pekerjaan wanita. Umpamanya menebas dan mencangkul, dapat juga (biasa juga) dikerjakan oleh wanita. Mengenai tingkat perubahan akibat pengaruh dari luar, dalam hal ada dalam hal adat istiadat tidak mengalami perubahan. Hanya di bidang pergaulan remaja, terdapat sedikit pengaruh dari luar.

Kesenian dan warisan sejarah budaya juga berkembang Kesenian tradisional, tari kejai, seni musik tradisional yang dapat/mengerti tentang kesenian. Alat-alat upacara seperti kenduri agung, masih tersimpan. Umpamanya dulang kenduri dan beberapa senjata pusaka. Benda-benda ini masih tersimpan dalam arti tidak terpelihara.

Tingkat apresiasi sosial budaya masyarakat, di tingkat remaja sudah mulai berkurang perhatian/minatnya untuk mempelajari kesenian tradisional. Hal ini mungkin sebagai akibat pengaruh kebudayaan dari luar. Namun dalam masyarakat tua-tua (Kutai) masih dapat kita lihat pelaksanaannya.

Agama dan Kepercayaan perlu dikemukakan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang Pendidikan Agama Islam, maka peribadatan agama Islam baik sekali. Terbukti dengan dapat dibangun dua buah mesjid dan dua buah madrasah Islam dengan swadaya masyarakat. Kepercayaan kepada (mirip) animisme sudah hilang, terbukti dengan tidak dibiasakannya lagi mengadakan kenduri agung (kenduri tolak balak) dengan upacara kenduri apam.

Namun dalam bidang pengobatan masih terdapat juga dukun-dukun kampung yang mempergunakan mantera-manteranya.

Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dan fungsi pemakaiannya di desa-desa tersebut tercatat sebagai berikut. Oleh karena sejak dahulu daerah ini telah biasa didatangi oleh orang luar, seperti guru, pegawai pusat dan berdekatan pula dengan ibukota kecamatan, maka Bahasa Indonesia dapat dipergunakan untuk percakapan sewaktu-waktu diperlukan. Pada upacara/musyawarah adat/kutai, dipakai bahasa daerah.

Organisasi Sosial dan Perkumpulan Kesenian sudah mulai tumbuh. Perkumpulan PKK selain bergerak di bidang Kesejahteraan Keluarga, juga membentuk kelompok kesenian, yaitu kesenian rebana. Pernah pula dibentuk musik band, tetapi tidak/kurang berkembang, karena kurang bimbingan dan pengaruh persaingan dengan desa tetangganya Taba Anyar dan Tes.

Olah raga di daerah sipatnya musiman. Badminton dan lain-lainnya hanya dilakukan selesai panen padi. Selain sekedar pengisi waktu senggang dan bersuka ria habis panen, juga biasa alat dan pelaksanaannya bersumber dari hasil pertanian.

## ***2.8 Desa Karang Anyar***

### ***2.8.1 Lingkungan Alam dan Penduduk***

Luas dan batas lingkungan penduduk Luas desa kurang lebih 2 km<sup>2</sup> dengan batas-batas, sebelah utara Air Duku, sebelah selatan Air Putih (irigasi), sebelah timur Duku Ilir dan Kesambe Lama, dan sebelah barat Dusun Curup dan Jalan Baru.

Desa Karang Anyar adalah sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari Pasar Curup, termasuk dalam Wilayan Tingkat II kabupaten Rejang Lebong. Sebuah desa yang dikelilingi oleh air atau siring-sing irigasi antara lain Air Putih, Air Duku untuk mengairi persawahan di Talang Benih. Desa ini terletak pada tanah yang tidak datar makin ke ujung desa semakin tinggi letak tanahnya. Oleh karena itu apabila kita berdiri di ujung desa, kita dapat memandang atap-atap rumah penduduk di dusun pasar Curup.

Di kiri-kanan desa kita dapat memandang bukit-bukit yang subur tanahnya antara lain Bukit Basa, Bukit Kaba, Bukit Kambing. Oleh sebab itu desa ini berhawa sejuk.

Jumlah curah hujan di desa ini  $\pm$  200–3000 mm/tahun, sedangkan danau, rawa, pantai, dan laut tak terdapat di desa ini. Di Desa Karang Anyar ini terdapat sawah (6 ha), perkebunan (14 ha), kebun campuran (5 ha), dan pekarangan rumah (5 ha).

Hutan boleh dikatakan tidak ada lagi di desa ini, yang ada hanya sebagian kecil semak belukar, sedangkan jenis binatang yang ada antara lain babi, kera, ular, biawak dan beberapa jenis burung.

Jumlah penduduk Desa Karang Anyar pada waktu itu kurang-lebih 700 jiwa, dengan rincian menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut. Penduduk berumur antara 0–7 tahun sebanyak 75 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, 8–12 tahun sebanyak 50 orang laki-laki dan 80 orang perempuan, 13–17 tahun sebanyak 45 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, dan 17 tahun ke atas sebanyak 20 orang laki-laki dan 150 orang perempuan.

Desa Karang Anyar sampai tahun 1945 masih termasuk wilayah Pasar Curup yang dikepalai oleh seorang pemangku. Desa ini dibangun oleh seorang bernama Sanisngat. Sanisngat adalah kepala kampung yang pertama (1945 – 1962).

Pada waktu itu penduduk desa Karang Anyar sebagian besar terdiri atas penduduk yang berasal dari tanah Jawa, termasuklah Sanisngat, seorang penduduk yang berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah yang bernama Karang Anyar. Karena Sanisngat sebagai orang tua dan sesepuh desa pada waktu itu maka disebutkanlah desa ini desa Karang Anyar.

### 2.8.2 Pendidikan

Pada waktu sebelum Pelita keadaan pendidikan di desa ini masih suram sekali. Sekolah Rakyat Pemerintah yang ada hanya satu, yaitu SR I yang berdiri kira-kira tahun 1958. Karena

bangunan rumah sekolah itu sudah tidak memenuhi syarat, sehingga bangunan sekolah tersebut roboh akibat angin kencang pada tahun 1962. Rumah sekolah tersebut lalu dipindahkan ke Duku Ilir. Sekolah kejuruan belum ada. Sekolah swasta yang ada ialah Sekolah Muhammadiyah yang dibangun atas swadaya masyarakat. Di desa ini tidak ada penduduk lulusan SLTA, yang ada hanyalah tamatan SD sebanyak 20 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, serta tamatan SMP sebanyak 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Keadaan sarana Fasilitas dan Ketenagaan Guru pada masing-masing Lembaga Pendidikan sangat kurang. Gedung Sekolah Rakyat dibangun oleh pemerintah atas bantuan masyarakat setempat, dengan bahan bangunan sebagai berikut: Dinding sekolah terbuat dari papan. Atapnya terbuat dari kayu (atap sirap), sedangkan lantainya masih tanah. Dengan jumlah murid sebanyak  $\pm$  300 orang.

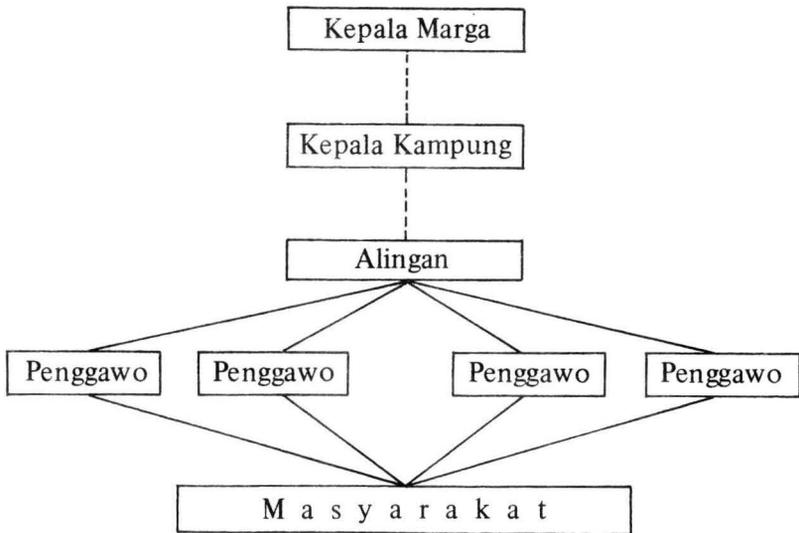
Tenaga guru masih kurang sekali karena guru yang ada hanya berjumlah empat orang, termasuk guru agama. Menurut cerita penduduk setempat seseorang yang telah berjasa menangani sekolah tersebut ialah lazim yang menjabat sebagai Kepala sekolahnya. Ia telah berdinis selama lebih dari 30 tahun, dan sekarang telah pensiun.

Gedung Sekolah Muhammadiyah masih sangat sederhana sekali, sedangkan gurunya masih terdiri guru-guru honor. Pemerintah melalui Departemen P dan K membantu keuangan untuk sarana dan fasilitas pendidikan. Masyarakat membantu keuangan dengan membantu alat-alat bangunan, misalnya papan, senti dan lain-lain. Administrasi pendidikan masih sederhana sekali dan cukup dikerjakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

### *2.8.3 Struktur Pemerintahan*

Desa ialah suatu tempat yang didiami oleh sekelompok penduduk yang tinggal secara menetap dan terdiri dari kepala-kepala keluarga yang mempunyai satu orang pimpinan/kepala

untuk mengurus kepentingan masyarakat dalam desanya. Struktur organisasi pemerintahan desa dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada bagan berikut.



Menurut keterangan yang diperoleh dari bekas Kepala Kampung Karang Anyar pada waktu itu Dasar Hukum pembentukan Pemerintahan Desa masih sangat kabur, sehingga sukar untuk memberikan jawaban secara pasti. Kepala Desa waktu itu langsung dipilih oleh rakyat setempat lalu diajukan dan kemudian dilantik oleh Asisten Wedana/Bupati.

Program Pemerintahan Desa ialah menjalankan perintah dari atasan menyalurkannya kepada rakyat yang dipimpinnya dan melayani atau mengatasi kepentingan penduduk baik dalam persengketaan maupun administrasi. Adapun tujuan Pemerintah Desa pada umumnya ialah membangun desa yang dipimpinnya menjadi desa yang aman, tenteram dan makmur.

Tugas kewenangan pemerintaah desa adalah sebagai berikut.

- (a) kepala desa mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri,

- (b) menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya,
- (c) melayani masyarakat dalam hal-hal surat-surat keterangan, dan,
- (d) mengatasi masalah yang sedang dihadapi penduduknya.

Kepala desa berhak menagih pajak jiwa dan berhak mengatur dan mengkoordinasi penduduk di dalam wilayahnya. Kepala desa berkewajiban pula memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada atasan mengenai hal-hal yang telah digariskannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Hak, wewenang dan kewaiban-kewajiban unsur-unsur pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- (a) penggawa berhak menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh kepala desa dan berkewajiban mempertanggungjawabkan dengan tugas yang telah dipikulkan kepadanya.
- (b) khatib mempunyai hak dan wewenang yang telah diberikan oleh kepala desa dalam menangani urusan agama.

Administrasi Pemerintahan Desa pada waktu itu masih sangat sederhana. Mesin tik yang dalam hal ini untuk menunjang administrasi pemerintahan belum ada, catatan-catatan dan surat-surat ditulis dengan tangan. Catatan-catatan yang ada antara lain: buku jiwa, buku kelahiran dan kematian, buku hak milik, buku keterangan pindah dan buku belasting. Sedangkan kantornya masih menumpang di rumah Kepala Desa. Alat-alat administrasi disediakan sendiri oleh Pemerintahan Desa.

#### *2.8.4 Cara pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa*

Syarat untuk menjadi kepala desa pada waktu itu tidak banyak, yang penting ialah seseorang itu harus berwibawa, jujur, cakap, dan tidak buta huruf. Prosedur pemilihannya ditentukan menurut suara terbanyak lalu diusulkan kepada kepala marga yang selanjutnya diangkat oleh bupati. Pengangkatan dan pelantikan perangkat pemerintahan desa dilaksanakan oleh asisten wedana atas nama bupati

Susunan tugas yang kewajiban masing-masing pimpinan pemerintahan desa adalah sebagai berikut.

- (a) kepala desa adalah pemerintahan desa yang menjalankan pemerintahan berdasarkan perintah dari kepala marga,
- (b) imam/khatib adalah pembantu dari kepala desa yang menaangani dalam bidang agama dan sebagai pegawai sarak/P3NTR,
- (c) penggawa adalah pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

#### *2.8.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Yang non-Pemerintah*

Tua adat adalah seseorang yang membantu Kepala Desa mengenai adat-istiadat karena orang ini sangat ahli dalam hal adat istiadat dan mempunyai peranan dalam masyarakat. Ketua Dusun di desa ini adalah tempat orang menanyakan sesuatu karena dianggap orang yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang cukup luas. Tua Agama sangat dihormati oleh masyarakat karena tempat penduduk menanyakan masalah agama dan pemimpin pengajian.

#### *2.8.6 Organisasi Politik dan non-Politik*

Organisasi politik tidak ada di desa ini, yang ada hanya organisasi non politik antara lain Muhammadiyah. Kegiatan dari organisasi ini hanya di bidang pendidikan, sosial dan agama. Di bidang pendidikan mereka telah membangun sekolah Muhammadiyah.

#### *2.8.7 Perekonomian Masyarakat Pedesaan*

Sebagian penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini banyak menghasilkan padi, jagung, kacang-kacangan, dan palawija. Karena banyak sungai yang mengalir di desa ini, maka pemerintah telah membangun irigasi baik irigasi persawahan di desa ini maupun untuk desa lain.

Selain bertani, sebagian kecil penduduk yang berdagang kecil-kecilan, dan menjadi buruh bangunan maupun buruh lain. Persentasi mata pencaharian penduduk di desa ini, pertanian (50%), perburuhan (20%), perdagangan (10%), peternakan (5%), dan perikanan (5%).

Jenis peralatan tradisional antara lain arit, cangkul, parang, bajak, garus, ceker, dan lain-lain, sedangkan peralatan yang modern belum ada. Tenaga yang dipakai ialah : tenaga manusia, dan tenaga hewan. Sumber pembiayaan didapat dari petani-petani itu sendiri. Sistem dan tehnik cara mengerjakan masih memakai tehnik yang tradisional dan turun temurun.

Sikap mental penduduk boleh dikatakan baik mereka mau bekerjasama dan bergotong-royong membangun desa, tolong menolong dalam musibah dan perayaan atau selamatan.

Karena letak desa ini tidak berapa jauh dari pasar, maka pengaruh dan perubahan selalu terjadi walaupun tidak menyolok. Semakin lama semakin banyak penduduk yang datang menetap di desa ini antara lain dari Padang, Jawa, Rejang dan lain-lain. Akibat dari pecampuran ini mereka dapat saling menerima dan memberi misalnya, suasana dalam upacara perkawinan, unsur-unsur berbahasa daerah, dan lain-lain.

Perlengkapan rumah tangga penduduk pada masa itu masih sangat sederhana, antara lain kursi rotan, tempat tidur, lemari dan alat dapur ala kadarnya. Sedangkan radio pada masa itu masih merupakan barang lux, hanya terdapat pada beberapa buah rumah saja. Untuk mengambil air minum penduduk menggunakan timba yang pakai derek.

Perumahan penduduk masih sederhana. Dinding terbuat dari papan dengan atap seng. Kebanyakan mereka membuat rumah tinggi, tetapi masih banyak penduduk yang membangun rumahnya dari bambu/pelupuh dengan atap dari rumbia, dengan alat-alat rumah tangga seperlunya.

Keadaan jalur komunikasi dan alat transportasi (panjang/jenis jalan, jenis alat transportasi) sirkulasi penduduk dan pemukiman baru dikemukakan sebagai berikut.

Di desa ini hanya ada satu jalur jalan yang sudah diperkeras tapi belum diaspal. Panjangnya kira-kira 1,5 km. Sedangkan jalan-jalan yang lain masih merupakan jalan kecil/jalan setapak dan jalan untuk jenis gerobak bobot. Jalan kecil ini untuk mencapai desa Tasik Malaya dan desa Duku Ilir. Di sepanjang jalan ini banyak terdapat jembatan yang masih bersifat darurat dan belum dapat dilalui oleh mobil.

Oleh karena jalan-jalan yang menghubungkan desa ini dengan pasar belum dapat dilalui oleh mobil, sehingga penduduk yang hendak menjual hasil buminya harus berjalan kaki dengan membawa barang dagangannya itu.

Ada juga beban itu dibawa dengan gerobak bobot. Bobot ialah suatu alat transportasi yang masih sederhana sekali. Gerobak kecil tidak beroda dan ditarik oleh kerbau, inilah yang namanya bobot. Selain bobot ada juga penduduk yang membawa bebannya dengan sepeda.

Penduduk yang baru yang ingin menetap di sini terpaksa mendiami tempat yang letaknya agak jauh dari pasar, dan jauh masuk ke desa. Di Desa Karang Anyar belum mempunyai pasar sendiri. Penduduk yang hendak berbelanja dan berjualan harus pergi ke pasar. Yang dipasarkan ialah hasil-hasil pertanian. Pemasarannya ialah dijual kepada tengkulak-tengkulak dan harganya tidak tetap, sedangkan koperasi belum ada.

Sumber penghasilan Desa dan Kepala Desa berasal dari bantuan masyarakat dan bantuan dari Pemerintah. Sumber penghasilan Kepala Desa secara tetap tidak ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Kepala Kampung tidak digaji oleh Pemerintah. Penduduk yang hendak berurusan dengan Kepala Kampung kadang-kadang harus menunggu lama. Tetapi satu kali dalam satu tahun mereka mendapat bantuan juga dari marga berupa uang sebanyak 35% dari pajak marga.

Usaha kegiatan masyarakat meliputi :

- (a) Gotong royong membangun jalan/desa
- (b) Kegiatan sosial misalnya pengajian/ceramah agama, perkawinan dan lain-lain.

- (c) Perkoperasian belum mendapat perhatian dari masyarakat setempat.
- (d) Penataran-penataran belum ada sama sekali.

### 2.8.8 *Sosial Budaya*

Struktur kehidupan masyarakat di desa ini adalah sama. Tidak ada tingkatan di dalam masyarakat. Tiap penduduk mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di dalam masyarakat. Pola kehidupan sosial tidak begitu menyolok. Memang ada sebagian kecil dari mereka yang hidupnya berkecukupan dan senang, tetapi tidak banyak. Sedangkan sebagian besar dari mereka masih dalam keadaan sederhana sekali.

Adat istiadat penduduk desa ini beraneka ragamnya, karena di desa ini terdiri atas macam-macam suku. Kebiasaannya dan realisasi dalam bentuk kegiatan antara lain bergotong royong mendirikan rumah, mauludan, dan bimbang kejei pada upacara perkawinan bagi orang Rejang. Tingkat perubahan nilai adat-istiadat akibat pengaruh dari luar, boleh dikatakan tidak begitu menyolok dan hampir tidak ada.

Kepala desa sebagai pimpinan dan orang yang dituakan di dalam masyarakat di desanya mempunyai peranan yang sangat penting. Segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat di dalam desa itu harus sepengetahuan kepala Desa, misalnya upacara perkawinan, kematian/kelahiran, pindah, percekocokan antar penduduk desa itu dapat diselesaikan oleh kepala kampung.

Kesenian dan warisan sejarah budaya yang ada di desa ini antara lain kejei, wayang kulit dan kuda kepang. Kejei wayang kulit dan kuda kepang. Kejei ialah suatu tarian adat di daerah Rejang Lebong yang diadakan pada waktu bimbang dalam rangka peralatan perlengkapan upacara tradisional. Acara tersebut biasanya diselenggarakan untuk memeriahkan upacara perkawinan, sunah rasul, dan pelantikan atau penerimaan jabatan kepada marga atau kepala adat.

Bimbang kejei biasanya diselenggarakan antara lima hari sampai 15 hari. Sebelum bimbang kejei dimulai, didirikan dahulu balai adat, yaitu tempat yang dibuat untuk menarikan tari adat tersebut, yang berlangsung menurut hukum adat yang berlaku di tanah Rejang. Penanggungjawab selama bimbang kejei berlangsung ialah tua batin/tua kerja, tua bujang, tua gadis, jakasa pria, dan jaksa wanita. Demikianlah uraian secara singkat mengenai kesenian Kejei warisan sejarah daerah Rejang. Kesenian lain yang ada ialah kesenian Jawa, wayang kulit, ludruk, kuda kepeng dan lain-lain. Tingkat apresiasi budaya masyarakat cukup baik.

Kehidupan keluarga di desa ini boleh dikatakan masih sederhana dan bersahaja, tidak ada yang menyolok karena sebahagian besar penduduknya terdiri atas petani dan buruh. Mereka boleh dikatakan semuanya beragama Islam. Bahasa Indonesia sangat jarang dipakai oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari, yang dipakai adalah bahasa daerah. Jika tidak memakai bahasa daerah penduduk memakai bahasa Melayu dalam pergaulan mereka sehari-hari. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ceramah-ceramah, yang diadakan di kantor-kantor biasanya penduduk berbahasa Indonesia.

Organisasi sosial tidak banyak di desa ini, yang ada hanya organisasi yang bergerak dalam bidang agama, misalnya pada kegiatan ceramah/pengajian dan tablig, musibah pada kematian. Ada juga yang menyediakan alat-alat untuk peralatan.

Di desa ini ada perkumpulan-perkumpulan kesenian antara lain : wayang kulit, kuda kepeng, ludruk dan lain-lain. Olah raga yang sangat digemari penduduk ialah badminton. Untuk menyediakan tempat dan alat-alatnya mereka bergorong-royong, misalnya dalam mengadakan tempat bermain, bola dan raketnya mereka beli sendiri-sendiri.

Kegiatan yang mereka lakukan ialah latihan secara rutin setiap hari dan mengadakan pertandingan-pertandingan dengan klub-klub yang ada di desa lain. Kebanyakan dari mereka itu terdiri dari anak-anak muda.

Satu lagi jenis olah raga yang ada di desa ini menurut cerita dari kepala kampung desa ini ialah *rancai*, yaitu suatu olah raga yang dibauri oleh kesenian yang merupakan tradisi milik orang dari suku Minang. Kegiatannya ialah latihan secara rutin setiap Minggu dan mempertunjukkannya pada waktu peralatan-peralatan.

Puskesmas atau prasarana lainnya untuk kesehatan belum ada. Mereka yang hendak berobat harus pergi ke Rumah Sakit Umum di depan lapangan Setia Negara di Curup. Pada waktu itu penduduk masih banyak berobat pada dukun-dukun kampung. Air bersih mereka dapatkan dari pancuran (mata air) atau pada sumur, karena air pipa (ledeng) belum ada. Kakus yang mereka buat di daratan belum memenuhi syarat kesehatan. Karena desa ini banyak sungai maka banyak juga penduduk yang buang air di sungai.

Keluarga berencana belum ada (belum dapat bantuan dan bimbingan dari Pemerintah). Walaupun ada juga penduduk yang memakai obat-obat tradisional untuk menjarangkan anak.

Organisasi-organisasi kepemudaan tidak ada. Pemuda-pemuda di desa ini hanya bergerak jika hendak gotong royong, atau olahraga.

## **2.9 Desa Pensiunan**

### **2.9.1 Lingkungan Alam dan Penduduk**

Desa Pensiunan yang termasuk dalam Wilayah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah sungai, yaitu sungai Musi dan sungai Sempiang; desa ini juga terletak di persimpangan jalan antara Curup ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu ibukota Propinsi Bengkulu serta Pagar Alam kota produsen kopi di Sumatera bagian Selatan.

Desa Pensiunan terletak di atas tanah dataran yang luasnya  $\pm 150$  ha, terdiri atas tanah pekarangan, tanah pertanian/sawah dan tanah pekuburan. Kampung Pensiunan dengan pasarnya menambah kebanggaan masyarakat sebagai tempat berusaha

dan berniaga untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari. Batas-batas Kampung Pensiunan, sebelah utara –Dusun Kampung Bogor, sebelah selatan–Dusun Tebat Mono, sebelah timur–Dusun Pasar Tengah, dan sebelah barat–Dusun Kepahyang.

Kampung Pensiunan berhawa sejuk dengan curah hujan cukup banyak, kampung ini terletak di sebuah dataran yang membentang dari utara ke selatan. Lahan di sini kurang sekali, dapat dikatakan 95% terdiri atas tempat pemukiman penduduk atau perumahan tempat tinggal.

Jenis flora yang tumbuh di daerah ini tidak banyak karena sudah banyak ditebang penduduk untuk tempat perumahan atau tempat berusaha di bidang pertanian; yang tidak hanya ada beberapa batang pohon beringin, bunga bangkai, karet merah, pisang hutan, lamtoro dan bermacam-macam jenis rerumputan yang terdapat di hutan dan semak belukar seperti alang-alang, kembang, putri malu dan lain-lain. Jenis faunanya terdiri atas babi hutan, ular, tikus, biawak, kera, dan berbagai jenis unggas antara lain burung balam, kutilang, murai, cangkeruak, burung pipit, puyuh, bangau, dan lain-lain.

Penduduk Pensiunan berjumlah 2410 jiwa yang meliputi (a) kelompok pemangku pensiunan muka 1350 jiwa dan , (b) kelompok pemangku Pensiunan belakang 1060 jiwa. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Desa Pemangku adalah sebagai berikut : Penduduk berumur antara 0--7 tahun sebanyak 124 orang laki-laki dan 130 orang perempuan, 8--12 tahun sebanyak 181 orang laki-laki dan 210 orang perempuan, 13--25 tahun sebanyak 293 orang laki-laki dan 280 orang perempuan, 26--35 tahun sebanyak 310 orang laki-laki dan 200 orang perempuan, 36--50 tahun sebanyak 1960 orang laki-laki dan 180 orang perempuan, dan 50 tahun ke atas sebanyak 218 orang laki-laki dan 188 perempuan.

- Desa Pensiunan tanahnya subur serta dilewati oleh sereng (irigasi) persawahan ke Padang Lekat. Di desa ini juga ada sebuah pasar, yaitu pasar Kepahyang dengan hari pasarnya

pada hari Minggu. Secara garis besar sumber mata pencaharian penduduk desa ini dapat dibedakan menjadi tani dagang 30%, tani buruh 10%, petani 19%, dan buruh 25%, selebihnya pegawai negeri dan ABRI.

Taraf pendidikan penduduk desa ini tercatat tingkat SD/ sederajat sebanyak 350 orang, tingkat SLP sebanyak 80 orang, tingkat SLA sebanyak 20 orang, dan tingkat Sarjana sebanyak 3 orang, serta selebihnya buta huruf atau tidak tamat SD.

Desa Pensiunan berasal dari kata *pensiun* yang berarti tempat atau lokasi pengumpulan orang-orang dari serdadu Kompeni dan pegawai pemerintah Belanda yang telah mendapat hak pensiun. Mereka ini juga terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, antara lain suku Ambon, suku Manado, dan sebagian besar suku Jawa.

Oleh karena letak dan kesuburan tanahnya cukup menguntungkan, maka desa ini berkembang dengan baik dan menjadilah suatu kampung yang dinamakan kampung Pensiunan.

Satu butir sejarah perjuangan kemerdekaan yang tak dapat dilupakan dan terjadi di desa Pensiunan Kecamatan Kepahyang ini, ialah peristiwa perjuangan perebutan senjata pimpinan Letnan Kolonel Santoso terhadap pasukan Jepang pada tanggal 22 Nopember 1945. Peristiwa ini mengakibatkan korban kedua belah pihak, dan yang sangat disesalkan gugurnya pahlawan Letnan Kolonel Santoso yang terpuji keberaniannya itu.

### 2.9.2 Pendidikan

Di Desa Pensiunan ini tidak ada Sekolah Rakyat satu pun kecuali di Desa Pasar Tengah. Karena itu anak-anak di desa ini kemudian bersekolah di Desa Pasar Tengah tersebut. Pada tahun tigapuluhan komplek sekolah Rakyat ini memang termasuk ke dalam areal Desa Pensiunan. Sekolah menengah yang ada adalah SMP partikuler bangunan swadaya masyarakat

tahun 1957 yang terletak di belakang Pasar Kepahyang. Sebagai pendirian SMP partikelir ini antara lain Kepala Kampung Zakaria, datuk Jamaluddin (alm) dan Camat Kecamatan Kepahyang. Pada tahun 1958 dibangun pula STN partikelir (Swasta) dengan jumlah murid  $\pm$  100 orang. Pelopor pendirian STN ini adalah : Syamsuddin Caniago, Muryadi dan Kepala Kampung Zakaria.

Pendidikan agama khusus belum ada, kecuali sekedar penyampaian dakwah yang disampaikan di mesjid-mesjid dan langgar-langgar. Pada tahun 1940 di desa Pensiunan didirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah oleh organisasi Muhammadiyah, kemudian atas usaha organisasi ini pula didirikan Taman Kanak-kanak Aisyiah. Keadaan sarana fasilitas dan ketenagaan guru pada masing-masing lembaga belum memadai.

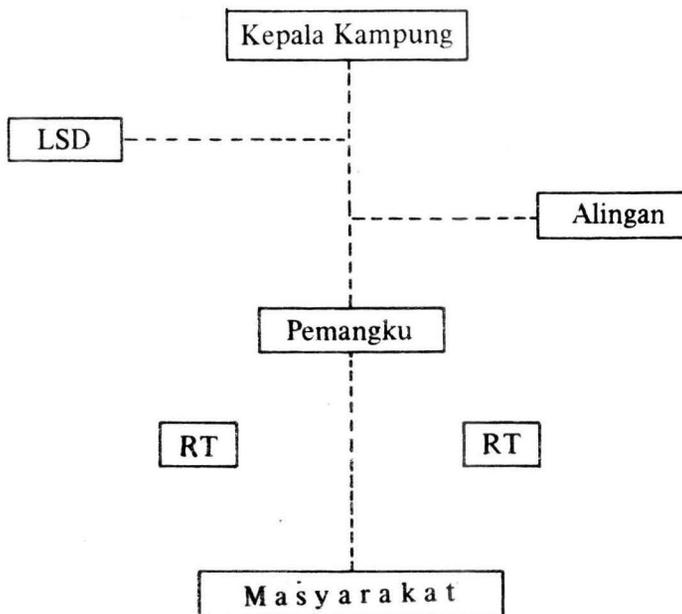
Usaha keuangan dan pembiayaan pendidikan masih terbatas sekali oleh karena itulah ada diantara sekolah yang bubar setengah jalan (STN). Usaha-usaha keuangan ini berasal dari masyarakat/organisasi masyarakat, Pemerintah, sumbangan orang tua murid, dan sumbangan lain-lain (seperti dari PU) yang menyumbang drum aspal bekas untuk dinding gedung STN.

Administrasi SR/SMP Partikelir sudah sedikit memadai walaupun dalam keadaan belum memuaskan dan ini pun berkat usaha dan dukungan masyarakat terutama wali murid dan pemerintah. Administrasi TK. Aisyiah, Sekolah Dasar Muhammadiyah dan Sekolah Teknik Negeri masih di dalam serba kekurangan.

### 2.9.3 Struktur Pemerintahan.<sup>24</sup>

Batasan pengertian \*desa/kampung, yaitu adanya suatu areal/tanah/wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu dan dihuni oleh sekelompok penduduk yang tidak kurang dari 40 kepala keluarga dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung/ ginde, berdasarkan atas usul dari masyarakat serta disahkan oleh atasan yang berwenang (asisten wedana/camat). Agar lebih

jelas berikut ini dapat dilihat bagan struktur pemerintahan desa/kampung pada tahun 1950--1965.



Menurut keterangan yang diterima dari kepala kampung yang ke-4 yaitu Zakaria dasar hukum pembentukan desa yang jelas tidak ada. Kepala desa ditunjuk berdasarkan penunjukan langsung dari pejabat yang berwenang pada waktu itu (demang/asisten wedana) dengan persyaratan bahwa yang ditunjuk mempunyai kondite baik. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan sistem pemilihan secara berkelompok. Kelompok mana yang terbanyak jumlah suaranya, berarti calon pada kelompok tersebut berhak diajukan kepada atasannya untuk diangkat dan dilantik.

Kepala desa semata-mata hanya mengendalikan program pemerintah di dalam desanya sesuai dengan apa yang telah digariskan kepada marga.

Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa disesuaikan dengan hak maupun wewenang yang telah digariskan kepala marga, antara lain : tanggungjawab pada atasannya, tanggungjawab pada masyarakat, laporan-laporan, dan lain-lain. Hak, wewenang, dan kewajiban unsur-unsur pimpinan pemerintahan desa lainnya, ialah menjalankan dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, dan ikut serta memikirkan kesejahteraan masyarakat bilamana diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Administrasi pemerintahan desa dapat dikatakan masih sederhana sekali, hanya administrasi yang sangat diperlukan pada waktu itu seperti mengenai jumlah penduduk, Ipeda, buku tamu, laporan-laporan, dan lain-lain.

#### *2.9.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa*

Cara pemilihan pemerintahan desa pada waktu itu dapat dilihat pada keterangan di muka, selain itu pemilihan dilakukan pula dengan cara mengisi tabung calon dengan suara rakyat. Calon yang mendapat suara terbanyak berhak menjadi kepala kampung. Pemimpin desa diangkat dan dilantik oleh asisten wedana/camat atas nama bupati kepala daerah kabupaten.

Adapun susunan dan tugas kewajiban masing-masing pemimpin pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- (a) kepala kampung merangkap kepala adat menangani bidang pemerintahan,
- (b) imam/khotib sebagai pegawai sarak menangani bidang agama/P3NTR, dan
- (c) pemangku /rukun tetangga adalah pembantu kepala kampung dan pegawai syarat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

#### *2.9.5 Kedudukan dan Pimpinan Masyarakat non-Pemerintah*

Pemuka masyarakat, kaum cerdik pandai, dan ketua suku membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya

diperlukan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat kepentingan golongan/ suku masing-masing.

### 2.9.6 *Organisasi Politik dan non-Politik*

Organisasi politik yang ada di desa ini PSII (4%), NU (7%), PNI (19%), Parkindo (3%), Murba (1½%), PI Perti (12%), dan IPKI (3%). Organisasi non politik meliputi tugas sebagai berikut :

- (a) bidang sosial, yang mengurus hal-hal kematian, peralatan, dan pendidikan anak-anak,
- (b) bidang agama, yang mengurus pengajian dan pendidikan agama, dan
- (c) bidang kepemudaan, terdiri atas organisasi kesenian dan olah raga.

Tujuan dan peranan organisasi tersebut adalah menunjang pelaksanaan program pemerintah dan membantu kegiatan-kegiatan masyarakat serta menanamkan rasa persahabatan dan persaudaraan serta rasa kesatuan/gotong-royong.

### 2.9.7 *Perekonomian Desa*

Karena kesuburan tanahnya dan letaknya yang strategis, maka ekonomi masyarakat berjalan baik dan lancar serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, antara lain : petani dagang (30%), buruh tani (10%), pegawai negeri (15%), petani (19%), ABRI (19%), dan buruh (25%).

Pola pikir masyarakat dapat digolongkan dinamis namun sikap mentalnya masih masa bodoh. Masyarakat sulit untuk dituntun/dibina. Setiap ada kegiatan masyarakat menonton dahulu tetapi bila pemimpinnya betul-betul giat dan ber-sungguh-sungguh, mereka berangsur-angsur mengikuti pula. Hal ini besar kemungkinan sebagai akibat dari pengaruh jajahan yang telah mereka warisi dari orang-orang tua mereka ataupun karena tradisi masing-masing suku berbeda satu sama lainnya. Pengaruh dari luar, hampir-hampir tidak ada, walaupun ada hanya sedikit sekali misalnya di lapangan pergaulan para re-

maja. Isi rumah tangga penduduk sederhana dan jauh dari barang-barang mewah, tetapi cukup untuk keperluan hidup mereka hari-hari. Keadaan perumahan dan penghunian penduduk juga sederhana sekali.

Sarana komunikasi dan transportasi penduduk masih serba sederhana. Jalur jalan terdiri atas : jalan aspal sepanjang 2,03 km, jalan batu 1 km, dan jalan tanah 1,05 km. Alat transportasi terdiri atas : oto, truk, bus, sepeda, dan gerobak.

Di desa ini terdapat pasar yang luasnya  $\pm 40.000 \text{ m}^2$ . Bangunan pasar terdiri atas tiga buah los panjang yang di petak-petak untuk tempat berdagang. Pasar ini adalah bangunan zaman penjajahan Belanda. Bangunan pasar terdiri atas kayu, atap seng, dan lantai semen.

Barang-barang yang meliputi hasil-hasil pertanian seperti kopi, beras, ubi dan hasil palawija lainnya. Hasil industri yang didatangkan oleh pedagang antara lain tekstil dan barang pecah belah. Di samping itu ada pula barang-barang lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Hari pasar adalah Sabtu dan Minggu.

Usaha kegiatan masyarakat dalam menunjang perekonomian desa, diperoleh secara swadaya, gotong royong, sosial, dan lain-lain.

### *2.9.8 Sosial Budaya*

Struktur masyarakat berkelompok menurut suku masing-masing tetapi pola kehidupan sosial penduduk seperti gotong royong sangat kuat. Adati-istiadat jawa di desa ini cukup dominan, hal ini memungkinkan karena kepala adatnya/kepala kampungnya kebanyakan suku bangsa Jawa.

Kebiasaan hidup penduduk berbeda beda menurut kebiasaan dari suku masing-masing. Realisasi dalam bentuk kegiatan, yaitu secara kekeluargaan dan menyatu dengan kegiatan itu. Tingkat perubahan karena sikap mereka yang cenderung masa bodoh seperti yang telah diuraikan terdahulu.

Fungsi kepala desa di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai pemimpin dan pembimbing serta pembina masyarakat atau sebagai kepala adat di dalam desanya. Adapun peranan kepala desa di tengah-tengah masyarakat adalah melayani masyarakat, menjalankan program pemerintahan dan membina serta membimbing organisasi yang ada dalam masyarakat.

Kesenian sebagai warisan budaya terdiri atas pencak silat gaya Minang, dan dzikir adat Palembang. Warisan sejarah berupa sebuah tugu pahlawan kemerdekaan RI di muka Pasar Kepahyang (tugu gugurnya Let. Kol. Santoso).

Kesenian Jawa tampaknya tidak dikembangkan di sini walaupun sebagian besar penduduknya terdiri atas suku bangsa Jawa. Ini akibat dari tenaga teknis pengembangnya tidak ada. Tingkat apresiasi sosial budaya masyarakat masih kurang sekali.

Kehidupan keluarga sehari-hari cukup baik, rukun dan damai serta bersahaja. Penduduk Desa Pensiunan terdiri atas berbagai macam suku bangsa di Indonesia dan menganut bermacam-macam agama/kepercayaan, antara lain Agama Islam ( $\pm 99\%$ ), Agama Kristen ( $\pm 0,9\%$ ) dan lain-lain ( $\pm 0,1\%$ ).

Bahasa Indonesia dan bahasa daerah bercampur-baur menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Bahasa daerah yang dipakai dalam keluarga/rumah tangga terdiri atas bahasa Jawa, Minang, dan Bahasa Rejang. Organisasi sosial di desa ini antara lain bergerak di bidang kematian, pengajian, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Organisasi kesenian yang bergerak di bidang/meliputi kesenian Minang, kesenian Palembang, dan seni musik/orkes. Kegiatan di bidang olah raga meliputi: sepak bola, volly-ball, bulu tangkis, dan pencak silat.

Sarana kesehatan yang telah dibangun oleh pemerintah berupa sebuah rumah sakit yang dipimpin oleh seorang dokter lengkap dengan tenaga medisnya. Pengobatan cukup baik. Air bersih, kakus, dan pembuangan sampah sudah memadai. Keluarga berencana belum ada/masih awam bagi masyarakat.

## CATATAN

1. Wawancara dengan Rasyid Ibrahim (32 th) Pemangku Desa Pasar Bengkulu (1976–1980) tanggal 1 Desember 1981.
2. Hasil wawancara dengan Sech Ramli, bekas Pemangku (sekarang Lurah) Pasar Panorama pada tanggal 24 Desember 1981.
3. Wawancara dengan Bodurima, bekas Pemangku desa Belakang Pondok, dan Abubakar, orang pertama tinggal di desa Belakang Pondok wawancara tanggal 15 dan 16 Pebruari 1982.
4. Hasil wawancara dengan Bodurima, bekas Pemangku Belakang Pondok pada tanggal 15 dan 16 Pebruari 1982.
5. Hasil wawancara dengan Bodurima, bekas Pemangku Belakang Pondok pada tanggal 15 dan 16 Pebruari 1982.
6. Wawancara dengan Z. Abidin (52 tahun) ex Kepala Marga Seluma di Tais tanggal 7 Desember 1981.
7. Wawancara dengan Z. Abidin (52 tahun) ex Kepala Marga Seluma di Tais Tanggal 7 Desember 1981.
8. *Ibid.*
9. Data pada Kantor Kecamatan Talo.
10. Data pada Kantor Marga Semidang Alas.

11. Data pada Kantor Marga Semidang Alas; Struktur sebelum Pelita.
12. Data pada Kantor Marga Semidang Alas.
13. Responden: Mat Alam, pada waktu itu menjabat Kepala Desa Mubai (1958 s/d 1969).
14. Prof. H. Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, hal 108 – 109 Bagian II tentang Pengertian Kutei.
15. Wawancara, Mat Alam diangkat menjadi kepala desa Mubai dengan SK. Bupati Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19-6-1958 No. 32/Des/1958 dengan gelar Depati Pasak Negeri (1958 s/d 1969).
16. Menurut penjelasan Mat Alam: Peraturan Tahun 1958 bekas Ginde desa Mubai.
17. Buku Adat Rejang oleh Prof. H. Abdullah Siddik hal. 102 tentang Pengertian Petulai.
18. Penjelasan Mat Alam (Responden) dan Buku Hukum adat Rejang oleh Prof. H. Abdullah Siddik.
19. Menurut wawancara kami dengan Saudara Irsam petugas dari Direktorat Kesenian Jakarta tanggal 23 Desember 1981.
20. UU Pemerintah tentang Susunan Pemerintahan Desa : UU. No. 4/79.
21. Adat Lembaga Onderafdeeling Lebong, Bab III Fasal 23.
22. Sumber Cahaya Bengkulu, Bab III Fasal Perhukuman.
23. Ibid.
24. Hasil wawancara dengan Zakaria, bekas Kepala Kampung desa tersebut akhir Nopember 1981.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PELITA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

### ***3.1 Desa Pasar Bengkulu***

Landasan pelaksanaan pembangunan di Desa Pasar Bengkulu berdasarkan.

- (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
- (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.
- (3) Perda Kotamadya Dati II Bengkulu No. 05 Tahun 1979, tentang batas-batas Wilayah Keadudukan dan Kepemangkuan dalam Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu,
- (4) DIP Pusat dan daerah Keputusan Presiden tentang pedoman pelaksanaan Pelita, pedoman pelaksanaan Banpres, Inpres, dan lain-lain.
- (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-105 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

Sampai saat ini sudah tiga tahap Pelita yang berlangsung di Desa Pasar Bengkulu.

Selama Pelita I (1969 -- 1974) desa ini telah melaksanakan program pemerintah sebagai berikut.

- (1) Bantuan Bimas dan Inmas terhadap pertanian dan nelayan sepanjang dataran dan air sungai Pasar Bengkulu, berupa kredit Bimas melalui BRI. Bantuan kredit untuk anggota nelayan berupa kredit perahu motor dan peralatannya.
- (2) Bantuan pembangunan desa kepada petani dalam bidang prasarana dan pembangunan sosial/rumah ibadah.

Selama Pelita II (1974 – 1979) desa ini juga telah melaksanakan.

- (1) Melanjutkan pembangunan di bidang pertanian sawah dan perikanan.
- (2) Pembangunan Rumah Jaga (pos keamanan kampung) yang dananya berasal dari Direktorat Pembangunan Desa Kotamadya Bengkulu, sebesar Rp 100.000,00
- (3) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pinggir sungai Pasar Bengkulu, yang disalurkan melalui APBN bangunan pemerintahan pusat.
- (4) Pembangunan perumahan untuk pemindahan penduduk Pasar Bengkulu yang terkena kikisan ombak, di sekitar dermaga ikan dan tempat pelelangan ikan, sebanyak 67 kepala keluarga. Bantuan pembangunan perumahan ini diberikan oleh Depsos dalam bentuk bahan seharga Rp 100.000,00 dan usaha swadaya masyarakat.

Adapun ke dalam Pelita III (1979 1984) desa ini telah melaksanakan:

- (1) Pembangunan Rumah Potong Hewan, dengan dana bantuan Inpres 1980/1981 sebesar Rp 5 000.000,00
- (2) Pembangunan PUSKESMAS Pembantu, dengan dana bantuan Inpres 1980/1981 sebesar Rp 2.650 000,00
- (3) Pembangunan jamban keluarga/WC dan sumur pompa

Dengan melaksanakannya Bimas dan Inmas, sistem bercocok tanam diubah dari satu kali setahun menjadi dua kali setahun . Cara penangkapan ikan secara tradisional berangsur-angsur mulai berubah menjadi nelayan maju yang menggunakan

jaring nilon dan perahu bermotor Peningkatan hasil ikan pun menunjukkan kemajuan menjadi satu sampai dua ton per hari ikan segar dapat ditangkap. Pembelian ikan secara tidak tertib melalui para penyelamatan di tengkulak (*cingkau*) sudah dapat dimantapkan melalui TPI. Bagi nelayan cingkau yang akan menambah modalnya, dapat diusahakan melalui kredit candak-kulak.

Di bidang kesehatan juga mendapat perhatian serius. Kebiasaan masyarakat yang selama ini suka berobat pada dukun atau rumah sakit umum yang jauh letaknya, sekarang berpindah berobat ke Puskesmas yang kecuali dekat lokasinya juga murah biaya pengobatannya.

Kesulitan perumahan penduduk terutama yang terkena kikisan ombak, sudah dapat diatasi melalui pengadaan perumahan rakyat baik melalui Departemen Sosial di pinggir Sungai Pasar Bengkulu maupun oleh Kotamadya Bengkulu di daratan Kuala Lempuing.

Untuk menyejahterakan penduduk pemerintah telah melaksanakan pemasukan aliran listrik ke desa tersebut. Dengan masuknya listrik itu berarti pemerintah di samping membantu masyarakat dalam hal penerangan juga menunjang hal lain seperti kegiatan masyarakat di bidang sosial dan keagamaan.

Faktor penghambat boleh dikatakan tidak ada. Hambatan yang ditemukan hanyakan bersifat alamiah seperti banjir, masuknya air asin ke persawahan, serangan hama tikus, dan babi, dan lain-lain. Hambatan lain yang menyangkut manusianya berupa kemampuan, keterampilan yang terbatas dan kesadaran sikap mental yang belum maju, namun hambatan seperti ini selalu ditanggulangi melalui penerangan, penataran, pembinaan dan latihan melalui instansi instansi terkait.

Di bidang pemerintahan desa, juga telah dapat dipetik hasilnya kecuali berupa pengenalan akan struktur baru seperti yang diuraikan dalam UU No. 5 Tahun 1979, juga di daerah itu telah dibangun Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Bagi kaum ibu disediakan wadah

PKK, dan bagi generasi muda disediakan wadah organisasi Karang Taruna, yang kesemuanya adalah suatu usaha untuk membantu pemerintah desa (sekarang sudah menjadi kelurahan) dalam menyelesaikan programnya.

### **3.2 *Desa Panorama***

Pembangunan Lima Tahun di Desa Panorama sangat besar arti dan pengaruhnya. Pembangunan Lima Tahun menghidupkan pertumbuhan perekonomian dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Dengan berlangsungnya proyek-proyek pembangunan baik dengan biaya APBN maupun APBD seperti jenis-jenis pembangunan, maka terbukalah jalan ekonomi, jalan lingkungan antar pasar, daerah konsumen dengan daerah produsen, antar kampung tempat penghunian masyarakat, dan terungkaplah cita-cita keinginan dan kesulitan masyarakat dalam hubungan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui persekolahan, pendidikan masyarakat, kursus serta penataran. Kesegaran hidup dan aktifitas masyarakat semakin tumbuh, kepercayaan kepada pemerintahan Orde Baru semakin tinggi, sebab keberhasilan pembangunan benar-benar sudah dirasakan nikmatnya oleh penduduk Desa Panorama. Rakyat desa yang lama terlena, kini mulai saling berlomba mengejar begitu cepat lajunya pembangunan dan modernisasi.

Di bidang pemerintahan desa, masyarakat harus pula menyesuaikan diri dengan kondisi yang akan dan sedang berkembang. Sistem pemerintahan Kepemangkuan dan Datuk Wilayah sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan iklim perkembangan zaman. Kemantapan dan kestabilan pemerintahan yang menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam hubungan dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sudah pada gilirannya untuk direalisasikan.

Struktur Pemerintahan Desa gaya lama, di mana Datuk Wilayah dan pemangku serta Pemangku Muda desa yang bersangkutan serta menduduki jabatannya karena pilihan anggota masyarakat dan ditunjuk oleh pemerintah Tingkat Kotamadya setempat, maka berdasarkan hasil Undang-Undang RI No. 5 tahun

1979, diaturlah struktur, perangkat dan tugas-tugas dari Staf pemerintahan desa.

Pemerintahan kelurahan ini selanjutnya menggantikan sistem pemerintahan desa gaya lama. Sejak tanggal 17 Desember 1981 secara serentak di desa-desa bekas kepemangkuan wilayah Kotamadya Bengkulu, diresmikan statusnya menjadi kelurahan. Pemimpin kelurahan yang bergelar Lurah (secara kebetulan bekas pemangku lama), sekretaris kelurahan dan beberapa kepala urusan diangkat sebagai Pegawai Negeri dengan tugas pada pemerintahan kelurahan Desa Panorama.

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah, seperti tua-tua pasar, tua-tua adat, pada alim ulama, dan pimpinan kelompok profesi lainnya, tidak berubah, dalam arti tetap sebagai *partner* pimpinan pemerintahan desa dalam kegiatan pembangunan fisik atau pun pembangunan spiritual.

Keadaan organisasi politik dan non-politik berkembang sesuai dengan bidang sasaran dan tujuannya. Organisasi politik, sebagai lembaga dalam kehidupan berdemokrasi, tumbuh dan berkembang secara wajar. Kelompok organisasi politik yang hidup dan berkembang menurut urutannya adalah Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Organisasi non-politik seperti organisasi kesenian, kelompok pengajian, rukun tani, Karang Taruna, dan lain-lain juga berkembang tanpa hambatan sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Panaroma.

### ***3.3 Desa Belakang Pondok***

Sesuai dengan dasar dari tujuan negara yang terdapat di dalam Pancasila, UUD 1945 dan Garis garis Besar Haluan Negara dalam rangka ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya dalam program pembangunan yang adil dan merata, pemerintah mengusulkan pembangunan di mana-mana, juga di desa Belakang Pondok.

Dengan berubahnya daerah bekas Kresidenan Bengkulu menjadi Daerah Tk II Propinsi Bengkulu tanggal 18 Nopember 1968, maka Kota Bengkulu sebagai ibu kota propinsi baru itu merasa di tuntut untuk mendapat perluasan areal dan pembangunannya. Dalam kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan pembangunan, prioritas ditujukan ke lokasi arah selatan karena tanah bagian selatan Kota Bengkulu, merupakan tanah daratan yang keras (bukan rawa) yang baik untuk pembangunan. Desa Belakang Pondok yang termasuk dalam wilayah dan kategori tersebut, merupakan salah satu sasaran utama wilayah pembangunan.

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pelita dan pembangunan lain, dengan dana baik sektoral regional /daerah Inpres, maupun dana-dana lain, pemerintah melaksanakan pembangunan di Desa Belakang Pondok dan sekitarnya, misalnya pembangunan pasar Inpres (500 meter dari Pekan Minggu lama, yang dihancurkan), pembangunan terminal bis/taksi kota, pembuatan dan pengaspalan jalan (2½ km), pembangunan kantor-kantor pemerintah, pembangunan mesjid pembangunan satu unit SD Inpres, pelistrikan, sumur dan pompa, kantor Datuk Wilayah, Puskesmas, dan sarana pemadam kebakaran.

Bersamaan dengan pembangunan pemerintah ini, rakyat pun secara swadaya dan bergotong-royong membangun sarana-sarana yang diperlukan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Jenis-jenis pembangunan rakyat tersebut adalah. pertokoan, penginapan, perumahan, jalan kampung dan lain sebagainya.

Dengan lahirnya wajah baru pada Desa Belakang Pondok tahun 1973 itu, status desa itu benar-benar meningkat menjadi Desa Swasembada, bahkan merupakan pusat kegiatan perekonomian dan bagian sarana perkotaan. Seiring dengan itu meningkat pula jumlah penduduk, kesibukan dengan segala permasalahannya, sehingga sarana fasilitas dan organisasi pemerintahan daerah perlu ditingkatkan.

Menurut statistik tahun 1981 jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Belakang Pondok berjumlah 1734 orang atau 815 kepala keluarga, dengan kondisi mata penghidupan: berdagang (605), pegawai Negeri (30%), dan buruh harian/pertukangan (10%),

Di sekitar atau di luar desa itu, telah dibangun pula sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, sebuah stadion olah raga, dan menara TV. Dalam hubungan pengembangan kota ini tercatat pula pengembangan pendidikan formal penduduk desa tersebut, yaitu : tingkat SD/ sederajat (500 orang), tingkat SMTP (150 orang), tingkat SMTA (100 orang), dan tingkat sarjana/sarjana muda (53 orang).

Pelaksanaan Pelita berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Seluruh rakyat mendukung dan menunjukkan partisipasinya. Sebagian bersedia meninggalkan rumah dan halaman tempat tinggalnya, mengizinkan penggusuran tanah pekuburan, segala sesuatu demi untuk pembangunan yang dirasakan lebih banyak manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.

Hasil-hasil yang diperoleh akibat pembangunan itu benar-benar dirasakan nikmatnya bagi rakyat terutama bagi Desa Belakang Pondok. Keadaan kehidupannya mulai meningkat di segala bidang. Desa Belakang Pondok seakan-akan ditiup menjadi pusat lingkungan hidup masyarakat kedua, setelah komplek pasar Ikan dan Kampung Cina, di daerah perkotaan lama.

Di bidang pemerintahan Desa, secara bertahap telah diadakan pembaharuan dengan pengisian formasi pada Staf Datuk Wilayah IV dan melengkapi unit-unit pembantu seperti sataf kepemangkuhan, staf keamanan dan Hansip kampung. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula kordinasi dengan Pemerintah kotamadya Bengkulu, sebagai salah satu daerah sasaran ekonomi dan pembangunannya. Sementara itu telah diujjahi pula pentrapan UU RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang realisasinya baru dilaksanakan sejak tanggal 17 Desember 1981.

### **3.4 Desa Padang Sialang**

Landasan-landasan pelaksanaan Pelita di desa tersebut adalah semua peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan Pelita yang berlaku, seperti keputusan presiden, keputusan menteri dan dirjen yang bersangkutan, serta pedoman lain yang berlaku.

Di sektor pendidikan telah dibangun gedung-gedung dari SD sampai ke SLA, yaitu :

- (1) Sebuah SD Inpres di lokasi SD Nomor 2 dan 7 di Jalan Pamah Suki, sebagai tambahan gedung untuk SD yang sudah ada. Dengan berdirinya SD Inpres ini anak-anak dapat belajar pada pagi hari semua. Tak ada anak umur sekolah yang tak tertampung di desa Padang Sialang ini. Jumlah guru dicukupi dan sarana lain dilengkapi.
- (2) Gedung baru untuk SMP Negeri di Jalan Pamah Suki meliputi belasan lokal, lengkap dengan guru dan laboratoriumnya.
- (3) Tambahan lokal untuk SMEA Negeri lengkap dengan mebelernya di Jalan Kemas Djamiluddin Desa Padang Sialang.
- (4) SMA Negeri tak juga ketinggalan mendapat sasaran Pelita ini.

Belasan ruang belajar dibangun, laboratorium dan perpustakaan dilengkapi. Guru-guru didatangkan dari daerah lain. Inilah gambaran sepintas lalu sarana pendidikan yang ada di desa Padang Sialang.

Di sektor perhubungan, ada tiga jalur jalan di desa ini yang selesai diaspal, yaitu Jalan Mulkam Naum, Jalan Kemas Djamiluddin dan Jalan Pamah Suki. Selain itu dilaksanakan pula pengerasan jalan Setia Budi dan Jalan Inspektur Awaluddin dan pembuatan gorong-gorong yang berada di sepanjang jalan yang ada di Padang Sialang.

Dengan program listrik masuk desa, maka desa Padang Sialang telah menjadi terang benderang di malam hari. Se-

lain itu kebutuhan warga desa yang lain seperti pesawat TV, AC, kulkas dan kegiatan industri rumah tangga, perusahaan es lilin, keriting rambut, las listrik dan lain-lain dapat terpenuhi.

Dibukanya kesempatan mendapat kredit dari Pemerintah untuk menambah modal bagi warga desa, seperti KIK dan KMKP, dapat memperluas usaha rakyat di bidang pengangkutan (mobil penumpang), perikanan (kapal motor ikan) dan industri kecil (pabrik batu bata), industri rumah tangga (bengkel mobil, penggilingan kopi, pamarut kelapa) dan sebagainya. Sehubungan dengan itu akan membuka lapangan dan kesempatan kerja bagi warga desa yang lain.

Dari sekian proyek Pelita yang dibangun di desa atau sekitar Desa Padang Sialang itu, dapatlah disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh, sebagai berikut.

- (1) Pembangunan di bidang pendidikan dapat mengatasi sejumlah murid usia sekolah, dan selanjutnya arus siswa yang ingin mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, yang selama ini belum dapat diatasi. Dengan pemerataan pembangunan dan penyebaran sarana pendidikan hingga ke pelosok-pelosok desa, berarti meringankan beban orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya ke tempat lain.
- (2) Pembangunan sarana komunikasi dan jalan ke desa-desa serta peningkatan jumlah alat transportasi yang bergerak dibidang angkutan, memperlancar jalannya roda perekonomian, tersalurnya kebutuhan rakyat lebih cepat, dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan lebih cepat pula dapat diterima atau diketahui.
- (3) Pembangunan di bidang pertanian seperti usaha perluasan areal sawah, pembangunan sering irigasi, penyemprotan hama, pemupukan tanah dan lain sebagainya, bukan saja memberi gairah untuk mengundang para petani bekerja lebih rajin, tetapi dapat pula meningkatkan hasil pertanian tersebut.
- (4) Pembangunan, pembaharuan sistem pemerintahan desa, menunjukkan usaha peningkatan koordinasi kerja dan pem-

binaan ketertiban dan keamanan desa yang baik berdaya guna dan berhasil guna. Kesemuanya membuka kesempatan kerja dan memperluas usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa semua, dan sekaligus akan meningkatkan taraf hidup warga desa Padang Sialang tersebut.

Produksi pangan ditingkatkan dengan adanya program Bimas, dan Inmas melalui KUD. Kelompok-kelompok tani terbentuk organisasi sebagai wadah para warga desa untuk bermusyawarah meningkatkan usaha di bidang pertanian. Karang Taruna dibina untuk meningkatkan keterampilan para remaja. Kaum ibu diminta juga untuk turut berpartisipasi secara aktif melalui PKK dan P2W dan kursus-kursus lainnya. Semua warga desa diberi pengertian tentang manfaatnya program Keluarga Berencana dan anak balita dibina perkembangannya. Penyakit menular diberantas. Jamban-jamban keluarga dibangun untuk kesehatan penduduk. Sarana angkutan diperbanyak dengan adanya taxi kota, bus-bus umum dan kendaraan lain, yang lebih efektif dari pada gerobak yang ditarik dengan sapi.

Di bidang pemerintahan desa terdapat perubahan-perubahan yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 dan peraturan pemerintah lainnya.

Yang jelas pada struktur pemerintahan desa sekarang seluruh perangkat desa diangkat dengan dasar suatu surat keputusan, dan statusnya sebagai pegawai negeri.

Satu-satunya faktor penghambat jalannya Pelita di desa ini ialah kurangnya tenaga kerja, apalagi tenaga kerja yang berpredikat ahli dan trampil. Faktor-faktor penunjang banyak sekali. Di antaranya jiwa rakyat yang suka bergotong-royong, dan idak fanatik serta gandrung akan pembaharuan atau pembangunan.

### ***3.5 Desa Padang Genting***

Landasan-landasan pelaksanaan Pelita, didasarkan pada pedoman pelaksanaan Pelita, seperti : Keputusan Presiden dan

pedoman-pedoman resmi lainnya. Pada tahun 1974 oleh Bapak Bupati/Kepala Daerah Bengkulu Selatan, dalam rangka pemekaran desa untuk Kecamatan Seluma, Desa Padang Genting diperluas dengan desa Tangga Baru yang jumlah penduduknya ± 92 kepala keluarga.

Pelaksanaan Pelita dari Bangdes didapati berupa pembuatan jalan-jalan di desa. Selain itu dibangun pula sarana fisik berupa gedung sekolah, Puskesmas, siring irigasi, dan lokasi transmigrasi. Hasil-hasil yang didapat desa ini selama Pelaksanaan Pelita adalah satu unit gedung SD Inpres di desa Padang Genting, satu unit SD Inpres di desa Tangga Baru, satu buah rumah sakit pembantu (Puskesmas), satu buah gedung SD Negeri, yaitu pengganti SD lama yang sudah lama bangunannya roboh, siring irigasi air Seluma, transmigrasi Rimbo Keduai, dan perbaikan dan pembuatan jalan baru. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelita di desa ini tidak ada. Setiap pembangunan disambut dengan rasa gembira.

### ***3.6 Desa Semidang Alas (Fajar Bulan)***

Pembangunan lima tahun di daerah adalah pembangunan Nasional sebagai realisasi pelaksanaan tap MPR Nomor IV/MPR/1978. Pada hakikatnya pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, karena itu landasan pelaksanaannya ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain dari itu tentu tak dapat dilepaskan UU RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pelita.

Pembangunan lima tahun dilaksanakan setahap demi setahap. Pembangunan lima tahun dilaksanakan oleh rakyat dengan dana bantuan desa (Inpres desa), bantuan daerah tingkat I, bantuan daerah tingkat II, bantuan presiden, dan swadaya masyarakat.

Sejak tahun 1969 sampai tahun 1977/1978, Desa Semidang Alas telah mendapat bantuan pemerintah berupa bantuan desa

atau Inpres desa. Bantuan pusat sebesar Rp 28.150.000,00, bantuan daerah tingkat I sebesar Rp 1.300.000,00, bantuan daerah Tingkat II sebesar Rp 1.416.000,00 dan swadaya masyarakat sebesar Rp 24.163.100,00, jumlah Rp 55.029.100,00. Dana bantuan tersebut telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sarana/prasarana produksi sebanyak 15 proyek, sarana/prasarana perhubungan 25 proyek, pemasaran 1 proyek, dan sarana/prasarana sosial 76 proyek, jumlah 117 proyek.

Dalam tahun anggaran 1978/1979 Desa Semidang Alas mendapat bantuan desa/Inpres desa berupa bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 10.400.000,00 dan swadaya masyarakat sebesar Rp 3.031.000,00 jumlah Rp 13.431.000,00. Dana tersebut telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sarana/prasarana produksi sebanyak 2 proyek, sarana/prasarana perhubungan 18 proyek, sarana/prasarana sosial 22 proyek dan sarana pemasaran 2 proyek, jumlah 44 proyek, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) bidang produksi sebanyak dua proyek, yaitu satu bendungan dan satu kebun kelapa.
- (b) bidang perhubungan 18 proyek yaitu: 7 buah jembatan gantung, 7 buah jalan 2 buah gorong-gorong, dan 2 buah jembatan kayu,
- (c) bidang pemasaran dua proyek, yaitu 8 buah mesjid, 6 buah balai desa, 2 buah langgar, 1 pematang bronjong, 2 buah balai pengobatan, 1 buah kios pupuk, 1 buah rumah dinas depati, dan 1 buah Pos Hansip.

Untuk tahun 1979/1980 bantuan desa yang diterima berupa bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 14.100.000,00 dan bantuan swadaya masyarakat Rp 7.076.000,00, dan jumlah Rp 21.176.000,00. Adapun penggunaannya telah diatur untuk membiayai pembangunan prasarana sosial sebanyak 22 proyek dan prasarana perhubungan sebanyak 21 proyek, jumlah 43 proyek.

Bantuan desa tahun 1980/1081 juga telah diterima yakni bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 27.000.000,00. Di samping bantuan tersebut diterima pula bantuan khusus lomba desa yaitu bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 2.000.000,00 dan swadaya masyarakat Rp 500.000 00, jumlah Rp 2.500.000,00.

Desa Semidang Alas sudah pernah pula mendapat bantuan presiden yakni berupa satu unit mesin penumbuk padi pada tahun 1971. Inpres daerah tingkat II diterima tahun 1875/1976 yaitu berupa perbaikan jalan sepanjang 10 km dari Gelombang ke Maras Jauh.

Di samping pembangunan-pembangunan yang disebutkan di atas, di Desa Semidang Alas telah dibangun sarana/prasarana ekonomi dan sosial yang ditangani langsung oleh pemerintah. Pembangunan tersebut meliputi sarana/prasarana produksi, perhubungan, dan sosial yang kurang-lebih berjumlah 42 proyek. Biaya keseluruhannya sejumlah Rp 63.000.000,00 lebih.

Bantuan-bantuan pemerintah tersebut telah berhasil memancing pembangunan swadaya murni masyarakat. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melaksanakan pembangunan dengan biaya swadaya murni sebagai berikut:

No.	Nama/Lokasi Proyek	Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Kantor Marga Pajar Bulan	628.144,-	1971
2.	Los Pekan Muara Maras	240.000,-	1970
3.	Lokal SD Talang Durian	500.000,-	1971
4.	Kebun Kepala Marga	25.000,-	1971
5.	Perikanan Marga Kasut Laut	5.000,-	1970
6.	Lokal SD Nanjungan	150.000,-	1975
7.	Lokal Darurat SD Kayu Elang	300.000,-	1975
8.	Mesjid Rimba Besar	260.000,-	1975
9.	Lokal MIPN Rimba Besar	200.000,-	1975

1	2	3	4
10.	Lokal SD Padang Peri	1.000.000,-	1975
11.	Pos Hansip Muara Maras	25.000,-	1976
12.	Lokal SD Swasta Air Melancar	25.000,-	1976
13.	Lokal SD Lubuk Betung	150.000,-	1977
14.	Lokal SD Tedunan	500.000,-	1977
15.	Lokal SD Karang Anyar	70 000,-	1976
16.	Los Pekan Karang Anyar	50.000,-	1976
17.	Lokal SD No. 3 Pajar Bulan	150.000,-	1976
18.	Balai Pengobatan Kayu Elang	377.400,-	1977
	Jumlah	4.964 550,-	

Pembangunan swadaya murni masyarakat di atas pelaksanaannya merupakan hasil karya nyata dari pembangunan masyarakat desa. Hasil-hasil itu telah dimanfaatkan oleh rakyat sendiri.

Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dengan biaya bantuan desa atau Inpres desa juga telah dirasakan manfaatnya, apalagi pembangunan pemerintah hasilnya dirasakan sebagai milik rakyat yang amat berharga dan manfaatnya yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya: dalam sarana/prasarana pendidikan, gedung-gedung sekolah dan peralatan dan sebagainya, sarana/prasarana kesehatan, sarana/prasarana produksi, sarana/prasarana sosial, dan sarana/prasarana perhubungan dan pemasaran dan lain-lain.

Bidang pendidikan perubahannya sangat menonjol. Dahulu hanya ada delapan sekolah dasar negeri dan dua sekolah dasar swasta. Sampai tahun 1981/1982 Desa Semidang Alas telah memiliki 22 buah SD Negeri, 2 buah SMP Negeri, 5 buah SMP Swasta, 2 buah SD Swasta, dan 1 buah SMA Swasta.

Dalam bidang kesehatan telah pula berhasil dibangun 1 buah PUSKESMAS dan 1 buah balai pengobatan.

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan Pelita di daerah adalah potensi yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan itu. Di antaranya ialah adanya kesadaran masyarakat akan kepentingan pembangunan itu, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam perjuangan yang diperjuangkan bangsa dan negara, keamanan, tenaga-tenaga dan peralatan teknis untuk pelaksanaan, dan banguan biaya pembangunan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pelita itu di desa ini kebanyakan faktor alam dan perhubungan ke tempat pelaksanaan. Di musim hujan biasanya pelaksanaan pembangunan dapat terhalang. Komunikasi belum lancar dan alat transportasi belum memadai. Pengangkutan bahan bangunan ke tempat pelaksanaan pembangunan sering terhalang oleh hubungan. Lebih-lebih di tempat-tempat terpencil.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelita dari segi pandangan hidup dan kebudayaan, untuk wilayah Desa Semidang Alas dapat dikatakan tidak ada. Adanya pendapat tentang tempat-tempat yang angker dan sebagainya dengan mudah dapat diatasi dengan sistem komunikasi kepada penganut-penganut pendapat tersebut. Demikian pula faktor penghalang yang disebabkan oleh adat dan kebiasaan semuanya tidak ada. Dengan itu pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun di desa ini boleh dikatakan berjalan lancar.

Hanya suatu harapan rakyat desa Semidang Alas yang saat ini belum terlaksana; Pertama dalam Jembatan Gelombang yang sekarang jembatan gantung darurat. Buat sekarang tak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Padahal jembatan di situ adalah sentral dari semua sektor dan segala kegiatan. Kedua, adalah pembangunan di bidang kesejahteraan yakni meliputi penerangan/perlistrikan koperasi dan lain-lain sebagainya.

Semoga saja semua pembangunan pemerintah berlangsung terus sehingga dengan pembangunan itu terlaksanalah cita-cita Nasional sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

### 3.7 Desa Mubai

Pedoman-pedoman pelaksanaan PELITA seperti DIP Pusat/Daerah, Keppres dan pelaksanaan Banpres, Inpres dan lain-lain.

Berdasarkan Inpres 10/73 dan Inpres 6/80, telah dibangun gedung SD untuk desa Mubai (satu unit). Selanjutnya telah dibangun pula rumah penjaga sekolah dan rumah kepala sekolah.

Sekolah Swasta pun mendapat bantuan rehabilitasi gedung dan uang subsidi pelaksanaan pendidikan. Dilengkapi pula dengan buku-buku pelajaran dan buku perpustakaan untuk semua sekolah. Guru telah mulai ditambah, penataran-penataran guru untuk tiap bidang studi diadakan oleh Departemen melalui Proyek Pendidikan Dasar guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru. Di lokasi sentral Tes terbentuk pula Taman Kanak-kanak yang dibina oleh Karyawan Sentral PLN Tes.

Sektor-sektor lainnya, seperti pertanian, perkebunan, kesehatan dan pembinaan generasi muda mendapat bantuan dan bimbingan dari pemerintah. Di sektor pertanian dikeluarkan kredit pupuk, obat-obatan, dan alat-alat melalui Bimas, Inmas. Siring irigasi yang diperbaiki dan dibangun. bendungan Air Mubai, Air Menganyau, siring tersier dan skunder dibangun.

Setelah pelaksanaan Pelita ini dimulai, telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Areal sawah berkembang dari 160 Ha menjadi 350 Ha. Sawah yang tadinya tadah hujan, sekarang mendapat pengetahuan tentang cara-cara untuk meningkatkan hasil pertanian. Sarana perhubungan (jalan) telah diaspal. Anak-anak usia sekolah telah mendapat kesempatan untuk bersekolah dan letak sekolah lebih dekat dari dahulunya. Jembatan di jalan propinsi yang telah tua telah diganti dengan jembatan permanen (jembatan Air Mubai Kecil) yang dibangun dengan biaya RAPBD ± Rp 28.000 000,- Proyek air minum melalui program Bangdes dan Dinas Kesehatan telah dibuat, yaitu dengan pembuatan bak penampung mata air, sumur pompa dan leding. Dari uang Bandes telah dibuat sebuah jembatan gantung untuk menyeberangi Air Ketahun, jalan ke sawah.

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa watak penduduk yang kreatif dan suka bergotong royong, merupakan faktor penunjang yang sangat besar artinya dalam masa pembangunan sekarang ini. Dengan modal inilah maka segala program Pelita dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Selain dari itu daerah Mubai cukup potensial untuk pembangunan.

Bidang kepemudaan (pembinaan generasi muda) belum terorganisasi dan belum ada bimbingan dari yang berwenang. Penghambat bidang pertanian lain adanya serangan bermacam-macam hama, seperti tikus, pianggang dan babi yang belum dapat diatasi, walaupun dengan usaha pemberantasan dengan segala upaya.

Sektor Kesehatan masyarakat, melalui PKK dan Dinas Kesehatan, telah didirikan pula Pos KB, Kurus Kesejahteraan Keluarga bidang jahit menjahit, memasak, dan lain-lain. Peserta Keluarga Berencana berjumlah 101 orang, 90% peserta menggunakan pil.<sup>1</sup>)

### ***3.7 Desa Karang Anyar***

Landasan-landasan pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Desa ialah Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lewat sektor regional telah dibangun antara lain Balai Desa Karang Anyar, balai pengobatan/klinik keluarga berencana, pengerasan jalan dan pengaspalannya, perbaikan-perbaikan mesjid, bantuan pipa-pipa ledeng dari Unicef, jamban keluarga, pembinaan PKK oleh ibu-ibu Dharma Wanita, koran masuk desa, pembuatan dam-dam untuk irigasi, dan jembatan-jembatan diperbaiki.

Di damping itu dibangun gedung Sekolah Dasar Inpres sebanyak dua buah antara lain SD Inpres 38 dan SD Negeri 20. Dengan tenaga guru yang cukup dan fasilitas yang lengkap, dengan rumah penjaga sekolah. Melalui Banpres telah diadakan pembangunan dam-dam irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Bantuan Pemda/Swadaya berupa pembuatan pagar, siring-siring jalan, penyebaran batu.

Setelah diperbaikinya jalan-jalan antara lain: pengaspalannya dan pengerasannya keadaan roda perekonomian desa ini bertambah maju. Hubungan desa ini dengan desa lainnya semakin lancar. Mobil-mobilan taxi dengan leluasa dapat beroperasi melewati desa. Jembatan-jembatan yang tak dapat dilalui oleh mobil kini dengan mudah dapat dilewati.

Dengan lancarnya alat-alat pengangkutan, hasil-hasil bumi dapat diangkut dengan mudah ke pasar. Penduduk tidak lagi menjualnya dengan tengkulak-tengkulak. Di desa Tasik Malaya telah dibangun setasiun relay TVRI.

Dengan dibangunnya balai pengobatan, penduduk tidak usah jauh-jauh pergi ke rumah sakit untuk berobat. Cukup mereka berobat di desanya. Keluarga berencana telah pula berjalan dengan baik di desa ini terbukti dengan banyaknya penduduk yang telah menjadi anggotanya. Tingkat kesehatan rakyat dan pengertian tentang hidup sehat sudah mulai berkembang seperti yang diharapkan.

Sarana untuk tempat beribadah di desa ini seperti mesjid dan langgar telah diperbaiki untuk ketenangan rakyat dalam melakukan ibadahnya. Di desa ini terdapat sebuah mesjid dan tiga buah langgar.

Jamban keluarga telah pula dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 50 buah sebagai contoh jamban yang betul-betul memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Dengan dibangunnya gedung sekolah Inpres sebanyak dua buah yang lengkap dengan rumah penjaga sekolahnya besar sekali pengaruhnya di bidang pendidikan. Anaka-anak dari segenap lapisan masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu dapat menduduki bangku sekolah, karena tidak dipungut biaya. Kalau sebelum didirikannya sekolah di desa ini masih banyak anak-anak penduduk yang jauh dari rumahnya, tapi sekarang karena sekolah tersebut telah ada di desanya sendiri maka gairah untuk belajar bertambah besar.

Dam-dam irigasi yang dibangun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian baik yang ada di desa ini

maupun untuk pengairan di desa lainnya. Sekolah Dasar Islam dan SD Muhammadiyah turut pula berpartisipasi di dalam dunia pendidikan Islam.

Akibat dari pengaruh Pelita dalam pembangunan ini penduduk-penduduk desa telah pula dapat mengikuti siaran TVRI dari Jakarta, yang berguna bagi penduduk baik untuk pengetahuan maupun untuk hiburan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari UU No. 5 Tahun 1979 antara lain: Kepala-kepala desa dijadikan kepala kelurahan diangkat oleh Pemerintah menjadi Pegawai Negeri berikut pembantu-pembantunya. Kepala Kelurahan langsung di bawah Camat. Kesimpulannya hasil-hasil pembangunan dalam Pelita ini telah dapat dinikmati oleh rakyat secara nyata dan merata.

Faktor penghambat yang menyolok boleh dikatakan tidak ada. Tetapi karena semakin lama makin banyak penduduk yang menetap di desa ini yang terdiri dari bermacam-macam suku sehingga untuk mengkoordinasinya bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi karena hasil dari pembangunan Pelita ini telah dapat dinikmati dan dilihat oleh penduduk hasilnya maka kesadaran ini sedikit demi sedikit telah timbul.

Faktor-faktor yang menunjang ialah faktor alam. Banyaknya sungai yang mengalir di desa ini dan telah tanahnya yang tinggi. Sehingga pembuatan dam-dam irigasi banyak terdapat di desa ini.

### ***3.8 Desa Pensiunan***

Landasan dasar pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Desa diatur oleh Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 tentang dan Peraturan Pedoman-pedoman lain pelaksanaan Pelita. Pelaksanaan Pelita dijalankan melalui berbagai jalan, yaitu:

- (1) Sektoral/regional, berupa perbaikan dan pengaspalan jalan.
- (2) Keppres dan Inpres, berupa pembangunan los mini, pembangunan pertokoan, dan pembangunan sekolah dasar.
- (3) Departemen, berupa satu unit Puskesmas dan perumahan dokter dua buah, dan tiga unit gedung SMP ditambah satu ruangan laboratorium.

- (4) Bank Desa/Swadaya, dibangun sebuah balai desa dan go-rong-gorong.
- (5) Swadaya/bantuan Pemda berupa satu buah mesjid dan satu buah pesantren serta rehabilitasi Sekolah Dasar Muhammadiyah.

Pelaksanaan Pelita di desa ini juga ada faktor penunjang dan penghambatannya. Faktor penghambatannya antara lain: (a) alam lingkungan Desa Pensiunan tidak begitu luas dan sebagian besar telah ditempati perumahan penduduk, sehingga lokasi untuk menambah bangunan yang ada tidak ada lagi, (b) sikap mental penduduk (masa bodoh) merupakan faktor penghambat yang cukup berarti, tetapi dengan adanya hasil pelaksanaan Pelita yang telah dinikmatinya, hal yang dapat mengurangi sikap mental mereka tersebut. Adapun faktor penunjangnya antara lain (a) adanya perkembangan/pertambahan penduduk baik yang lahir maupun pendatang baru. (b) Faktor Lingkungan/pergaulan, (c) keberhasilan Pelita yang telah dirasakan oleh masyarakat seperti bangunan pasar, SMP, Puskesmas, Kantor Kelurahan dan lain-lain, (d) bertambahnya pengetahuan masyarakat bidang keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, jamban keluarga, P4, dan lain-lain. (e) adanya pengemban pembinaan desa serta pemerintahan desa, misalnya kelurahan, perangkat kelurahan dan sekretaris desa.

Bidang pendidikan yang dilaksanakan Dharma Wanita melalui Lembaga Keamanan Masyarakat Desa. Juga yang dilaksanakan bidang pendidikan melalui Pendidikan Masyarakat seperti Paket A, keterampilan melalui Neketran tidak kalah pentingnya sebagai faktor penunjang pelaksanaan Pelita.

**CATATAN:**

1. Berdasarkan catatan Ketua Pos KB Desa, Ny. Roslia Ishak.

## **BAB IV**

### **PENGARUH PELITA BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

#### ***4.1 Desa Pasar Bengkulu***

Pemekaran desa-desa di tempat Datuk Wilayah atau di dua Wilayah Kecamatan, Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu sebagai realisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 September 1980, No. 14-502 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan, termasuk desa Kepemangkuan Pasar Bengkulu, baru mulai dilaksanakan bulan Desember 1981. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan Desa yang baru diterapkan itu, barulah berada pada tingkat pengenalan dan belum menunjukkan pengaruh-pengaruh yang berarti dan mendalam bagi kehidupan penduduk.

Sekalipun demikian, suasana sistem pemerintahan desa yang lama dengan pimpinan Datuk Wilayah, dan para Pemangku sebagai pimpinan desa Kepemangkuan yang membawahi atau bagian dari daerah wilayah pimpinan Datuk, pada Daerah Tk. II Kotamadya Bengkulu sudah mulai ditinggalkan atau tidak berlaku sama sekali. Sebagai realisasi dan akibat dari pengundangan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, dapat kita saksikan bahwa prosedur pelaksanaan persyaratan pengangkatan Lurah

sebagai Kepala Pemerintahan Desa, Kewenangan dan peranannya di tengah-tengah masyarakat, tidak beranjak sedikit pun dari materi Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tersebut. Dalam penyesuaian dengan peraturan ini bagi pejabat pimpinan pemerintahan desa yang lama, seperti Datuk dan Pemangku, yang berstatus Pegawai Negeri atau ABRI yang non aktif, atau pensiunan pegawai negeri atau pensiunan ABRI, dengan sendirinya menarik diri dan kembali ke jabatannya atau fungsinya sebelum itu. Selanjutnya bagi mereka yang merupakan anggota perangkat desa dalam struktur pemerintahan desa gaya baru, diangkat statusnya sebagai pegawai negeri dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Bengkulu.

Pengaruh Pelita terhadap sistem Pemerintahan Desa ini sangat besar artinya. Dengan keberhasilan pembangunan yang adil dan merata, dalam arti sebagian besar program pembangunan yang dilaksanakan sudah dapat dirasakan oleh rakyat desa tersebut, berarti taraf hidup dan sistem kehidupan masyarakat desa sudah mulai berangsur meningkat. Selanjutnya kepercayaan rakyat akan kebijaksanaan Pemerintahan Orde Baru, loyalitas dan partisipasi terhadap pembangunan dengan sendirinya semakin meningkat pula.

Sebaliknya sistem Pemerintahan Desa yang baru ini, lebih tepat dirasakan dalam usaha peningkatan keamanan yang terpadu pada umumnya dan keamanan kelancaran pembangunan negara pada khususnya, lebih-lebih terhadap kestabilan keamanan dan pembangunan di desa itu sendiri.

#### ***4.2 Desa Panorama***

Sejak dicanangkannya Pelita pertama tanggal 1 April 1969, seluruh wilayah Indonesia, mulai bergerak melaksanakan pembangunan-pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang meningkat makmur yang merata.

Sesuai dengan sifat pembangunan yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, maka pada Pelita pertama itu Desa Panorama belum disebut-sebut dalam perencanaan, bahkan sebagian besar masih merupakan semak belukar.

Realisasi pembangunan Desa Panorama baru dimulai sejak berlangsungnya Pelita III. Landasan-landasan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara adil dan merata.
- (2) Ingin meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di segala bidang.
- (3) Program peluasan wilayah Kotamadya Bengkulu, yang jumlah penduduk dan kebutuhannya semakin hari semakin meningkat.

Landasan-landasan yuridis formal sama dengan landasan pembangunan di daerah lain, yakni peraturan-peraturan dan pedoman pelaksanaan Pelita. Adapun jenis jenis hasil pembangunan di dalam Desa Panorama adalah sebagai berikut:

- (1) Pembuatan dan pengaspalan jalan 15 km.
- (2) Pemasangan jalur atau aliran pelistrikan di sepanjang jalan.
- (3) Pembangunan dan buah sekolah Inpres.
- (4) Pembangunan satu buah sekolah Tsyanaawiah.
- (5) Pembuatan gedung Puskesmas
- (6) Pembangunan satu unit pasar Inpres yang terdiri dari sepuluh los pasar.
- (7) Pembangunan sebuah terminal bis penumpang ke luar kota
- (8) Pembangunan satu unit Gedung Pusat Latihan Kerajinan Industri (PLKI)
- (9) Pembangunan kompleks PERUMNAS.
- (10) Pembangunan satu unit Sekolah Pendidikan Luar Biasa.
- (11) Pembangunan satu unit Sekolah Agama Darul Salam
- (12) Pembangunan kompleks Asrama Tentara (Pelita II).
- (13) Pemasangan jalur pipa air bersih
- (14) Pembangunan Mesjid
- (15) Pembangunan-pembangunan lain, yang bersifat non fisik.
- (16) Pembangunan Kantor Pos Pembantu.
- (17) Pentrapan UU RI No. 5 tahun 1979 di Bidang Pemerintahan Desa.

Dengan direalisasikannya UU No. 5 tahun 1979 ini, status desa berubah menjadi kelurahan, Pelaksanaan di bidang peme-

rintahan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Bahkan seluruh warga Desa Panorama menyambut gembira, disertai dengan semangat kerja dan partisipasi yang tinggi. Bekas Pemangku yang berpengalaman dalam jabatannya yang bertahun-tahun, sejak bulan Desember 1981 secara kebetulan diangkat sebagai kepala kelurahan dengan status pegawai negeri.

#### 4.3 Desa Belakang Pondok

Sejalan dengan pengembangan wilayah administrasi Kotamadya Bengkulu, Pemerintah Daerah Kotamadya Bengkulu membagi wilayah daerahnya menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan direalisasinya UU RI No. 5 tahun 1979 maka status Daerah Wilayah dengan kewenangannya menjadi hilang dan yang berlaku adalah struktur pemerintahan desa menurut UU RI tahun 1979.

### STRUKTUR PEMERINTAHAN



Sesuai dengan bunyi pasal 22 ayat 10 dan seterusnya mengatakan, dalam ibu kota Negara ibu kota propinsi, ibu kota

kotamadya, kota administrasi dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dapat dibentuk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (pasal 1 ayat b). Pemerintahan kelurahan (23) adalah:

- (1) Pemerintahan kelurahan terdiri atas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan terdiri dari sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
- (4) Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (3) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat-pejabat yang berwenang

Kepala kelurahan (pasal 24), adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepengawain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf g undang-undang ini.

Sebelum memangku jabatannya kepala kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (pasal 25).

Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut. "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapa-pun juga. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah, dan Kelurahan. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepala kelurahan berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena (pasal 26):

- (1) meninggal dunia
- (2) atas permintaan sendiri

- (3) tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf g Undang-undang ini.
- (4) melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang ini.
- (5) melanggar larangan bagi kepala kelurahan yang dimaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini
- (6) sebab-sebab lain

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan kelurahan, kepala kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat. (pasal 27).

Kepala kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat kelurahan. (pasal 28).

Sekretariat kelurahan adalah unsur staf yang membantu kepala kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan kelurahan. (pasal 29 dan 30).

Pasal 30 berisi butir-butir sebagai berikut.

- (1) Sekretariat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan.
- (2) Sekretariat kelurahan dan kepala-kepala urusan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila kepala kelurahan berhalangan maka sekretaris kelurahan menjalankan tugas dan wewenang kepala kelurahan sehari-hari.

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 31)

Kepala lingkungan adalah unsur pelaksanaan tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu

Kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan kedudukan dan peranan Pemimpin masyarakat non Pemerintah, maka yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah adalah semua pemimpin, tokoh-tokoh atau pejabat dalam masyarakat yang bukan pegawai negeri/ABRI, atau di luar *slagorde* KORPRI, atau mereka yang secara kebetulan ditunjuk memimpin organisasi profesi atau organisasi sosial keagamaan yang sifatnya non pemerintah yang dapat kita golongkan pada kategori pertama adalah. ulama ketua/tua tua adat, pemimpin-pemimpin organisasi swasta seperti kesenian daerah, olahraga, kelompok tani, kelompok buruh, nelayan dan lain-lain. Yang dapat kita golongkan pada kategori kedua, adalah mereka yang kebetulan ditunjuk sebagai pemimpin organisasi profesi, sosial, keagamaan dan lain-lain yang sifatnya non pemerintah, sekalipun pemimpin atau orang-orang yang ditunjuk itu pada hakekatnya adalah oknum pegawai pemerintah

Sesuai dengan sifat masyarakatnya yang suka berpartisipasi dalam pembangunan negara maka kedudukan pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah ini, tidak lain merupakan partner atau kawan terdekat bagi pejabat-pejabat formal pemerintah. Mereka cukup berperan dalam kehidupan masyarakat khususnya hal-hal yang bersifat sosial budaya dan keagamaan. Mereka biasanya pemerintah tidak akan melengahkan moment dan fungsi dari pejabat masyarakat yang berpengaruh itu, bahkan setiap kegiatan dalam masyarakat selalulah diikutsertakan secara bersama-sama.

Di dalam sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan seperti yang digariskan dalam UU RI No. 5 tahun 1079 Lurah dan perang-

kat Kelurahanya diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam hal ini tidaklah semua pejabat masyarakat non pemerintah itu yang dapat diangkat atau terserap menjadi pegawai negeri. Untuk menjadi pegawai negeri perlu dipenuhi beberapa persyaratan seperti usia, pendidikan dan lain-lain. Sehingga ada di antara tua-tua adat itu, tetap memimpin fungsi profesi organisasi sosial budaya tersebut.

Hal seperti ini bukanlah menjadi permasalahan, sebab peranan mereka masih dapat kita manfaatkan dan seyogianya harus dimanfaatkan terutama bagi daerah atau desa yang fungsi adat istiadatnya masih dominan. Sebagai contoh dapat kita kemukakan, sebelum lahirnya lurah di desa atau wilayah kepe-mangkuan kota Bengkulu, ditunjuk/dipilih seorang Pemangku yang memahami adat istiadat setempat. Hal ini memang sangat berarti dalam membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, seperti pada upacara adat perkawinan. Tetapi dengan sistem Lurah yang diangkat dengan status pegawai negeri, fungsi penguasaan di bidang adat istiadat ini, tidak selalu diketemukan. Tidak selalu seseorang pejabat lurah memahami adat istiadat setempat, apalagi bagi mereka yang usianya masih muda. Namun dengan usaha kerja sama dan kordinasi yang baik, permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi.

Mengenai organisasi politik dan non-politik, ternyata kantor organisasi politik yang berdomilisi di desa itu tidak ada, yang ada hanya anggota-anggota dari organisasi politik tersebut, yakni PPP (30%), Golkar (68%), dan PDI (2%)<sup>1</sup>

Organisasi non politik yang ada di desa ini ialah.

- (1) LKMD selaku badan musyawarah desa
- (2) Karang Taruna dengan kegiatan membantu kegiatan kepala kampung, olah raga, pendidikan, dan usaha sosial.
- (3) PKK, anggotanya terdiri atas kaum ibu dengan kegiatan meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat.
- (4) Kelompok pengajian Agama Islam
- (5) Kelompok kesenian daerah

- (6) Organisasi Muhammadiyah dengan kegiatan Agama Islam/ dakwah, pendidikan dan sosial
- (7) KUD dengan kegiatan perkoperasian

#### ***4.4 Desa Padang Sialang***

Dari uraian-uraiah hasil hasil yang diperoleh dari Pelita di desa tersebut, dapatlah kita rasakan bagaimana besar pengaruh Pelita itu sendiri terhadap desa khususnya di bidang Pemerintahan Desa.

Pelita ingin mewujudkan masyarakat adil, makmur secara merata berdasarkan dan UUD 1945, Program Pelita sesuai pula dengan aspirasi rakyat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Karena itu pengaruh Pelita yang hasilnya sebahagian sudah dirasakan nikmatnya oleh rakyat desa, bukan saja memberi jalur kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata, tetapi juga menambah semangat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di desa itu sendiri. Rakyat berlomba-lomba, bergotong royong mencoba cara teknik modern yang diperkenalkan, belajar dan bekerja keras, serta mengatur dan memimpin desanya secara bijaksana.

Di bidang Pemerintahan, walaupun materi UU No. 5 tahun 1979. belum lagi diterapkan tetapi pengaruh dari pada Pelita yang ada cukup memberi kestabilan dan ketertiban di dalam desa itu sendiri. Dengan ini pula pembangunan desa berjalan dengan lancar.

#### ***4.5 Desa Padang Genting***

Dasar hukum, susunan organisasi persyaratan, pemilihan, pelantikan, kewenangan dan tanggungjawab pemerintahan desa belum ada perubahan sama sekali, semuanya masih menurut struktur pemerintahan desa sebelum Pelita. Kedudukan dan pimpinan masyarakat non pemerintah desa juga belum mengalami perubahan. Pelaksanaan sistem perangkat desa dalam rangka pembaharuan pemerintahan desa, sebagai realisasi dari

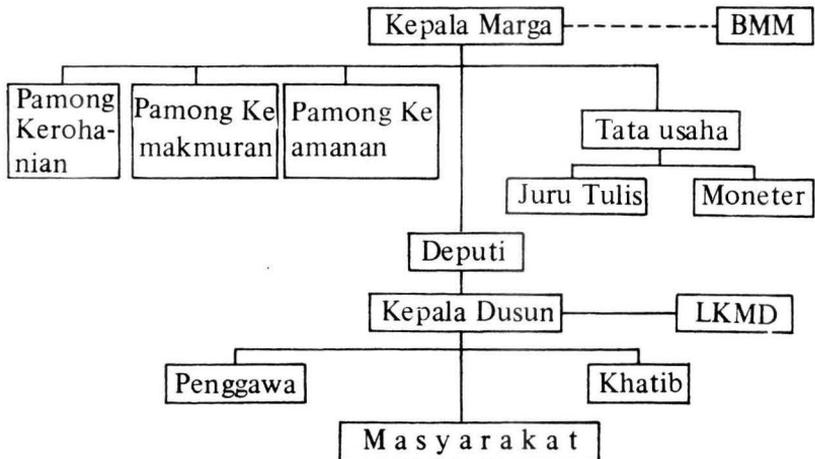
Undang-undang No. 5 tahun 1979 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 140 502 tanggal 22 Desember 1980, belum diterapkan. Di desa ini berkembang organisasi politik Golkar dan PPP. Organisasi non-politik yang ada ialah Muhammadiyah.

#### 4.6 Desa Semidang Alas (Fajar Bulan)

Sejak zaman pembangunan keadaan pemerintahan desa nampak mengalami perubahan. Pemerintah desa diberi wewenang untuk menentukan apa yang dibangun di desa itu. Dengan ini tumbuh suatu organisasi non pemerintah yang disebut LSD atau Lembaga Sosial Desa. Sekarang nama itu berubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berada di tiap tiap unit pemerintahan desa yaitu kepala dusun.

Kepala dusun atau depati adalah pemimpin paling depan untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa. Dalam merencanakan dan melaksanakan baik pemerintah maupun swadaya depati dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

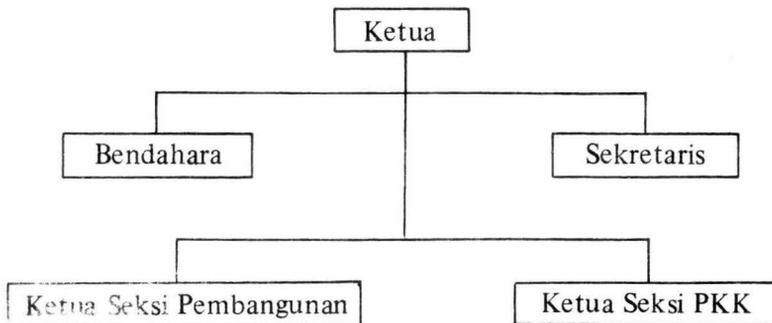
#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA<sup>2</sup>



1. Data PEMILU tahun 1977.
2. Data pada Kantor Marga Semidang Alas

Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah wewenang depati kepala dusun. LKMD berkewajiban merencanakan dan mengusulkan rencana proyek pembangunan desa setiap tahun. Rencana dan usul tersebut disampaikan kepada pasirah kepala marga (desa) sebelum tahun anggaran berlangsung. Rekapitulasi rencana dan usul pembangunan desa itu oleh pasirah disampaikan ke pihak atasan yang berwenang untuk mendapat pengesahan. Dengan disahkannya rencana itu nantinya akan mendapat biaya bantuan desa atau Inpres desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai wewenang untuk merencanakan pembangunan desa berarti LKMD memungkinkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Susunan organisasi LKMD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi (lihat bagan)<sup>3</sup>.



- Kegiatan-kegiatan
- ketrampilan
  - Keluarga Berencana
  - Kesenian
  - Olah Raga
  - Memasak

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertanggungjawab kepada pasirah atau keuangan pembiayaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Kepala desa atau pasirah demikian pula depati, dipilih oleh rakyat untuk lima tahun. Dasar hukumnya adalah Peraturan IGOB tahun 1939, Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 2 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Daerah Bengkulu No. 14 tahun 1972.

Pengangkatan Kepala Desa adalah wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setelah dipilih oleh rakyat. Pemerintah Desa menyelenggarakan pemilihan untuk kepala desa setelah lima tahun dalam jabatannya. Setelah terpilih seorang calon Kepala Desa, diangkat oleh Gubernur untuk memegang jabatannya sebagai Kepala Desa atau Pasirah. Pengangkatan seorang Kepala Desa disusul oleh pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten.

Dalam hal pemilihan itu tak kurang pentingnya peranan pemimpin masyarakat non pemerintah seperti Ketua Adat dan penghulu. Mereka mengadakan semacam gerakan untuk memberikan pengarahan dalam hal pemilihan itu kepada masyarakat.

Dengan terlaksananya program pembangunan oleh pemerintah maka keadaan organisasi politik tidak seperti sebelum Pelita. Kalau sebelum Pelita organisasi organisasi politik beradu domba, saling tingi meninggi. Suasana masyarakat tidak tenteram.

Setelah gagalnya Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang maka keadaan menjadi tenteram. Partai-partai politik yang dahulunya berjumlah amat banyak, sekarang bersatu padu sehingga hanya terdapat tiga golongan saja. Golongan-golongan itu ialah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (GOLKAR). Dengan kenyataan itu keadaan semakin stabil dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan, dengan demikian rakyat dapat merasakan kemungkinan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang politik, rakyat desa memupukkan partisipasinya terhadap organisasi politik tersebut di atas. Membandingkan dengan sebelum Pelita "Pembangunan" hanya terdapat dalam kata-kata

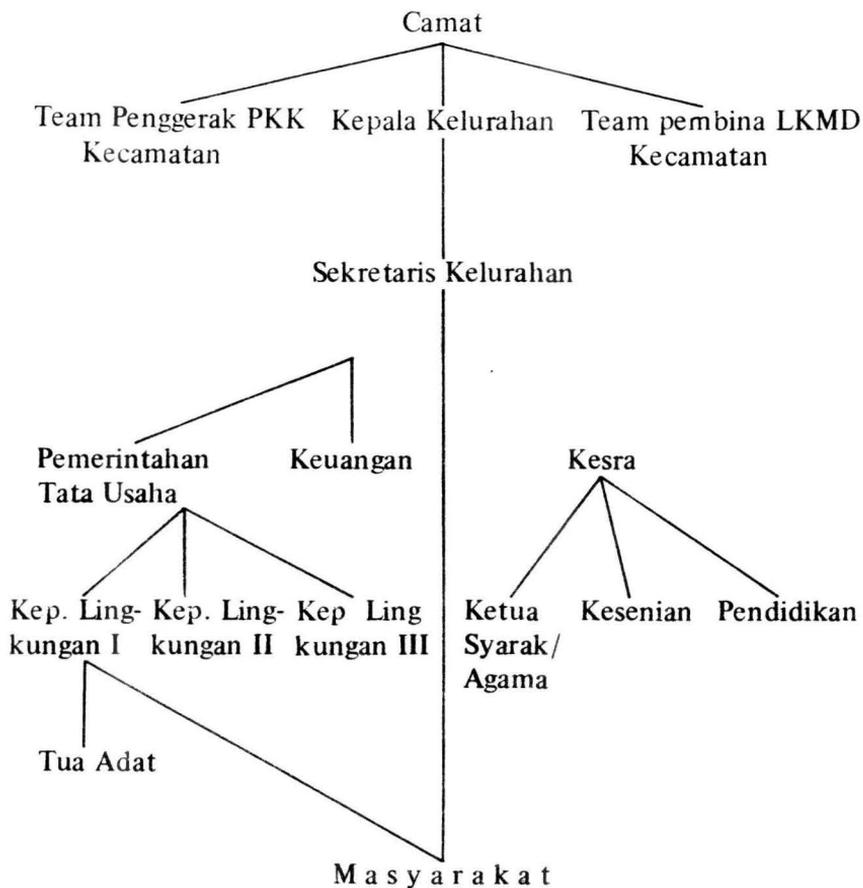
saja. Sekarang pembangunan adalah suatu kenyataan. Pelaksanaannya dapat disaksikan dan hasilnya dapat dirasakan. Ini semua berarti telah menanamkan kepercayaan rakyat yang murni kepada pemerintah.

Rakyat yang dahulunya memang mengharapkan kehidupan yang cerah gemilang di dalam kemerdekaan sekarang dirasakan harapan-harapan itu bakal menjelma menjadi kenyataan. Tiga puluh tujuh tahun sudah berlalu suatu masa yang amat panjang. Dalam masa-masa itu rakyat hanya diliputi oleh suasana kekalutan. Cita-cita merdeka dirasakan hanya mimpi.

Beberapa tahun akhir-akhir ini, sejak dilaksanakannya Repelita, rakyat terutama rakyat pedesaan mengalami perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang nyata. Tuntutan hati nurani rakyat bakal terkabul, cita-cita ingin hidup sejahtera, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila kini di ambang pintu. Dengan itu masyarakat desa menyambut Repelita dengan rasa bangga dan membantu pelaksanaannya dengan kekuatan yang ada. Kenyataan ini terbukti bahwa partisipasi masyarakat desa atas pembangunan masyarakat desa itu amat tinggi. Hal mana dapat dijadikan modal dasar pembangunan. Suatu harapan semoga Repelita berlangsung terus.

#### ***4.7 Desa Mubai***

Berdasarkan Undang Undang No 4 Tahun 1979, sejak Desember 1981 status Desa Mubai berubah menjadi kelurahan. Untuk mengetahui susunan organisasi pemerintahan kelurahan Mubai dapat dilihat pada diagram berikut.



Setiap kepala lingkungan membawahi ketua-ketua adat. Kepala kelurahan tidak dipilih oleh rakyat. Ia diangkat oleh gubernur dengan syarat-syarat mengajukan permohonan dengan melampirkan. (a) ijazah SMP atau telah berpengalaman, (b) telah berkeluarga umur minimum 25 tahun, (c) dan syarat-syarat lainnya untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri.

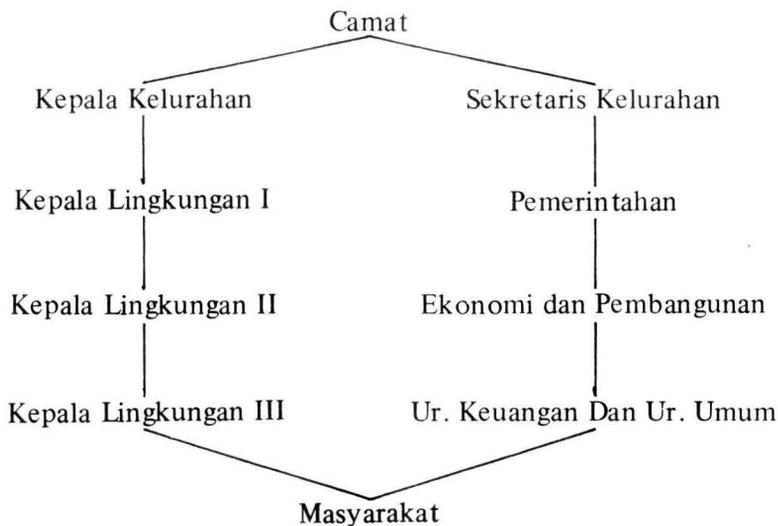
Susunan organisasi di bawah kepala kelurahan disebut perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan ini pun diangkat oleh gubernur dengan status pegawai negeri, kecuali tua adat. Ketua adat di pilih menurut adat istiadat lama.

Status kelurahan jauh berbeda dengan status desa. Desa berwenang menyusun rumah tangga sendiri dan bertanggung jawab kepada camat, sedangkan kelurahan berdiri langsung di bawah pemerintahan kecamatan. Seorang kepala kelurahan tidak berhak lagi atas ketua adat/uang maskutai. Maskutai ini langsung di terima oleh ketua adat (bandingkan dengan hak/wewenang kepala desa 3.7.) Sementara ini kepala lingkungan belum dibentuk. Nantinya kepala lingkungan ini adalah sebagai RT dan berstatus pegawai negeri.

Kedadaan organisasi politik dan non-politik belum ada perubahan sejak adanya Pelita. Yang jelas organisasi politik tidak pernah lagi disebut-sebut di tingkat pedesaan, walaupun pada Pemilu yang lalu ternyata ada suara untuk PPP dan PDI. Organisasi Muhammadiyah saja. Selamanya Golkar menang di daerah. Ini disebabkan rakyat telah dapat melihat dan menikmati hasil perjuangan Orde Baru dengan pelitanya.

#### 4.8 Desa Karang Anyar

Struktur pemerintahan Desa Karang Anyar dapat dilihat pada bagan berikut:



Struktur ini dikutip dari struktur yang ada di kantor kepala Kelurahan Karang Anyar. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, maka Desa Karang Anyar menjadi Kelurahan Karang Anyar. Kepala Kelurahan berikut perangkatnya diangkat oleh Pemerintah menjadi pegawai negeri. Kepala kelurahan bertanggung jawab langsung kepada camat. Persyaratan untuk menjadi Kepala Kelurahan ialah sebagai berikut.

- (a) berijazah minimum SMP atau telah berpengalaman dalam pemerintahan desa
- (b) telah berkeluarga dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- (c) tidak terlibat G30S/PKI
- (d) surat berkelakuan baik dari POLRI
- (e) setia kepada Pancasila dan UUD tahun 1945
- (f) surat keterangan dari Dokter (berbadan sehat)
- (g) surat keterangan menyatakan tidak pernah menjalankan hukuman berdasarkan surat keputusan dari Pengadilan.

Kepala Kelurahan tidak dipilih oleh rakyat lagi. Kepala kelurahan diangkat oleh bupati atas nama gubernur berdasarkan usul dari camat. Pelantikan kepala kelurahan dilakukan oleh bupati atas nama gubernur, berikut perangkat desanya. Kepala desa mempunyai wewenang dan menjalankan perintah yang diperintahkan oleh atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya/camat. Aparat desa ditunjuk oleh kepala desa diusulkan kepada camat dan dilantik oleh bupati. Aparat desa bertugas menjalankan/membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat yang non-pemerintah memegang peranan penting di dalam masyarakat karena mereka banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pembangunan desa.

Anggota masyarakat yang langsung/aktif dalam kepemimpinan partai politik di desa ini tidak ada sama sekali. Menurut kepala desa, yang ada hanya simpatisan-simpatisan dari Golkar (95%), PDI (0%), Organisasi non politik yang ada ialah organisasi kesenian antara lain wayang kulit, kuda kepang, ludruk, dan lain-lain.

#### 4.9 Desa Pensiunan

Struktur Pemerintahan Desa Pensiunan dapat dilihat pada bagan berikut:



Dasar hukum pembentukan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 5/1979 Bab II pasal 2. Persyaratan pembentukan pemilihan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- (4) Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara RI seperti G30S/PKI
- (5) Tidak dicabut hak pilihnya.
- (6) Tidak/sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan
- (7) Terdaftar sebagai penduduk dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- (8) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
- (9) Sehat jasmani dan rohani
- (10) Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama

Kepala desa dipilih langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun ke atas. Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur kepala daerah tingkat I.

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama di bidang pemerintahan desa.

Dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa yang dimaksud pada ayat tersebut di atas, kepala desa (a) bertanggungjawab pada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat dan (b) memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD)

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun program dan tujuan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- (1) Program jangka pendek meliputi: (a) pendidikan formal dan non-formal, (b) peningkatan kegiatan PKK, (c) kesehatan

kebersihan, lingkungan dan Keluarga Berencana, (d) peningkatan pembangunan dalam desa, (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (f) peningkatan administrasi, dan keamanan.

- (2) Program jangka panjang meliputi: (a) memasyarakatkan P4 dan (b) pembangunan.

Administrasi pemerintahan desa meliputi (1) Laporan-laporan data penduduk, lahir mati, rencana pembangunan, keuangan, ketertiban/kesehatan, kegiaran organisasi, rencana kerja tahunan, laporan tahunan, laporan triwulan, dan laporan hasil kegiatan, dan (2) administrasi lainnya surat-menyurat, agenda/ekspedisi, daftar penduduk, buku tamu, keuangan, buku kejadian, dan lain.lain.

Peranan aparat pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- (1) LKMD (Lembaga Keamanan Musyawarah Desa) adalah lembaga permusyawaratan perwakilan yang keanggotannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua Lembaga Musyawarah desa.
- (3) Sekretaris desa menjadi sekretaris Musyawarah desa yang keanggotannya terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan.

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah seperti pemuka masyarakat, tua suku, cerdik pandai adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan mereka termasuk ke dalam Lembaga Musyawarah Desa (LKMD), yang mempunyai tugas pokok membantu kepala desa/kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut:

- (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
- (2) Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- (3) Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gorong royong masyarakat untuk pembangunan
- (4) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- (5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- (6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan
- (7) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Organisasi politik dan non-politik terdapat pula di desa ini. Organisasi politik terdiri atas PPP (15%), Golkar (70%), PDI (10%), dan tidak tercatat (5%), Keterangan ini diambil sesuai dengan data Pemilu tahun 1977. Kegiatan anggota organisasi ini pasif.

Organisasi non-politik yang ada di desa ini adalah:

- (1) LKMD selaku badan Musyawarah Desa
- (2) Karang Taruna dengan kegiatan membantu kegiatan kepala kampung, olahraga, pendidikan, dan sosial.
- (3) Organisasi Muhammadiyah dengan kegiatan Agama Islam/dakwah, pendidikan, dan sosial.
- (4) KUD dengan kegiatan bidang perkoperasian
- (5) Perwanis (Persatuan Wanita Islam) dengan kegiatan Agama Islam/dakwah, pendidikan, sosial.

## CATATAN

1. Data PEMILU Tahun 1977.
2. Data pada Kantor Marga Semidang Alas.
3. Data pada Kantor Marga Semidang Alas.

## **BAB V PENUTUP**

Sebagai penutup, penulis mencoba mengetengahkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pelita di Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan tidak kecil, bahkan sudah mampu menunjukkan hasil-hasil dan memberi perubahan-perubahan terhadap sistem kehidupan masyarakat.
2. Pengaruh Pelita membuka hubungan komunikasi antar kota dan desa, menyingkap selubung isolasi, yang secara timbal balik memberi pengaruh dan akibat yang tidak sedikit. Akibat dari hubungan tersebut, arus kehidupan kota mulai merasuk ke desa, dan sebaliknya peranan desa dalam segi perekonomian dan sosial budaya menjadi lebih berarti.
3. Efek sampingan dari Pelita masuk desa, yang terjadi perlu dipikirkan dan diperhatikan secara sungguh (sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa mendatang) sehingga adat warisan leluhur yang tinggi nilainya itu serta persiapan ketenagaan yang terampil terus dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.
4. Sistem dan tata kerja pemerintahan desa masih perlu disempurnakan agar lebih berdaya guna dan tepat guna.
5. Peranan dan fungsi organisasi masyarakat, pemimpin masya-

rakat non pemerintah perlu diperhatikan, dibantu dan dijadikan *partner* dalam pembangunan.

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintah Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan perundang-undangan (IGO, dan IGOB) pemerintah Belanda tersebut. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tersebut dalam prakteknya sudah tidak berlaku lagi. Barulah setelah diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973, pada tanggal 1 Desember 1979, desa-desa di Indonesia memiliki Undang-undang tentang Pemerintahan Desa.

Tetapi bagi desa-desa (kepemangkuan, desa/dusun-dusun) tersebut, seakan-akan tidak mengetahui secara pasti dan jelas tentang dasar peraturan sebelum tahun 1965 itu. Mereka melaksanakan kegiatan pemerintahan dan lain-lain di desanya, hanya berdasarkan instruksi atau perintah dari atasan, Kewedanaan dan Kecamatan. Selain itu, struktur dan aparat pemerintahan desa tidak menggambarkan suatu kemantapan, sehingga kegiatan penataan administrasi, penyimpanan arsip-arsip tidak pernah terlaksana dengan baik, hal seperti ini pula yang menjadi hambatan bagi petugas-petugas di lapangan. Untuk menanggulangi permasalahan ini para petugas menggunakan berbagai alternatif pendekatan kepada orang-orang yang pantas dijadikan informan atau bekas sesepuh desa itu sendiri, serta buku-buku kepustakaan yang ada relevansinya.

Sejak dilaksanakannya Pelita di desa-desa khususnya di beberapa desa di wilayah Propinsi Bengkulu, dasar-dasar hukum seperti ini memang dirasakan keperluan dan penggunaannya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pengaturan dan pembinaan pemerintahan desa dirasakan lebih lancar dan lebih mantap. Dan dengan terlaksananya Pelita di desa-desa, hakekat pembangunan mulai dirasakan kemanfaatannya, sementara usaha mencapai tujuan pembangunan secara berencana dan bertahap berlangsung terus.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Dr. Mursono : *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1970 Pemerintahan Desa*. PT Ichtiar Baru 1980.
2. Buddy Prasadja : *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Terbitan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. C.V. Rajawasli 1980.
3. Drs. Daeng Sudirwo : *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Penerbit Angkasa Bandung, 1981.
4. Soehino, SH : *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980.
5. Lipton & Moore : *Metodologi Studi Pedesaan di Negara-Negara Berkembang*. Penerbit Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.
6. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bengkulu : *Daftar Type dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 1979/1980*.
7. Taufik Abdullah ; *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gajah Mada University Press, 1979.
8. Ny. Dra. Sumber Suparin : *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, 1977.

9. Drs. Bayu Suryaningrat : *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979*. PT. Metro Pos Jakarta, 1980.
10. Prof. H. Abdullah Siddik : *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka, 1980.
11. Kiagus Husin : *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu*, 1938.
12. Nugroho Notosusanto : *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Yayasan IDAYU, Jakarta, 1978.

## DAFTAR RESPONDEN

### A. DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BENGKULU

#### 1. Desa Pasar Bengkulu Kecamatan Teluk Segara

- a. Nama : Rasyid Ibrahim  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Sekratarariat DPRD  
Kotamadya Dati II Bengkulu.  
Pendidikan : SMA Negeri  
Alamat Kantor : Jalan Kartini Bengkulu  
No. Telpon 31321  
Alamat Rumah : Depan PUSKEMAS Pembantu  
Pasar Bengkulu Wilayah  
III Kotamadya Bengkulu.  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa daerah Bengkulu asli  
Keterangan : Menjabat Pemangku Pasar  
Bengkulu dari tahun 1976  
s/d Tahun 1980 dari tanggal  
6 Juni 1976 s/d tgl. 1 Febru-  
ari 1980.

## 2. Desa Panorama Kecamatan Gading Cempaka

- a. Nama : Syech Ramli  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Kelurahan  
Pendidikan : SD  
Alamat Kantor : Kantor Lurah Panorama  
Bengkulu  
Alamat Rumah : Jalan Anggrek Panorama  
Kodya Bengkulu.  
Bahasa yang dipakai : Bahasa Indonesia  
Keterangan : Responden telah menjabat  
sebagai Pemangku Pertama di  
Pasar Panorama.
- b. Nama : Yahya M. Zen  
Umur : 58 tahun  
Pekerjaan : Pensiunan ABRI  
Pendidikan : HIS  
Alamat Rumah : Jalan Anggrek Panorama  
Kodya Bengkulu.  
Bahasa yang dipakai : Bahasa Daerah Bahasa  
Indonesia

## 3. Desa Belakang Pondok Kecamatan Gading Cempaka

- a. Nama : Bodirima  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pemda  
Tk. II  
Pendidikan : SD tahun 1937  
Alamat Rumah : Belakang Pondok Rt. IV  
No. Bengkulu  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia  
Bahasa daerah Rejang  
Bahasa daerah Lembak  
Tanggal Wawancara : 15 Februari 1982

- Keterangan : Dari tahun 1949 s/d 1971  
menjadi Pemangku Desa  
Belakang Pondok.
- b. Nama : M Arif  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Ex Datuk Wilayah IV Desa  
Belakang Pondok Kodya  
Bengkulu  
Pendidikan : HIS  
Alamat Rumah : Kampung Bali No. 075  
Bengkulu  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia  
Bahasa daerah Bengkulu  
Tanggal Wawancara : 16 Februari 1982  
Keterangan : —
- c. Nama : Abubakar  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Pemangku Muda/Perangkat  
Kelurahan Belakang Pondok  
Kecamatan Gading Cempaka  
Kodya Tk. II Bengkulu.  
Pendidikan : SD  
Alamat Rumah : Belakang Pondok  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia  
Bahasa daerah Serawai  
Bahasa daerah Bengkulu  
Tanggal Wawancara : 16 Februari 1982  
Keterangan : Orang yang paling lama di  
desa Belakang Pondok.

## B. DAERAH TK. II KABUPATEN BENGKULU SELATAN

### 1. Desa Padang Sialang Kecamatan Manna

- a. Nama : Sujono Bin Kardi  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Penilik TK/SD Departemen  
P dan K Kecamatan Manna.  
Alamat Kantor : P dan K Kecamatan Manna  
Jalan Duayu Manna Kabupa-  
ten Bengkulu Selatan.  
Alamat Rumah : Jalan Inspektur Awaluddin/  
Cilacap Manna.  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia  
Bahasa Daerah :  
a. Bahasa daerah Serawai  
b. Bahasa daerah Pasemah  
c. bahasa daerah Bengkulu  
d. Bahasa daerah Jawa

### 2. Desa Padang Genting Kecamatan Seluma

- a. Nama : Zulbahri  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Penilik Kebudayaan  
Alamat Kantor : Kantor Dep. P dan K Keca-  
matan Seluma Kab. Bengkulu  
Selatan.  
Alamat Rumah : Tais, Kecamatan Seluma  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia

### 3. Desa Semidang Alas (Pajar Bulan) Kecamatan Talo

- a. Nama : Sehani M.  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Juru Tulis Marga Semidang  
Alas  
Pendidikan : Sekolah Dasar

- Alamat Kantor : Kantor Marga Semidang Alas  
di Pajar Bulan
- Alamat Rumah : Ketapang Baru, Alas Kec.  
Talo
- Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia, Bahasa  
daerah Serawai
- Keterangan : Responden telah bekerja  
sebagai jurutulis Marga  
sejak zaman Pelita.
- b. Nama : Drs. Dahlan Juaita
- Umur : 40 Tahun
- Pekerjaan : Camat Talo
- Pendidikan : Institut Ilmu Pemerintahan
- Alamat Kantor : Camat Talo di Masmambang
- alamat Rumah : Manna
- c. Nama : M. Yusuf
- Umur : 42 Tahun
- Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kandep  
P dan K Kecamatan Talo
- Pendidikan : SGB Negeri
- Alamat Kantor : Kantor Dep. P dan K Kec.  
Talo
- Alamat Rumah : Jln. Bandar Agung Pajar  
Bulan Kec. Talo
- Bahasa yang dikuasai : Bahasa indonesia, Bahasa  
Serawai
- Keterangan : Sering menulis cerita Rakyat  
Proyek IDKD.

## INFORMAN

### A. DAERAH TK. II KABUPATEN BENGKULU SELATAN

#### 1. Desa Padang Sialang Kecamatan Manna

1. Nama : A. Latif  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Departemen P dan K Kecamatan  
Alamat : Jln. Inspektur Awaluddin di Manna.  
Wawancara Tanggal : 24 Desember 1981
  
2. Nama : Amir Bangsa  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Penilik SD Kecamatan Manna  
Alamat : Jln. Setia Budi Manna  
Wawancara Tanggal : 28 Desember 1981
  
3. Nama : Rezali Yamin  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Anggota BMM Marga Pasar Manna

- Alamat : Jln. Inspektur Awaluddin  
Manna
- Wawancara Tanggal : 28 Desember 1981
4. Nama : A. Hamid Merasin  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Datuk Kepala Marga Pasar  
Manna
- Alamat : Jln. Sersan M. Thaha Manna  
Wawancara Tanggal : 28 Desember 1981
5. Nama : Djailani Mukmin  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Anggota DPRD Tk. II  
Bengkulu Selatan
- Alamat : Jln. Inspektur Awaluddin  
Manna
- Wawancara Tanggal : 29 Desember 1981

## 2. Desa Padang Genting Kecamatan Seluma

1. Nama : M. Lana  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Depati  
Alamat : Desa Padang Genting  
Wawancara Tanggal : 6 Desember 1981.
2. Nama : Z. Abidin Th.  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Ex. Kepala Marga Seluma  
Alamat : Tais, Kecamatan Seluma  
Wawancara Tanggal : 7 Desember 1981.
3. Nama : A. Razak  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Tata Usaha SMP Sembahyat  
Alamat : Desa Napal Marga Seluma  
Wawancara Tanggal : 9 Desember 1981.

4. Nama : Zulfahri  
 Umur : 49 Tahun  
 Pekerjaan : Penilik Kebudayaan  
 Alamat Kantor : Kantor dep. P dan K Kecamatan Seluma.  
 Alamat Rumah : Tais Kecamatan Seluma  
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia

## B. DAERAH TK. II KABUPATEN REJANG LEBONG

### 1. Desa Mubai Kecamatan Lebong Selatan

1. Nama : Mat Alam  
 Umur : 54 Tahun  
 Pekerjaan : Tani  
 Pendidikan : SR 3 Tahun  
 Riwayat Hidup/Pekerjaan : — Pejuang Angkatan 45  
 — Polisi Marga 1947 s/d 1949  
 — Ginde (Depati) 1956 s/d 1969
2. Nama : Ishak Sahbudin  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala Kelurahan Mubai  
 Pendidikan : SD  
 Riwayat Hidup/Pekerjaan : — Kepala Desa Mubai 1978 s/d 1981.  
 — Kepala Kelurahan Mubai 1981–1978.

### 2. desa Karang Anyar Kecamatan Gurup

1. Nama : Sudirman S  
 Umur : 39 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala Kelurahan Desa Karang Anyar

- Pendidikan : SD/SMEP  
 Alamat Kantor : Karang Anyar Curup  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup  
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia, Jawa, Rejang,  
 Padang, Palembang, Bandung  
 Keterangan : —
2. Nama : Waris  
 Umur : 41 Tahun  
 Pekerjaan : Peg. Kelurahan/Kep. Ling-  
 kungan II/Karang Anyar  
 Curup  
 Pendidikan : SD  
 Alamat Kantor : Karang Anyar Curup  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup  
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia, Jawa, Renjang,  
 Lembak, Bandung, Padang.  
 Keterangan : —
3. Nama : Ali Rahman  
 Umur : 43 Tahun  
 Pekerjaan : Pegawai Kelurahan/Kep.  
 Lingkungan III/Karang  
 Anyar Curup.  
 Pendidikan : SD  
 Alamat Kantor : Karang Anyar Curup  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup  
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia, Jawa, Padang,  
 Sunda, Rejang.  
 Keterangan : —
4. Nama : A. Manan  
 Umur : 55 Tahun  
 Pekerjaan : Imam/Karang Anyar  
 Alamat Kantor : Karang Anyar Curup  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup

- |                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Bahasa yang dikuasai | : | Indonesia, Jawa, Padang, Rejang. |
| Pendidikan           | : | SD                               |
| Keterangan           | : | —                                |
5. Nama : A. Lazim  
 Umur : 73 Tahun  
 Pekerjaan : Pensiunan Guru  
 Pendidikan : Vervolg School, L.V. O.  
 Alamat Kantor : —  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup  
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia, Padang, Bengkulu,  
 Keterangan : —
6. Nama : Saninsngat  
 Umur : 75 Tahun  
 Pekerjaan : Ex. Kepala Desa  
 Pendidikan : P.B.H.  
 Alamat Kantor : —  
 Alamat Rumah : Karang Anyar Curup  
 Bahasa yang dikuasai : Indonesia, Jawa, Rejang,  
 Keterangan : —  
 Padang.

### 3. Desa Pensiunan Kecamatan Kepahyang

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | Zakaria   |
| Umur                 | : | 80 Tahun  |
| Pekerjaan            | : | ex. Kepala Kampung Pensiunan/tani.  |
| Pendidikan           | : | SD  |
| Alamat Rumah         | : | Pensiunan Kec. Kepauyang  |
| Bahasa yang dikuasai | : | Bahasa Indonesia  |
| Keterangan           | : | Pernah menjabat Kep. Kampung Pensiunan dari tahun 1930 sampai 1960. Yaitu Kep. Kampung yang IV (empat). |

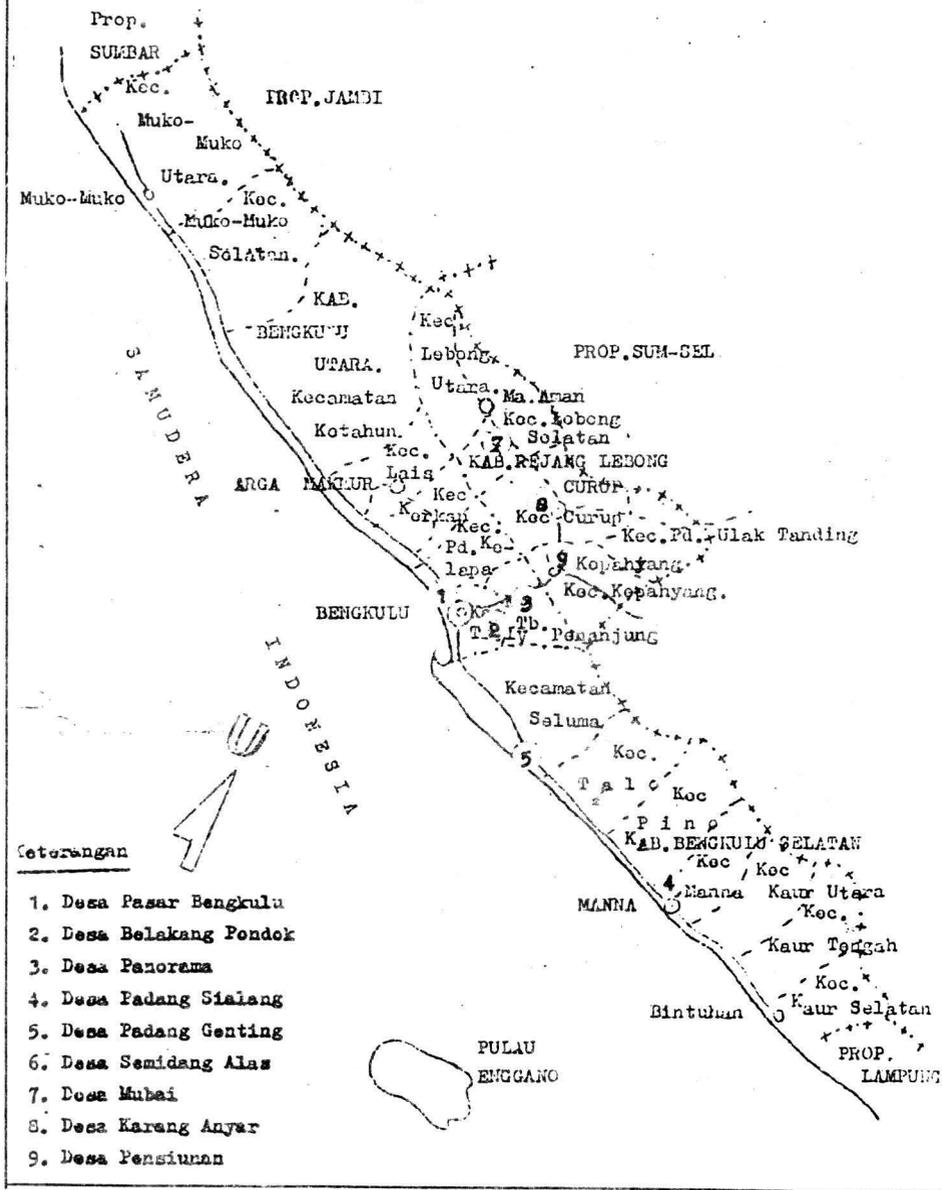
2. Nama : Aminullah  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : SMP  
 Alamat Kantor : Kantor Kelurahan Pensiunan  
 Alamat Rumah : Desa Penisunan  
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa.  
 Keterangan : —
3. Nama : M. Said S  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala Kampung Pensiunan  
 Pendidikan : SMA  
 Alamat Kantor : Kantor Kelurahan Pensiunan  
 Alamat Rumah : Desa Pensiunan  
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia, Bahasa Re-Jang.  
 Keterangan : Yang bersangkutan adalah Kep. Kampung Pensiunan yang ke VIII (sekarang). Pernah mendapat piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri untuk juara ke I Lomba Desa tingkat Kabupaten dan juara ke II lomba desa tingkat Propinsi masing-masing dengan surat Penghargaan tanggal 16 Juni 1979 No. 156/SK/B-VII-79 dan tanggal 26 Juni 1979 No. 156/SK/B-VII-79.
4. Nama : Makzum  
 Umur : 45 Tahun  
 Pekerjaan : Sekretaris Desa Pensiunan  
 Pendidikan : SD

Alamat Kantor : Kantor Kelurahan Pensiunan  
Alamat Rumah : Desa Pensiunan  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia, Bahasa  
Jawa.  
Keterangan : —

5. Nama : Ahd. Rifasi  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Penilik PGM Kec. Kepahyang  
Pendidikan : SLTA  
Alamat Kantor : Kandep. P dan K Kec. Ke-  
pahyang.  
Alamat Rumah : Emigrasi Permu  
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Indonesia  
Keterangan : Selama masa kerjanya ber-  
tugas di Kepahyang di sekitar  
Desa Pensiunan.

PETA PROVINSI BENGKULU

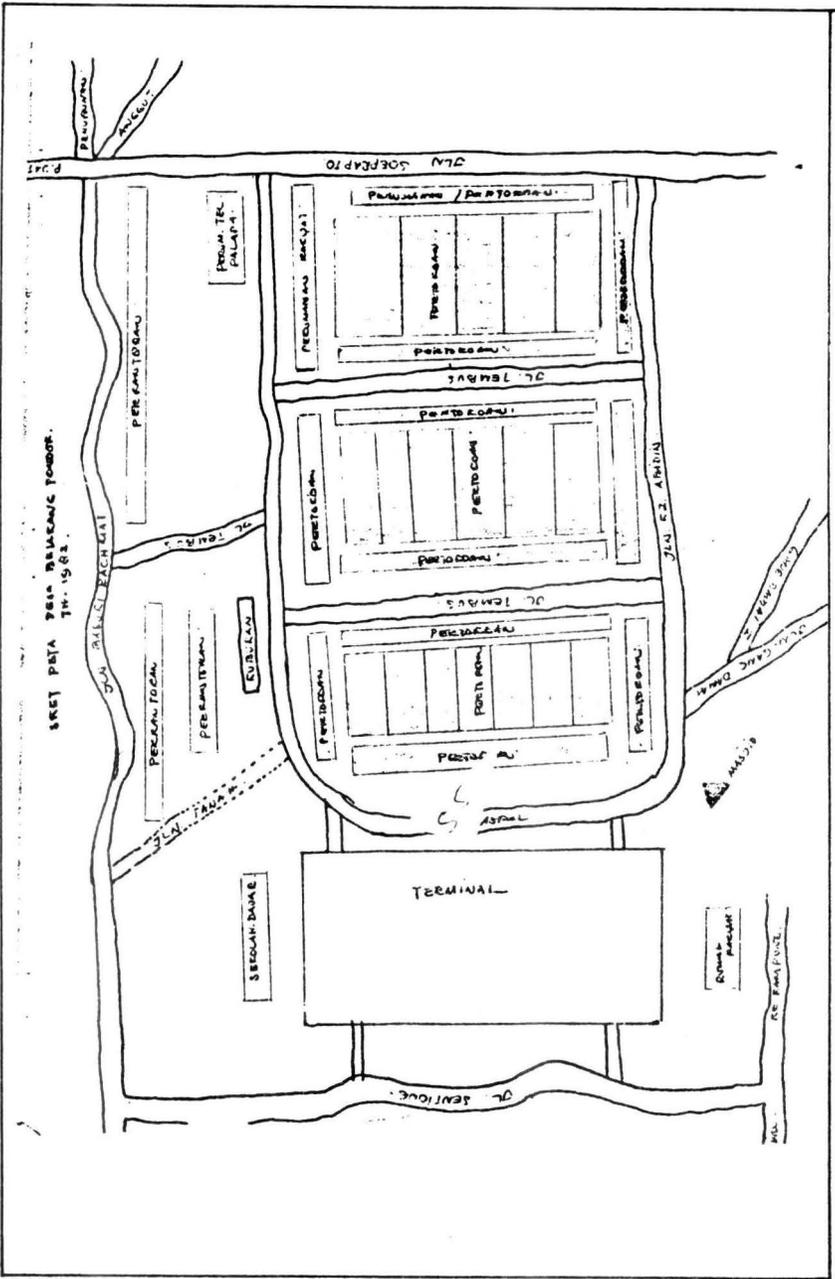
SKALA : 1 : 750.000.

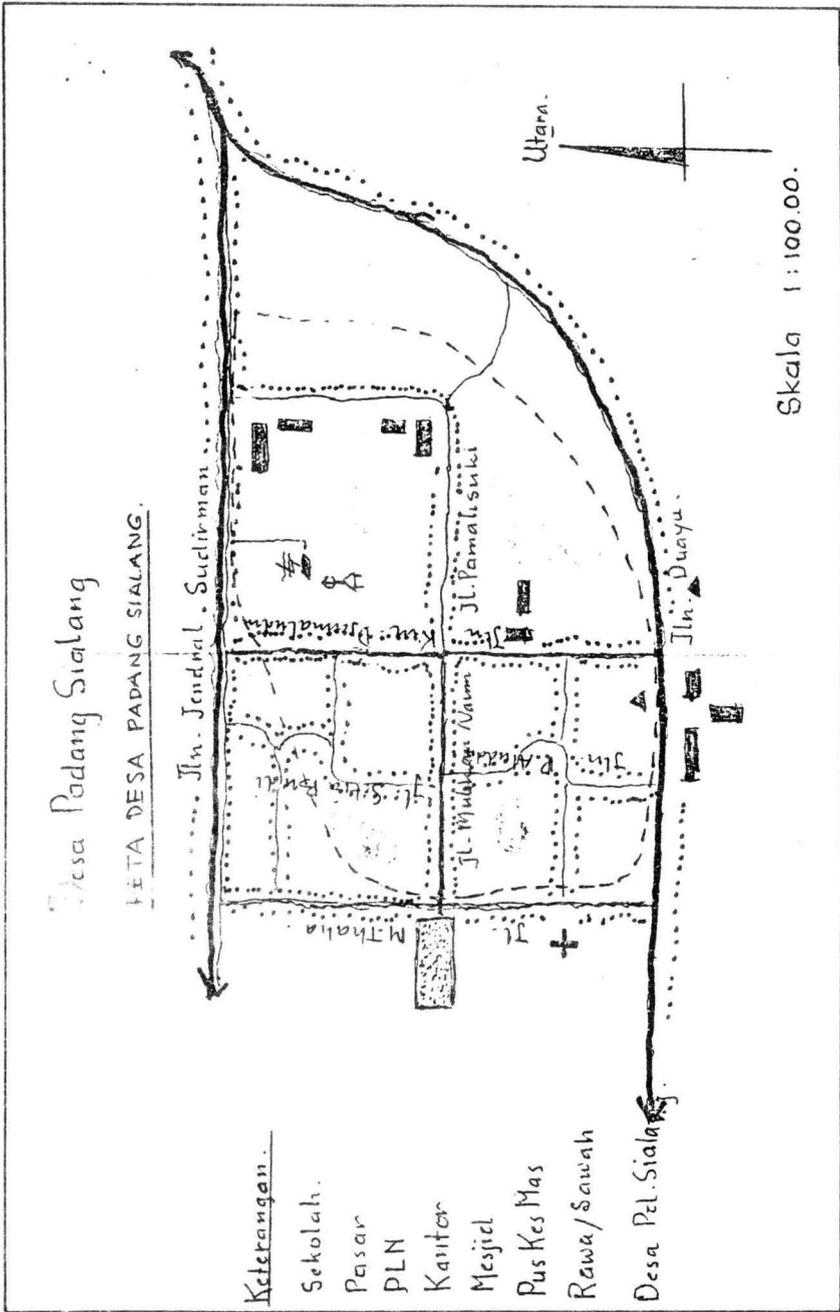


Ceterangan

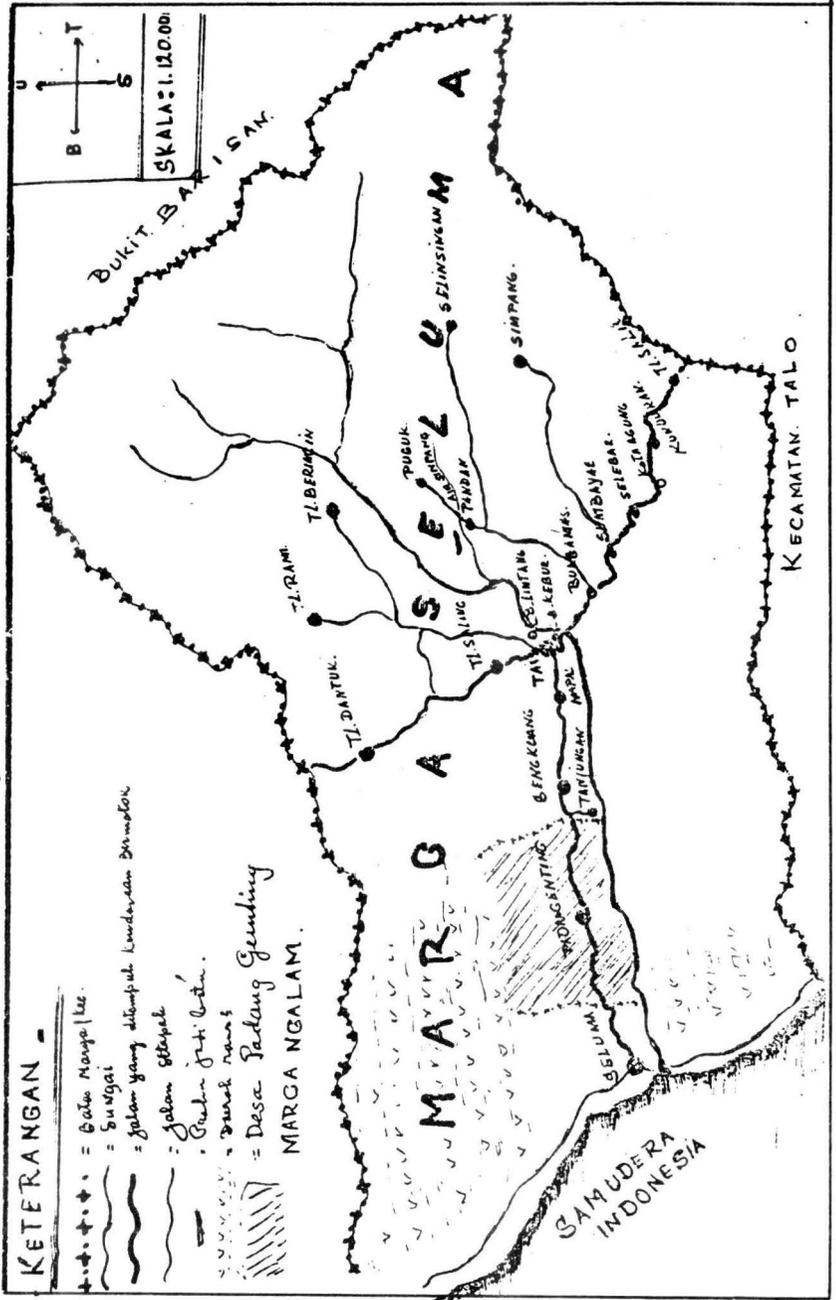
1. Desa Pasar Bengkulu
2. Desa Belakang Pondok
3. Desa Panorama
4. Desa Padang Sialang
5. Desa Padang Genting
6. Desa Semidang Alas
7. Desa Mubai
8. Desa Karang Anyar
9. Desa Pensiunan

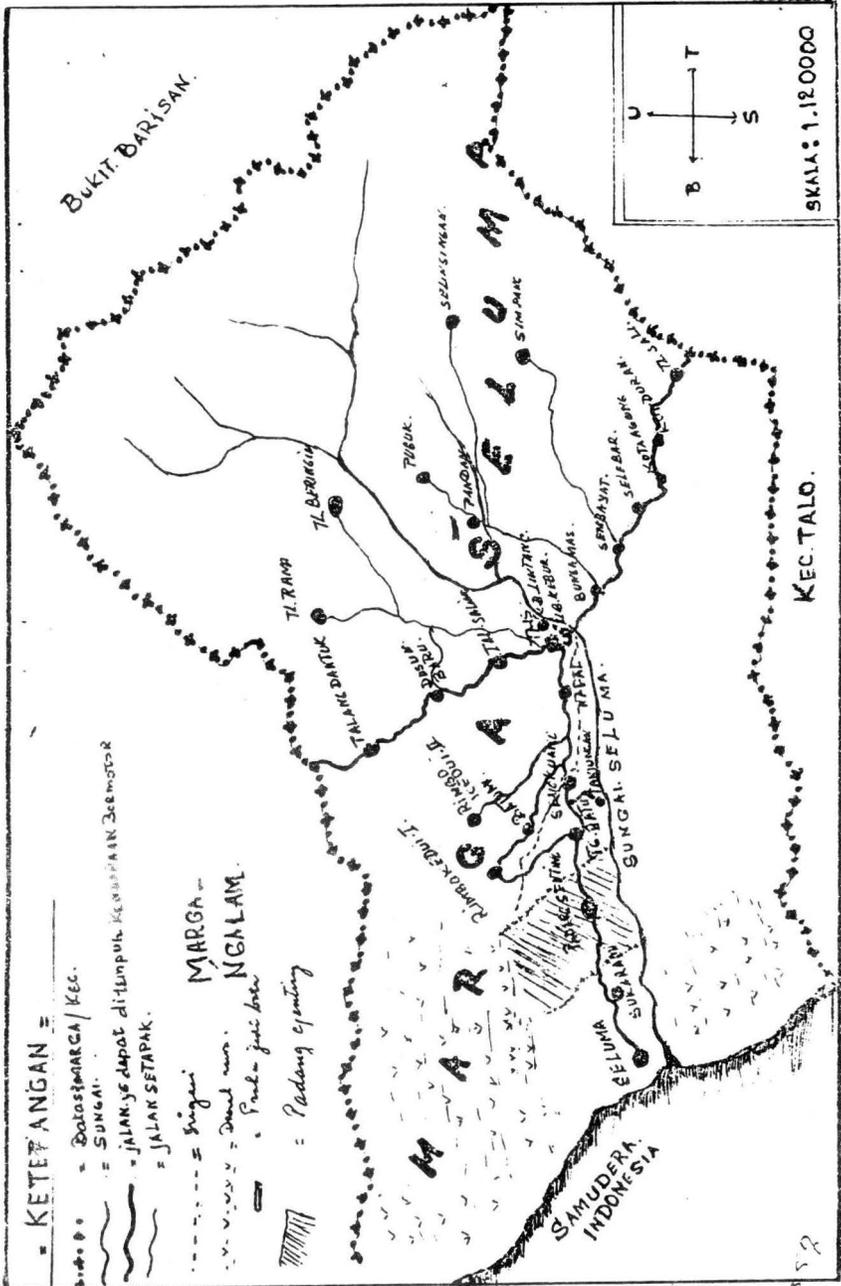






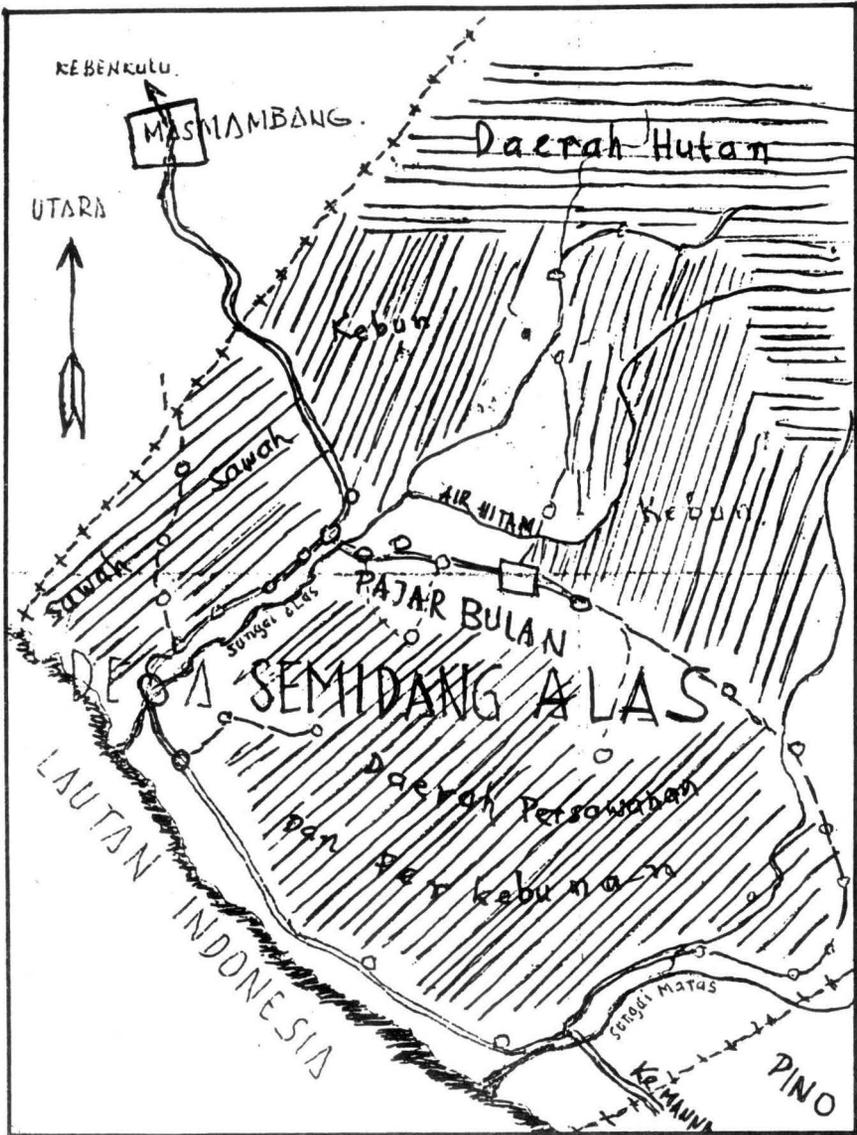
REKA. I. B. 1950-1955







# SKET DESA SEMIDANG ALAS \*\*



di sket oleh : M Yusuf.M. 130125080. -



PETA : DESA PERSIWAHAN  
 KEMANTAN KERTAJATI SESUDAH TH. 1969

